

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
DI BAWAH PRESIDEN SUKARNO TAHUN 1959-1965**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

Dominica Maria Arini Padni

N I M : 87 214090

N I R M : 87 527200084

**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1994**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
DI BAWAH PRESIDEN SUKARNO TAHUN 1959-1965**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Pendidikan Sejarah*

Oleh :

Dominica Maria Arini Padni

N I M : 87 214090

N I R M : 87 527200084

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1994**

SKRIPSI
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
DI BAWAH PRESIDEN SUKARNO TAHUN 1959-1965

Oleh :

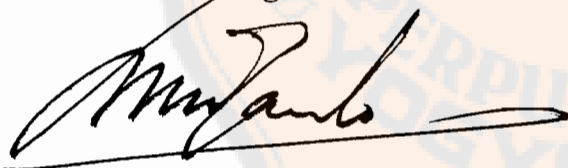
Dominica Maria Arini Padni

N I M : 87 214090

N I R M : 87 527200084

telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A.

tanggal 15 Januari 1995

Pembimbing II



Drs. S. Adisusilo

tanggal 15 Januari 1995

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MASA DEMOKRASI
TERPIMPIN DI BAWAH PRESIDEN SUKARNO
TAHUN 1959-1969**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

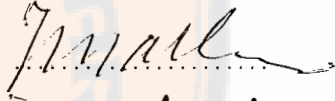

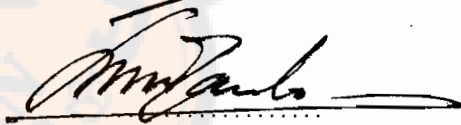
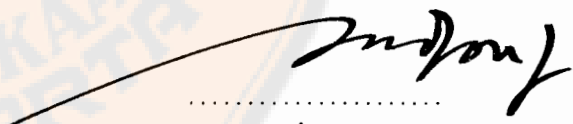

Dominica Maria Arini Padni

N I M : 87 214090

N I R M : 87 527200084

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 19 Nopember 1994
dan dinyatakan memenuhi syarat

SUSUNAN PANITIA PENGUJI :

| | Nama Lengkap | Tandatangan |
|-------------------|--------------------------------|---|
| Ketua | Drs. J. Markiswo |  |
| Sekretaris | Drs. A.K. Wiharyanto |  |
| Anggota | Drs. G. Moedjanto, M.A. |  |
| Anggota | Drs. S. Adi Susilo J.R. |  |
| Anggota | Drs. B. Musidi, M.Pd. |  |

Yogyakarta, 16 Januari 1995

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Dekan,



Dr. A. Priyono Marwan, S.J.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



- Mempelajari sesuatu dengan tanggung-tanggung bisa membahayakan, tapi tidak belajar sama sekali justru bisa berakibat fatal (Viscount Samuel)
- Saya bisa menarik sukses karena ada orang yang mempercayai saya (Ulyses S. Grant)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Kupersembahkan Skripsi ini
untuk keluargaku yang tercinta,
serta almamaterku Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri Program S1 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Skripsi yang mengambil judul "Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Di Bawah Presiden Soekarno tahun 1959-1965" ini terdiri dari VI bab. Di dalam masing-masing bab antara lain dibicarakan mengenai konsep politik luar negeri bebas aktif, situasi dalam negeri Indonesia pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, situasi luar negeri era perang dingin, politik luar negeri bebas aktif antara harapan dan kenyataan serta kesimpulan.

Banyak pihak telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk bantuannya diucapkan terima kasih, terutama kepada :

1. Bapak Drs. G. Moedjanto, MA. selaku pembimbing pertama.
2. Bapak Drs. S. Adisusilo JR selaku pembimbing kedua.
3. Pihak Universitas Sanata Dharma yang telah menyediakan fasilitas berupa Perpustakaan yang sangat menunjang.
4. Bapak, Ibu, saudara-saudara, suami tercinta yang telah banyak memberikan dukungan moril hingga skripsi ini selesai.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap agar Skripsi ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, September 1994

Penulis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR ABSTRAKSI

Tujuan pembuatan SKRIPSI ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai politik luar negeri Indonesia, baik secara teoritis ataupun secara nyata. Selaian itu juga untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penyelewengan politik luar negeri bebas aktif selama kurun waktu antara tahun 1959-1965. SKRIPSI ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab menyajikan data-data.

Posisi strategis yang dimiliki Indonesia ternyata membawa konsekuensi bagi Indonesia. Bila tidak berhati-hati bersikap Indonesia akan terseret dalam kancah pertarungan Ideologi yang terjadi waktu itu. Oleh karenanya dalam menentukan pola-pola hubungan dengan negara lain harus tepat, tanpa meninggalkan kepentingan nasional yang harus diutamakan. Polapola hubungan dengan negara lain yang dipilih Indonesia itu dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif.

Politik luar negeri bebas aktif mengandung dua pengertian bebas dan aktif. Bebas maksudnya sikap Indonesia terhadap perdamaian ditujukan untuk memperluas dan membela perdamaian, sedang sikap terhadap kedua blok yang bertentangan tidak memilih pihak. Aktif maksudnya upaya Indonesia untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan. Dalam pelaksanaannya politik luar negeri bebas aktif mempunyai tiga landasan yakni, landasan Ideal Pancasila, landasan struktural UUD 1945 serta landasan operasional yang meliputi Ketetapan MPR, Kebijakanaksanaan yang dibuat Presiden serta peraturan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri. Sasaran dan tujuan politik luar negeri bebas aktif terbagi dalam tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang terumus dalam Pembukaan UUD 1945, sedangkan tujuan jangka pendek ditentukan sesuai dengan kebutuhan nasional dalam jangka waktu tertentu.

Tidak selamanya politik luar negeri bebas aktif dapat dilaksanakan sesuai dengan landasan dan arah tujuannya. Banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah situasi dalaam negeri saat itu. Presiden Sukarno yang mendapatkan kembali kekuasaanya lewa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mempergunakannya untuk memusatkan kekuasaan di tangannya. Dengan demikian semua Lembaga-Lembaga Kenegaraan beradaa di bawahnya. Ide Presiden Sukarno tentang Nasakom memungkinkan Partai Komunis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Indonesia muncul menjadi satu partai yang kuat, sementara AD tidak bisa berbuat banyak karena taktik yang dipilih PKI tepat. Sementara keadaan ekonomi buruk akibat perdagangan dikuasai golongan tertentu yang bisa memanipulasi harga barang, jumlah barang yang beredar di pasaran. Akibat keadaan itu harga barang tinggi dan terjadi inflasi. Pemotongan nilai nominal uang yang diharapkan bisa menanggulangi masalah tersebut semakin memperburuk keadaan.

Di pihak lain hubungan Indonesia-RRC semakin erat, kedua negara berambisi untuk menjadi satu pimpinan. RRC mempunyai pertimbangan tersendiri untuk menjadikan Indonesia sebagai mitranya. Eratnya hubungan Indonesia-RRC berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang diambil Indonesia. Contohnya masalah Malaysia, Indonesia menganggap sebagai tindakan kaum imperialis yang bila dikaji sebenarnya merupakan masalah dalam negeri Malaysia. Bahkan Indonesia berani menyatakan keluar dari keanggotaan PBB setelah Malaysia dipilih menjadi anggota anggota tidak tetap DK PBB. Tindakan itu hanya didukung oleh RRC saja. Contoh kasus lain ketika Konferensi Gerakan Non Blok dilakukan. Indonesia mencetuskan ide Nefos kontra Oldefos yang membawa perpecahan pandangan Gerakan Non Blok. Ide ini sebenarnya diilhami dialektika yang dikenal dalam komunisme.

Akhirnya harapan politik luar negeri bebas aktif, tinggallah harapan. Kenyataan yang terjadi politik bebas aktif dibawa arus sehingga keluar dari relnya. Fanatisme anti imperialisme dan anti kolonialisme telah membutakan pandangan Presiden Sukarno. Itu yang menyebabkan kebebasan Indonesia terkekang karena harus selalu mengacu kepada RRC. Tidak dipungkiri sikap fanatisme itu tetap menjadikan Indonesia aktif tetapi tidak terarah. Munculnya Orde Baru membawa politik luar negeri bebas aktif kemabli ke arah dan tujuan politik luar negeri bebas aktif sebenarnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| LEMBAR ABSTRAKSI | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Perumusan Masalah | 9 |
| B. Tujuan Penelitian | 9 |
| C. Manfaat Penelitian | 10 |
| D. Landasan Teori | 10 |
| 1. Pengertian Demokrasi | 10 |
| a. Demokrasi liberal | 11 |
| b. Demokrasi konstitusional | 11 |
| c. Demokrasi komunis | 12 |
| d. Demokrasi Pancasila | 13 |
| 2. Pengertian Politik Luar Negeri | 17 |
| 3. Politik Luar Negeri dan Politik Dalam Negeri | 19 |
| E. Metode Penelitian | 20 |
| BAB II. POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF DALAM KONSEP | 22 |
| A. Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif | 22 |
| 1. Politik luar negeri bebas | 23 |
| 2. Politik luar negeri aktif | 25 |
| 3. Politik bebas bukan politik netral | 27 |
| B. Landasan Politik Luar Negeri Bebas Aktif | 29 |
| 1. Landasan Ideal | 29 |
| 2. Landasan struktural | 31 |
| 3. Landasan operasional | 32 |



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

| | |
|--|------------|
| C. Tujuan dan Sasaran Politik Luar Negeri Bebas Aktif | 34 |
| BAB III. SITUASI DALAM NEGERI INDONESIA PASCA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 | 37 |
| A. Alat-alat Kenegaraan | 37 |
| B. Perencanaan GBHN Oleh Presiden Sukarno | 43 |
| C. Situasi Ekonomi yang Memprihatinkan .. | 48 |
| D. Piramida Kekuasaan di Indonesia | 56 |
| 1. Kedudukan Partai-partai Sebelum Demokrasi Terpimpin | 56 |
| 2. Kedudukan Partai-partai Politik Setelah Demokrasi Terpimpin dan Dominasi PKI dalam Percaturan Politik di Indonesia | 59 |
| BAB IV. SITUASI LUAR-NEGERI ERA PERANG DINGIN DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA | 73 |
| A. Blok-blok yang Saling Bertentangan ... | 73 |
| B. Hubungan China - Uni Soviet | 75 |
| C. Wilayah Pengaruh Komunisme di Asia ... | 78 |
| D. Kiprah Indonesia di Luar Negeri | 83 |
| 1. Hubungan Indonesia - RRC | 83 |
| 2. Upaya untuk Mewujudkan Cita-cita Menjadi Satu Dunia | 91 |
| a. Aksi Konfrontasi dengan Malaysia | 91 |
| b. Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok | 99 |
| c. Keinginan Indonesia Menjadi Pemimpin Negara-negara | 108 |
| BAB V. POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN | 115 |
| A. Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Politik Anti Imperialisme dan Anti Kolonialisme | 116 |

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

| | |
|--|-----|
| B. Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Gerakan Non Blok | 124 |
| C. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif : Sebuah Prestise (?) | 130 |
| D. Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin - Politik Bebas Aktif (?) .. | 137 |
| | |
| BAB VI. PENUTUP | 146 |
| A. Kesimpulan | 146 |
| B. Saran | 154 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 156 |
| LAMPIRAN I : SATUAN PELAJARAN I | 157 |
| LAMPIRAN II : SATUAN PELAJARAN II | 159 |
| LAMPIRAN III : SATUAN PELAJARAN III | 161 |

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia terletak di persimpangan jalan dunia yang strategis, yakni antara dua samudra, Hindia dan Pasifik, serta dua benua, Asia dan Australia. Dua benua yang mengapit Indonesia itu mempunyai keadaan yang berbeda, baik alam, ideologi, sosial, ekonomi dan lain-lainya. Situasi perbedaan itu disadari oleh Indonesia. Kesadaran itu diwujudkan dengan mempergunakan kelebihan berupa posisi strategis yang dimilikinya dalam bersikap dan memenuhi kebutuhan nasionalnya.

Posisi strategis yang dimiliki Indonesia selain menguntungkan bagi Indonesia juga menimbulkan perasaan was-was. Kedua benua yang mengapitnya, tentu ingin memperluas pengaruhnya, Asia (RRC) mewakili pihak komunis di satu pihak, di pihak lain Australia mewakili blok liberal. Untuk menjaga kelangsungan hidup Indonesia maka Indonesia melaksanakan pola hubungan perilaku yang digunakan ketika memperjuangkan kepentingannya dalam berhubungan dengan negara lain atau lebih dikenal sebagai politik luar negeri.¹ Rumusan lain mengenai pengertian politik luar negeri ialah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan mempergunakan segala kekuasaan dan

¹. M. Sabir, Politik Bebas Aktif, (Jakarta, CV. Haji Masagung, 1987), h.4

kemampuan yang ada.² Politik luar negeri yang dipakai Indonesia itu dikenal dengan nama politik luar negeri bebas aktif.

Politik luar negeri ini muncul disebabkan situasi yang terjadi semenjak Indonesia merdeka. Situasi pertama adalah perang dingin yang terjadi antara dua kelompok superpower, Uni Soviet dan Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya. Indonesia yang baru lahir, sudah dihadapkan pada dua pilihan yang berat. Keadaan dalam negeri masih membutuhkan perhatian karena Belanda masih ingin kembali menjajah. Situasi dalam negeri yang belum teratur membutuhkan banyak bantuan dari luar. Melihat itu Hatta mengeluarkan pernyataan :

"Betapa lemahnya kita sebagai bangsa yang baru merdeka dibandingkan dua raksasa yang bertentangan, Amerika Serikat dan Soviet Rusia, menurut anggapan pemerintah kita harus tetap mendasarkan perjuangan kita atas adagium percaya pada diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan yang ada pada diri kita".³

Pernyataan tajam Hatta, wakil dari pemerintah itu mengkritik terjadinya perang dingin yang sangat merugikan negara-negara yang baru lahir seperti Indonesia. Hal itu akan mempersulit negara-negara baru lahir untuk mendapatkan bantuan dalam melaksanakan pembangunan. Maka dari itu posisi strategis yang dimiliki Indonesia dimanfaatkan semaksimal mungkin agar pembangunan dan pencapaian tujuan

2. Suffry Yusuf, Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1989), h.10

3. M. Sabir, op.cit., h.17

nasional dapat lancar dengan menyatakan sikap yang bebas tetapi aktif.

Situasi kedua yang mencetuskan sikap politik bebas-aktif ketika BP KNIP menanyakan sikap pemerintah Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya. Hatta wakil pemerintah menjawab dalam pidatonya tanggal 2 September 1948 yang antara lain menyatakan :

"Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro Rusia dan pro Amerika ? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik Internasional, melainkan kita harus menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita yakni Indonesia merdeka seluruhnya"⁴

Pernyataan Hatta itu lebih menunjukkan sikap pemerintah dalam melaksanakan politik luar negerinya, akan tetapi Pembukaan UUD 1945 secara implisit telah mencantumkan dasar politik luar negeri Indonesia. Alinea pertama menyatakan bahwa ...kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa... maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Alinea keempat menyebutkan ... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.... Situasi dan dasar itulah yang ikut melahirkan politik

4. I Wangsa Wijaya dan Meutia F.S,ed., Mohammad Hatta Kumpulan Pidato (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), h.201

bebas aktif dan terus menerus dipertahankan walaupun kenyataannya mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya.

Pasang surut pelaksanaan politik bebas aktif bisa diibaratkan pendulum jam yang selalu bergerak, tidak statis, mengikuti situasi dan keadaan jaman. Suatu saat bergerak ke kiri dilain waktu bergerak ke kanan mengikuti tuntutan kepentingan nasional. Setelah Indonesia merdeka misalnya, Indonesia mencari dukungan dari luar dalam menghadapi sikap Belanda yang ingin kembali menjajah. Oleh karena politik luar negeri selaras dengan politik dalam negeri, karena semuanya memang diarahkan untuk mencapai tujuan nasional.

Contoh lain bisa diambil di masa demokrasi terpimpin. Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai berlakunya demokrasi terpimpin yang telah dirintis dengan keluarnya konsepsi Presiden tanggal 21 Pebruari 1957. Dipakainya kembali UUD 1945 berarti tindakan yang dilakukan presiden mendapat dukungan.⁵ Demokrasi Terpimpin yang mengandung pengertian demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial⁶ dikatakan sangat cocok bagi Indonesia. Dengan satu pimpinan yang terpusat diharapkan pembangunan

5. Hak dan wewenang presiden yang diatur dalam UUD 1945 pasal 4 sampai dengan pasal 10 memberikan keleluasaan bagi Presiden Soekarno untuk mengabsahkan segala tindakannya, dan menjadi penguasa tunggal di Indonesia dengan Demokrasi Terpimpinnya.

6. Notosoetardjo, Kembali Kepada Jiwa Proklamasi 1945 (Jakarta: Harian Pemuda, 1959) h.125

dapat dilakukan dengan lancar. Terpusatnya kekuasaan di tangan presiden ini juga mempengaruhi kebijaksanaan yang dihasilkan, sesuai dengan tipe sang pemimpin, termasuk juga pelaksanaan politik luar negerinya.

Hal menarik mengenai pelaksanaan politik luar negeri masa ini adalah bahwa pendulum politik luar negeri bebas aktif cenderung berat ke kiri. Keadaan itu sejalan dengan perjalanan politik dalam negeri. Piramida kekuasaan yang dibangun Presiden Soekarno dengan tiga pendukung utamanya yakni PKI, AD serta Presiden Soekarno sendiri yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, lama-lama mengalami pergeseran. PKI berhasil sedikit demi sedikit menjauhkan AD dari Presiden Soekarno. Kemunculan PKI dalam panggung politik Indonesia dan dianggap mempunyai cukup pengaruh terbukti. Presiden Soekarno mengangkat Aidit dan Nyono yang dikenal sebagai pimpinan PKI masuk menjadi anggota Front Nasional, dan bukti lain lagi ketika Presiden membacakan pidato di depan Sidang Umum PBB tahun 1960 Aidit masuk menjadi anggota delegasi.⁷ Keadaan dalam negeri yang memunculkan PKI itu juga mempengaruhi dalam hubungan luar negerinya.

Indonesia cenderung bersahabat dengan RRC daripada dengan negara-negara Barat. Menurut kacamata Presiden, RRC merupakan lambang kekuatan bangsa-bangsa Asia. Sedangkan negara-negara barat adalah wakil imperialis dan

7. John D. Legge, terj., Soekarno Sebuah Biografi Politik (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985), h.371

kolonialis. Indonesia tidak menyetujui bahkan menolak adanya imperialisme dan kolonialisme di dunia, maka sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk menghilangkannya, dan tidak baik bila Indonesia bergaul dengan kaum imperialis dan kolonialis. Pandangan itu pula yang menyebabkan Indonesia harus berkonfrontasi dengan Malaysia. Malaysia yang ingin diwujudkan oleh PTM dianggap sebagai proyek kolonialis yang didalangi Inggris dan dilaksanakan oleh Tunku Abdul Rahman. Federasi Malaysia memaksakan kehendaknya kepada rakyat Serawak untuk masuk menjadi anggota federasi. Sikap itulah yang dinilai Indonesia (Presiden Soekarno) sebagai satu tindakan imperialis. Untuk itu Indonesia memberi bantuan dan dukungan pada rakyat Serawak untuk menentukan sikap terhadap Federasi Malaysia.

Berpengaruhnya komunisme di dalam negeri, semakin eratnya hubungan dengan RRC menyebabkan Presiden Soekarno mempraktekkan "Marxisme" yang cukup mempengaruhi di dalam setiap kebijaksanaannya. Seperti ketika dalam konferensi Non Blok dimana Indonesia berperan sebagai salah satu pendukung utama. Indonesia memperkenalkan pertentangan antara nefos dan oldefos, sebagai manifestasi tesis-anti tesis yang dikenal dalam Marxisme. Nefos merupakan negara-negara yang baru lahir sebagai negara merdeka, dan sebagai negara baru merdeka tidak boleh tergantung pada kelompok oldefos yang pernah menjajahnya. Untuk itu harus dibentuk satu kekuatan tersendiri untuk menandingi

kelompok oldefos ini. Gerakan Non Blok yang kebanyakan anggotanya adalah negara-negara yang baru lahir setelah PD II akan dibawa oleh Presiden Soekarno untuk mewujudkan kekuatan Nefos. Kelompok ini bertujuan untuk menghapuskan imperialisme dan kolonialisme dalam berbagai bentuk, sehingga tercipta dunia yang aman dan damai. Tentunya keinginan itu mendapat tantangan, terutama dari India yang berpendapat dunia yang aman dan damai akan tercapai bila perang dingin yang terjadi antara dua blok raksasa dapat dihindari. Tugas dan tujuan gerakan Non Blok adalah untuk menjadi penengah dari kedua blok dalam menyelesaikan masalah-masalah diantara dua blok. Pertentangan pendapat antara Indonesia dan India itu terbawa sampai KTT non blok kedua dan menyebabkan dua negara yang bersahabat itu mengalami keretakan.

Walau mendapat tantangan dari India mengenai sikap dan Indonesia yang radikal itu, Indonesia tetap berupaya mewujudkan keinginannya untuk menjadi salah satu pemimpin Nefos yang terkemuka, dan ini tidak lepas dari dukungan RRC. Upaya yang dilakukan Indonesia adalah melaksanakan politik mercusuar, dengan mengadakan pembangunan besar-besaran di Jakarta tanpa memperhatikan keadaan ekonomi yang buruk. Monumen Nasional, Gedung Olah Raga Senayan, Sarinah dibangun. Jakarta sebagai suatu pusat Nefos harus menampakkan kemegahan yang tidak kalah dari negara barat. Upaya lain yang dilakukan Indonesia untuk mempererat persahabatan antar negara yang tergabung dalam Nefos,

Indonesia menyelenggarakan Ganefo yang khusus untuk negara anggota.

Radikalisme yang ditampakkan Indonesia itu juga tercermin dalam menentukan sikapnya ketika Malaysia ditunjuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB jikalau Malaysia tetap menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Karena dengan menjadi anggota DK PBB, berarti PBB telah pula dikotori oleh imperialisme dan kolonialisme, dan yang jelas negara-negara besar telah memanipulasi PBB untuk memaksakan kepentingannya. Dan untuk itu maka Indonesia membentuk lembaga tandingan yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, yang diberi nama Conefo. Anggota-anggota Conefo juga harus bersih dari sikap imperialisme dan kolonialisme. Hal inilah yang sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, mengapa pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif masa demokrasi terpimpin yang dianggap cocok untuk Indonesia itu dinilai cenderung ke kiri ? Mengapa tujuan nasional yang hendak dicapai lewat politik luar negeri bebas aktif mengalami hambatan? Bagaimana situasi dalam negeri ? dan yang pasti mengapa politik luar negeri masa demokrasi terpimpin itu tidak lagi bebas aktif ? Untuk itu bab-bab selanjutnya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menguraikan hasil kajian penulis.

A. Perumusan Masalah

Untuk mengkaji masalah diatas maka secara garis besar dapat dirumuskan dua permasalahan, yakni perumusan secara umum serta perumusan secara khusus. Perumusan masalah secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut :
Bagaimanakah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno tahun antara 1959-1965 ?

Perumusan masalah secara khusus dapat dirinci sebagai berikut : a) Apakah politik luar negeri bebas aktif itu, pengertian, landasan dan tujuannya ? b) Bagaimanakah situasi di dalam negeri masa itu, baik bidang ekonomi ataupun politik ? c) Bagaimana pula situasi di luar negeri ? d) Hubungan Indonesia-RRC, upaya Indonesia untuk mewujudkan ambisi menjadi satu pemimpin dunia ketiga, dengan cara konfrontasi dan peranannya dalam gerakan non blok ? e) Mengapa politik luar negeri bebas aktif pada masa itu mengalami pergeseran ? Dengan perumusan masalah itu diharapkan dapat mengkaji secara rinci dan mencapai hasil yang memuaskan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mencakup dua hal yakni secara umum dan secara khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno tahun 1959 - 1965.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Untuk mengetahui pula kaitan yang terdapat dalam politik luar negeri dengan fakta-fakta yang diperoleh sehingga dapat membuktikan bahwa pelaksanaan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1965 mengalami pergeseran ke kiri sehingga ke luar rel yang telah digariskan.

C. Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini mempunyai manfaat bagi universitas sendiri ataupun bagi ilmu pengetahuan. Bagi Universitas Sanata Dharma, penelitian ini selain melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga bermanfaat untuk mengembangkan kebiasaan penelitian bagi para mahasiswa. Sehingga dengan kebiasaan meneliti akan dihasilkan sarjana-sarjana yang berkualitas.

Bagi ilmu pengetahuan penelitian ini berarti menyumbangkan pengetahuan-pengetahuan baru, yang sebelumnya belum dapat diuraikan. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan itu sendiri.

D. Landasan Teori

1. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi banyak dikenal dewasa ini, baik demokrasi liberal, komunisme, demokrasi Pancasila. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti rakyat

yang berkuasa atau government of rule⁸ Dalam perkembangannya akan mengalami perubahan pengertian disesuaikan keadaan negara yang menganutnya.

a. Demokrasi liberal

Demokrasi ini berdasarkan pada prinsip kebebasan individu. Pemerintah hendaknya tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya, terkecuali menyangkut kepentingan umum. Kebebasan yang menyangkut individu tidak mendapat campur tangan dari pemerintah akan tetapi menyangkut kepentingan umum tetap dilakukan oleh negara. Maka ada kemungkinan yang minoritas bisa menguasai yang minoritas.

Dalam pemerintahan dilaksanakan sistem parlementer. Sistem ini berarti pemerintah bertanggungjawab kepada parlemen. Setiap kali ada ketidakcocokan maka presiden bisa menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet. Sehingga dalam demokrasi ini wajar bila dalam waktu singkat kabinet dapat berganti-ganti.

b. Demokrasi konstitusional

Ciri khas demokrasi ini adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam

⁸. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta : PT Gramedia, 1986) h.50

konstitusi. Jadi pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya, serta hak-hak asasi warga negaranya secara tegas dijamin.⁹

Untuk menghindari kesewenangan pemerintah maka perlu pembagian kekuasaan dengan diselenggarakan beberapa lembaga yakni pemerintahan yang bertanggung jawab. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan yang ada di masyarakat. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Diharapkan dengan adanya lembaga-lembaga itu tidak akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan karena segala sesuatunya diatur oleh hukum.

c. Demokrasi komunis

Hukum dialektika menjadi dasar dari demokrasi ini sampai terbentuknya satu negara komunis. Pengertian hukum dialektika adalah pertentangan-pertentangan pada lapisan bawah akan senantiasa bergerak, dan pergolakan itu akan menggerakkan lapisan di atasnya, sehingga terbentuklah satu kekuatan mayoritas, satu partai saja yakni yang dikenal dengan diktatur proletariat.¹⁰ Di dalam kehidupan bernegara segala sesuatunya diatur dan dikuasai

⁹. Ibid., Dasar-dasar...., h.52

¹⁰. William Ebenstein, Isme-isme Dewasa Ini (Penerbit Swada, 1963), h.12

oleh satu kekuatan ini. Kekuatan mayoritas di negara ini menindas kekuatan minoritas yang ada atau boleh dikatakan kekuatan minoritas hampir tidak ada karena senantiasa ditindas kekuatan mayoritas.

Ciri-ciri yang terdapat di dalam demokrasi ini, adalah adanya suatu wadah front persatuan yang merupakan landasan kerjasama dari partai komunis dengan golongan-golongan lain. Masyarakat komunis hanya mengenal satu peran, yakni partai komunis, penggunaan bebarapa lembaga pemerintahan dari negara yang telah ambruk. Tidak adanya kebebasan pendapat, berserikat bagi warga negaranya, karena segala sesuatunya telah diatur secara sentral dari pusat.¹¹ Jadi Demokrasi Komunis adalah demokrasi dimana hanya satu partai yang berkuasa, sedangkan kekuatan minoritas tidak dibiarkan hidup dan berkembang.

d. Demokrasi Pancasila

Demokrasi ini termasuk dalam demokrasi konstitusional. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan faham kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung : unsur kesadaran religius dan menolak atheisme. Kebenaran dan kecintaan berlandaskan budi pekerti yang luhur dan berkepribadian Indonesia. Berkeseimbangan dalam arti menuju keseimbangan antara individu dan masyarakat,

11. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar... op.cit. h.90

antara manusia dan Tuhannya, lahir dan batin. Ciri khas dari demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Segala kehidupan bernegara dipusatkan pada Pancasila.

Demokrasi Pancasila didasarkan atas jaminan rule of law. UUD 1945 telah mengatur mekanisme Demokrasi Pancasila berupa tujuh prinsip yang memperkuat ciri Demokrasi Pancasila.¹² Ketujuh prinsip itu adalah negara hukum, sistem konstitusional, kekuasaan tertinggi MPR, pemerintah yang bertanggung jawab, pemerintahan berdasarkan perwakilan, pemerintahan presidensiil, pengawasan parlemen.

Negara hukum, baik pembukaan, batang tubuh ataupun penjelasan UUD 1945 telah memuatnya. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat menyebutkan kata peri-keadilan istilah adil serta keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil. Istilah-istilah adil berindikasi pada negara hukum, karena kata itu merupakan tujuan hukum. Serta penegasan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Batang tubuh UUD 1945, di dalam pasal-pasalny telah menjamin prinsip equality before the law yang menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum sebagai sarana untuk melestarikan negara hukum.

Sistem konstitusional, penjelasan UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintahan berdasarkan atas sistem

12. Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila (Jakarta: Aksara Baru, 1984), h.84

konstitusionil tidak bersifat absolutisme. Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dibatasi hak dan wewenangnya oleh UUD. Dengan demikian absolutisme dapat dihindarkan.

Kekuasaan tertinggi MPR, dalam penjelasan UUD 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR diibaratkan sebagai Rakyat Indonesia. Karena itu MPR merupakan satu-satunya lembaga tertinggi dalam demokrasi Pancasila.

Pemerintah yang bertanggung jawab, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara. Karena itu kekuasaan dan tanggung jawab menjalankan pemerintahan negara ada di tangan presiden. Pertanggungjawaban presiden kepada MPR yang merupakan penjelmaan rakyat ini menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab. Pelaksana pemerintahan telah bertanggungjawab kepada orang (lembaga) yang memberi tugas.

Pemerintahan berdasarkan perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk untuk melaksanakan ajaran kedaulatan rakyat. Presiden dan DPR bekerja sama membentuk UU dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Permusyawaratan dilaksanakan dimana warga negaranya melaksanakan hak yang sama, tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih mereka dan bertanggung jawab pada mereka melalui proses pemilihan-pemilihan yang bebas, inilah suatu pemerintahan yang berdasarkan perwakilan.

Pemerintahan presidensiil, kekuasaan dan tanggung jawab dilakukan oleh presiden. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengawasan parlemen, selain mempunyai kekuasaan untuk ikut serta dalam membuat undang-undang dan ikut menetapkan anggaran belanja dan pendapatan negara maka DPR juga mempunyai hak kontrol terhadap pemerintah. Hal itu meliputi control of executive, control of expenditure, control of taxation.

Khusus kurun waktu 1959 sampai dengan 1965 yang menganut sistem demokrasi terpimpin yang sebenarnya adalah demokrasi Pancasila yang mengalami penyimpangan. Pengertian demokrasi terpimpin adalah demokrasi dengan pimpinan untuk menghindari anarkhi, dan merajalelanya kesewenangan kekuasaan politik di Indonesia. Demokrasi terpimpin juga mengandung pengertian sebagai suatu sistem politik yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia sendiri yang akan mencerminkan tumbuhnya kesepakatan persatuan nasional yang dituntun oleh satu pimpinan. Ruang lingkup demokrasi terpimpin ini di segala bidang, baik kenegaraan ataupun kemasyarakatan.¹³

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin sendiri adalah tidak dijalankannya mekanisme demokrasi Pancasila sepenuhnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sebenar-

13. Soediman Kartohadiprodo, Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), h.256

nya berkedudukan tertinggi hanya menjadi bawahan presiden. Demikian pula dalam hal pengawasan parlemen tidak dapat dijalankan secara penuh. Yang diutamakan pada masa ini lebih pada pemerintahan. Untuk itulah masa demokrasi terpimpin ini mempunyai corak khas dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila.

2. Pengertian Politik Luar Negeri

Dalam melakukan hubungan dengan bangsa-bangsa lain untuk memenuhi kebutuhan nasional, suatu negara mempunyai pola-pola hubungan tertentu yang membentuk perilaku pergaulan, yang mana pola-pola pergaulan itu dikenal dengan nama politik luar negeri. Politik luar negeri ini dipakai oleh suatu negara dengan kekuasaan dan kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri masing-masing negara berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda dari tiap-tiap negara. Ada yang melaksanakan balance of power, ada pula yang menggantungkan politik luar negerinya pada jaminan negara lain yang lebih besar, ada pula yang melaksanakan politik luar negeri pintu tertutup, serta ada pula politik bebas aktif seperti yang dipakai Indonesia.

Politik bebas aktif yang dipakai Indonesia mempunyai pengertian singkat mencakup pengertian bebas dan pengertian aktif. Bebas maksudnya dalam melaksanakan politiknya terhadap perdamaian dunia dan ditujukan untuk

memperkuat dan membela perdamaian. Terhadap dua blok, berbeda atau bertentangan tidak memihak dan mengambil jalan sendiri dalam menghadapi masalah internasional. Atau dengan kata lain Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana yang dicerminkan dalam Pancasila.¹⁴

Aktif maksudnya Republik Indonesia berusaha dengan sekuat tenaga untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan sesuai dengan cita-cita PBB. Dengan rumusan lain dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersikap aktif.¹⁵

Politik luar negeri yang dikenal lainnya adalah politik air hangat. Politik ini dipakai oleh Rusia. Tujuan politik ini adalah mencari pelabuhan-pelabuhan bebas es pada musim dingin. Karena hampir semua pelabuhan yang dimiliki Rusia menjadi beku pada musim dingin. Selain itu ada tujuan lain yang hendak dicapai yakni menyebarkan ideologi komunis ke seluruh dunia dalam rangka mewujudkan komunisme dunia.

14. Mochtar Kusumaatmadja, Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini (Bandung : Penerbit Alumni, 1983), h.7

15. Ibid

3. Politik Luar Negeri dan Politik Dalam Negeri

Sejak suatu negara berdiri, otomatis memerlukan hubungan dengan negara lain. Karena bagaimanapun majunya suatu negara pastilah masih membutuhkan negara lain, misalnya untuk melemparkan hasil produksinya, ataupun untuk mendapatkan bahan-bahan yang dipakai dalam produksinya. Dengan demikian suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa negara lain, baik untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk hidup bertetangga.

Dalam berhubungan, suatu negara melaksanakan pola-pola kebijaksanaan baik untuk keluar ataupun ke dalam. Politik luar negeri suatu negara senantiasa diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya. Keadaan dalam negeri suatu negarapun ikut mempengaruhi pencetusan kebijaksanaan luar negeri. Sebagai contoh masa revolusi fisik, Indonesia saat itu harus menghadapi Belanda yang ingin kembali untuk menjajah. Di dalam negeri dilakukan revolusi fisik sedangkan di luar diplomasi senantiasa dilancarkan untuk mendapat mendapatkan dukungan-dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Tepat bila dilihat dari contoh diatas, politik luar negeri yang dipakai untuk mencapai tujuan nasional diupayakan dengan segala kemampuan dan kekuasaan yang ada. Dan tepat pula bila kaitan antara politik luar negeri dengan politik dalam negeri sangat erat, karena politik luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari politik dalam negeri.

E. Metode Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan yang ada penulis sebagai seorang calon sejarawan menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Louis Gottschlak. Metode itu pada pokoknya mencakup empat tahap yakni pemilihan subyek yang akan diteliti, pengumpulan sumber-sumber informasi, yang mungkin diperlukan untuk subyek, pengujian sumber untuk mengetahui sejati tidaknya, serta pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya dari sumber sejati (primer).¹⁶ Karena penulis lebih banyak menggunakan sumber berupa pustaka atau yang dikenal dengan studi pustaka maka metode lain yang dipergunakan adalah metode hermeuneutik.

Pemilihan metode ini dikarenakan penulis tidak hidup sejaman dengan pelaku sejarah. Dan itu menyebabkan ada sisi-sisi gelap yang penulis dapati, dengan hermeuneutik ini diharapkan sisi gelap tersebut menjadi lebih terang. pengertian yang dimaksud adalah dengan memindahkan, menafsirkan ataupun menterjemahkan sesuatu yang belum diketahui itu dalam bahasa yang telah dimengerti. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman makna yang sama antara penulis dengan pembaca walau tidak lagi hidup sejaman.

Yang perlu diingat karena Sejarah tidak dapat lepas dari ilmu-ilmu lain, tepat pula bila pendapat Sartono mengenai pendekatan untuk sejarah dipergunakan pula. Pendekatan itu adalah pendekatan multidimensional. Ter-

16. Louis Gottschlak, Mengerti Sejarah (Jakarta : Penerbit UI, h.27 at.all.

lebih masalah yang akan diutarakan (diteliti) mengenai sejarah politik, maka sangat perlu bila memakai pendekatan multidimensional. Pengertian politik adalah pola distribusi kekuasaan dalam masyarakat yang ada korelasi dengan struktur sosial serta jaringan hubungan sosial dalam masyarakat. Jadi nampak bila ada pengaruh sistem nilai-nilai dari pola kebudayaan yang dipakai di dalam masyarakat. Karena banyaknya sistem-sistem yang dipakai dan berpengaruh baik juga bila pendekatan sistem multidimensional dipakai sebagai alat agar lebih mempertajam analisis dari masalah-masalah yang diuraikan.

Dengan gabungan metode penelitian yang dipakai diharapkan dapat menghasilkan jawaban untuk menguraikan masalah-masalah yang dirumuskan. Dengan gabungan ketiga metode itu diharapkan dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF DALAM KONSEP

Politik luar negeri bebas aktif terbentuk melalui proses cukup panjang. Banyak faktor yang datang dari luar ataupun dari dalam ikut mempengaruhi terbentuknya politik luar negeri bebas aktif ini. Faktor tersebut adalah situasi dunia saat Indonesia lahir, posisi strategis yang dimiliki oleh Indonesia, serta sikap pemerintah Indonesia sendiri dalam menentukan untuk memilih politik luar negeri bebas aktif sebagaimana tercantum dalam pidato Mohammad Hatta di depan sidang BPKNIP tanggal 2 September 1948.¹⁷ UUD 1945 juga telah menyiratkan sifat politik luar negeri bebas aktif, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan dan pola-pola politik luar negeri bebas aktif, ini pada pokoknya tetap terlaksana selama berdirinya RI, sampai nanti kurun waktu 1959-1965 mengalami penyelewengan dalam pelaksanaannya. Tetapi sebelum dilanjutkan, terlebih dulu akan dikupas mengenai pengertian politik luar negeri bebas aktif itu atau mengenai konsep politik luar negeri bebas aktif.

A. Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Konsep politik luar negeri bebas aktif secara tidak langsung juga telah diatur dalam UUD 1945, khususnya pada

17. Wangsa Wijaya dan Mutia F.S. ed., Mohammad Hatta Kumpulan Pidato (Jakarta : Yayasan Idayu, 1981), h.201

pembukaan. Alinea ke-1 pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa, kemerdekaan adalah hak segala bangsa karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Demikian juga alinea keempat menyebutkan ingin melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.... Dengan demikian tepatlah bila Republik Indonesia memilih politik luar negeri bebas aktif sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Indonesia dan merupakan salah satu tujuan nasional. Politik luar negeri bebas aktif sendiri mencakup pengertian politik luar negeri bebas dan politik luar negeri aktif.

1. Politik Luar Negeri Bebas

Politik luar negeri yang bebas telah banyak dirumuskan oleh banyak tokoh dan ilmuwan. Seperti misalnya Mohammad Hatta yang menyatakan bahwa politik luar negeri yang bersifat bebas adalah politik mengenai sikapnya (Indonesia) dalam perdamaian dan ditujukan untuk memperluas dan membela perdamaian. Terhadap kedua blok yang bertentangan ia tidak memilih pihak. Ia mengambil jalan sendiri dalam menghadapi perbagai masalah internasional.¹⁸ Sikap itu membawa keberuntungan bagi

18. Mohammad Hatta, Dasar Politik Luar Negeri Indonesia (Jakarta: Tintamas, 1953), h.14 Bisa dilihat M. Sabir dalam Bukunya Politik Bebas Aktif

Indonesia dalam menjalin hubungan dalam masyarakat internasional. Indonesia juga tidak bersedia untuk ikut serta dalam blok ketiga yang bermaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa itu. Sikap tidak memilih antara kedua pihak yang saling bertentangan juga tidak ikut dalam blok ketiga yang hanya akan menimbulkan kecurigaan dan menjurus ke pertentangan, akan menyebabkan Indonesia lebih luwes bergerak diantara dua blok itu. Dan pasti Indonesia tidak terikat dengan satu blok dalam melaksanakan kebijaksanaannya guna mencapai tujuan nasional.

Tokoh lain yang merumuskan konsep politik luar negeri menyatakan bahwa, politik luar negeri, seperti Mohammad Hatta yang bebas tidak terikat oleh ideologi atau oleh politik negara asing atau blok-blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power).¹⁹

Sumpeno Prawirosaputro mengutarakan dengan jelas mengenai pengertian politik luar negeri bebas, bahwa kata bebas dalam politik luar negeri bebas aktif adalah tidak memihak dalam pertentangan Barat dan Timur. Kalaupun kita mengambil sikap yang kebetulan sejalan dengan pendirian salah satu blok maka hal itu disebabkan karena sikap yang kita ambil atas dasar kepentingan nasional untuk waktu

19. A.W. Widjaja, Indonesia Asia Afrika Non Blok Politik Bebas Aktif (Jakarta : Bina Aksara, 1986), h.14



dan dalam keadaan tertentu.²⁰

Rumusan lain mengenai sifat bebas dalam politik luar negeri bebas aktif adalah politik bebas membawakan falsafah, konsepsi dan kepribadian nasional sendiri di dalam kehidupan antara bangsa-bangsa di dunia internasional.²¹ Rumusan-rumusan mengenai pengertian kata bebas dalam politik luar negeri bebas aktif dapat dirangkum menjadi satu pengertian yakni tidak memihak terhadap kedua blok yang saling bertentangan. Bahkan tidak memihaknya Indonesia pada salah satu blok sangat menguntungkan Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Setelah mengupas dan mengkaji rumusan pengertian kata bebas, maka yang akan dikaji berikutnya adalah pengertian kata aktif.

2. Politik Luar Negeri Aktif

Pengertian kata aktif dalam Politik Luar Negeri Bebas-aktif juga telah banyak dirumuskan oleh banyak tokoh dan ilmuwan. Mohammad Hatta peletak dasar politik luar negeri bebas aktif menyatakan bahwa pengertian kata aktif merupakan upaya Republik Indonesia sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan

20. Sumpena Prawirasaputra, Politik Luar Negeri Republik Indonesia (Bandung : Penerbit Remaja Karya CV, 1984), h.34

21. Dudy Singadilaga, Politik Luar Negeri Indonesia (Bandung : Penerbit Alumni, 1973), h.9

sesuai dengan cita-cita PBB.²²

Pendapat serupa juga dirumuskan oleh Sumpeno yang menyatakan bahwa pengertian kata aktif dalam politik luar negeri bebas aktif adalah secara aktif menghapuskan atau ikut menghapuskan penjajahan, aktif memperjuangkan perdamaian, dan aktif memperjuangkan keadilan dalam susunan internasional. Kita wajib bertindak sebagai subyek pelaku di dalam kehidupan internasional dan tidak menjadi obyek atau bulan-bulanan atau sasaran negara-negara lain.²³ Dengan catatan dalam menjadi subyek dalam peri hubungan internasional tidak boleh lepas dari tujuan nasional yang hendak dicapai.

Seperti halnya Hatta dan Sumpeno yang telah merumuskan mengenai pengertian kata aktif, Dudy juga merumuskan pengertian kata aktif yang kurang lebih sama. Kata aktif mengandung pengertian bahwa pengertian aktif bukan sekedar aktif melainkan suatu kegiatan terarah untuk ikut serta dengan kegiatan-kegiatan internasional yang menuju kepada terbentuknya ketertiban dunia baru a new order of the world yang mempunyai tiga unsur dasar ialah kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.²⁴ Keaktifan dalam kegiatan-kegiatan internasional itu diwujudkannyatakan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai

22. Mohammad Hatta, op.cit., h.14

23. Sumpena Prawirasaputra, op.cit., h.35

24. Dudy Singadilaga, op.cit., h.21

tujuan nasional. Politik luar negeri itu dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional

Kedua pengertian bebas dan aktif itu saling kait mengkait. Sifat bebas diperlukan untuk menunjang sifat aktif. Bila sifat bebas tidak dapat dipegang maka keaktifan Indonesia tidak luwes. Tidak luwesnya disebabkan semua kebijaksanaan Indonesia harus mengekor pada negara yang mempengaruhinya, dan tujuan nasional yang hendak dicapai menjadi terhambat. Demikian pula sebaliknya bila Indonesia bebas tetapi tidak aktif maka Indonesia juga hanya menjadi penonton yang tidak mampu memerankan perannya dan ikut terombang-ambingkan situasi dunia. Untuk itu politik luar negeri bebas aktif ditujukan sepenuhnya sebagai alat untuk memenuhi tujuan nasional. Kesadaran sebagai satu bangsa yang bebas menyadarkan pula kewajiban dan misi yang harus diemban. Misi itu adalah untuk ikut serta melaksanakan terbentuknya dunia baru yang bersih dari imperialisme yang diwujudkan dalam tiga unsur dasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan tiga unsur dasar itu hanya dapat dicapai lewat politik luar negeri yang bebas aktif. Samakah pengertian pengertian bebas dalam politik luar negeri bebas aktif dengan politik netral ?

3. Politik Bebas Bukan Politik Netral

Politik bebas yang dianut Indonesia dalam mencapai tujuan nasional itu bukanlah politik netral. Kedua

pengertian itu mempunyai perbedaan. Pengertian netral dalam hubungan internasional biasanya diterapkan dalam situasi perang, dimana negara tidak turut serta berperang atau tidak membantu salah satu pihak yang sedang berperang.²⁵ Pendapat Jessup yang dikutip Hatta menyatakan bahwa neutrality adalah sikap tidak berat sebelah dari suatu negara terhadap dua negara atau lebih yang berperang. Dan ditegaskan lebih lanjut bahwa dalam hubungan solidaritet dunia sekarang atau di masa yang akan datang neutralitet itu adalah suatu sikap anti sosial.²⁶

Politik luar negeri RI sejak semula tidak hendak mengikatkan diri pada salah satu blok dan kemudian merupakan salah satu aspek yang dikenal sebagai politik non-alignment, adalah politik yang ditujukan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²⁷ Politik luar negeri Republik Indonesia dapat mengambil jalan sendiri serta inisiatif dalam menghadapi berbagai masalah internasional. Situasi dimana Indonesia berkembang juga berbeda, dimana tidak ada lagi peperangan yang terjadi, sehingga Indonesia dapat mengembangkan dan melaksanakan politik luar negerinya sesuai dengan kepentingannya. Dari kedua pengertian diatas nampak perbedaan yang nyata

25. Ibid., h.20

26. Mohammad Hatta, op.cit., h.12

27. Ibid

antara politik bebas dan netral.

B. Landasan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Setelah mengetahui pengertian kata bebas dan aktif selanjutnya akan dikaji mengenai landasan yang dipakai oleh politik luar negeri bebas aktif. Politik bebas aktif tidak dapat dilaksanakan tanpa landasan yang kuat. Landasan itu meliputi landasan ideal, landasan struktural serta landasan operasional.

1. Landasan Ideal

Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan butir-butir dari pandangan hidup bangsa Indonesia telah merumuskan sikap serta pandangan bangsa Indonesia. Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menunjukkan pada persepsi bangsa Indonesia bahwa setiap manusia tanpa memandang asal-usulnya adalah ciptaan dan hamba Tuhan yang mempunyai martabat yang sama. Salah satu konsekuensi logis dari pernyataan di atas bangsa Indonesia tidak menganut paham rasialisme. Untuk itu dalam mengembangkan hubungan di dalam masyarakat internasional, harus pula dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, agar terwujud kerukunan hidup antar agama dan antar umat beragama.

Kedua, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila ini juga menunjukkan persepsi bangsa Indonesia yang

menolak penindasan manusia atas manusia, dan penghisapan suatu bangsa oleh bangsa lain. Oleh karena itu Indonesia selalu aktif menentang imperialisme, kolonialisme seperti tercermin dalam pembukaan UUD 1945 khususnya alinea pertama dan keempat.

Ketiga, Sila Persatuan Indonesia. Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi ataupun golongan. Implementasinya ke luar negeri Indonesia menganggap bahwa setiap negara merupakan satu unit tersendiri serta mandiri. Negara itu tidak boleh merupakan sub-unit dari satu negara lain. Dengan demikian Indonesia tidak mengenal dan menolak terwujudnya 'negara dunia' yang mendudukan negara sebagai sub-unit.

Keempat, Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini mengakui persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara Indonesia. Sila ini juga mengakui bahwa karena persamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara itu maka tidak dibenarkan memaksakan kehendak pada orang lain. Untuk itu bila diambil suatu keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak, keputusan itu diusahakan secara mufakat. Untuk penerapan keluar Indonesia selalu berusaha agar masalah-masalah internasional dapat diselesaikan melalui jalan damai yakni lewat musyawarah dan mufakat. Atau dengan kata lain, Indonesia mengupayakan adanya keselarasan, keseimbangan dan keserasian

antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional

Kelima, Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Manusia Indonesia menyadari sepenuhnya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sikap itu pula yang mendasari dan memacu bangsa Indonesia untuk selalu menolong bangsa lain yang membutuhkannya. Sikap itu juga melandasi masuknya Indonesia dalam kegiatan dan organisasi internasional yang bertujuan untuk mencapai dunia yang damai, seperti PBB.

2. Landasan Struktural

Landasan struktural politik luar negeri Indonesia adalah UUD 1945, baik itu pembukaan ataupun batang tubuh. Dalam pembukaan UUD 1945 ada dua alinea yang menjadi landasan bagi politik luar negeri bebas aktif yakni alinea pertama yang berbunyi :

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan."

serta alinea keempat yang berbunyi :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"

Dari alinea yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Republik Indonesia wajib membantu bangsa-bangsa lain di dunia ini, terutama yang masih dijajah. Bantuan itu sebagai upaya untuk melenyapkan penjajahan dan imperialisme oleh bangsa-bangsa dalam segala bentuk. Sehingga dapat tercipta suatu masyarakat dunia yang tertib dan aman.

Selain pembukaan UUD 1945 ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan politik luar negeri juga terdapat dalam batang tubuh yakni pasal 11 yang berbunyi, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Serta pasal 13 yang menyatakan Presiden mengangkat duta dan konsul, serta presiden menerima duta negara lain. Maksud duta adalah wakil negara asing yang pada umumnya bergelar duta besar. Sedangkan yang dimaksud dengan konsul adalah konsul jenderal atau konsul yang menjabat kepala perwakilan konsuler.

3. Landasan Operasional

Ada tiga hal yang menjadi landasan operasional dari politik luar negeri bebas aktif yakni, Ketetapan MPR, kebijaksanaan yang dibuat oleh Presiden (KEPRES), serta kebijaksanaan/peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri. Pertama Ketetapan MPR, dalam hal ini GBHN. GBHN khususnya bidang hubungan luar negeri yang setiap kurun waktu lima tahun selalu diperbaharui, pada pokoknya

menyatakan bahwa Republik Indonesia terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikan kepada kepentingan nasional khususnya pembangunan ekonomi akan senantiasa mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara sehingga memungkinkan negara-negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri melalui pengembangan ketahanan nasional masing-masing...; mengembangkan kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan peranannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional.²⁸

Kedua, kebijaksanaan yang dibuat pemerintah atau Presiden (Kepres). Sebagai seorang mandataris MPR, dalam melaksanakan tugas pemerintahan presiden dibantu oleh menteri-menteri. Bila dalam GBHN telah dijabarkan garis besar politik luar negeri, kemudian untuk pelaksanaannya presiden menjabarkan dalam bentuk Kepres seperti contohnya petunjuk pelaksanaan yang merupakan usaha-usaha yang harus dilakukan antara lain memperkuat dan mempererat kerjasama antara negara-negara dalam lingkungan ASEAN; Memperkuat persahabatan dan memberi isi yang lebih nyata terhadap hubungan bertetangga baik dengan tetangga-tetangga Indonesia; Mengembangkan setiap unsur dan

28. Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993

kesempatan untuk memperkokoh perdamaian dan stabilitas wilayah di Asia Tenggara; Membina persahabatan dengan negara-negara di dunia pada umumnya serta mengusahakan peranan yang lebih aktif dalam memecahkan masalah-masalah dunia di lapangan ekonomi dan politik, untuk memperkuat kerjasama antara bangsa-bangsa dan perdamaian dunia; Bersama-sama negara-negara berkembang lainnya memperjuangkan kepentingan bersama untuk pembangunan ekonomi.²⁹

Ketiga, kebijaksanaan/peraturan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri. Dalam hal yang khas merupakan tugasnya menteri luar negeri menetapkan kebijaksanaan atas dasar petunjuk/kebijaksanaan presiden.

Ketiga landasan itulah yang dipakai sebagai dasar politik luar negeri Indonesia. Bagaimanapun juga politik luar negeri Indonesia tidak dapat bergerak begitu saja tanpa landasan dan dasar yang kuat untuk mencapai tujuan. Lalu tujuan manakah yang hendak dicapai dengan politik luar negeri Indonesia itu ?

C. Tujuan dan Sasaran Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Tujuan yang hendak dicapai politik luar negeri bebas aktif telah terumus dalam pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat, yakniikut melaksanakan ketertiban dunia yang ber-dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...." Tujuan yang terumus itu merupakan

²⁹. Suli Soeleman, Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia (Jakarta: Deplu RI, 1973), h.3

tujuan jangka panjang. Sedangkan tujuan jangka pendek tergantung apa yang ditetapkan untuk dicapai dalam waktu singkat.

Mengenai tujuan yang hendak dicapai ini, sebagai contoh Mohammad Hatta merumuskan bahwa politik luar negeri Republik Indonesia bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan, memperoleh dari luar negeri barang-barang yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu sampai sekarang belum dapat dikembangkan sendiri..., perdamaian internasional, karena hanya dalam damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyatnya, persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan dari cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila yang menjadi dasar filsafat kita.³⁰

Khusus untuk kurun waktu demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965 presiden Soekarno telah merumuskan tiga kerangka tujuan yang akan dicapai. Rumusan itu terdapat dalam pidato kenegaraannya yang diucapkan tanggal 17 Agustus 1959. Rumusan itu berbunyi pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan..., pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur..., pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di

30. Mohammad Hatta, *op.cit.*, h.6

dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju pada perdamaian dunia yang sempurna.³¹ Yang menarik dari kurun waktu ini, presiden Soekarno dalam mewujudkan kerangka yang ketiga begitu bersemangat bahkan paling diutamakan, sehingga mengesampingkan kerangka pertama dan kedua.

Setelah mengetahui secara ringkas mengenai konsep Politik Luar Negeri Bebas-Aktif yang meliputi Pengertian Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, Landasan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, serta Tujuan dan Sasaran Politik Luar Negeri Bebas Aktif akan dikaji Praktek Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Tetapi akan diuraikan terlebih dahulu situasi dalam negeri yang turut membentuk kerangka pelaksanaannya. Apakah Politik Bebas Aktif dilaksanakan sesuai dengan konsep ataukah menyeleweng ?

31. --, Dari Proklamsi Sampai Gesuri (--: Yayasan Prapantja,--) h.427

BAB III

SITUASI DALAM NEGERI INDONESIA

PASCA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Bab ini membicarakan mengenai situasi dalam negeri Indonesia pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mengingat adanya kaitan antara politik luar negeri dan politik dalam negeri suatu negara. Untuk itulah perlu dibicarakan situasi politik Indonesia. Di dalam bab ini akan dibicarakan mengenai alat-alat kenegaraan yang dipakai, perencanaan GBHN oleh Presiden Sukarno, Situasi ekonomi yang memprihatinkan, serta piramida kekuasaan yang berhasil diwujudkan oleh Presiden Sukarno.

A. Alat-alat Kenegaraan

Kemunculan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa angin perubahan ketatanegaraan di Indonesia, setelah beberapa waktu negara dalam keadaan bahaya karena kegagalan Dewan Konstituante merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Di dalam dewan tersebut partai-partai, seperti Masyumi dan partai Islam kecil lainnya saling bertentangan mempertahankan pendapat dan kepentingan masing-masing, sehingga menimbulkan kemacetan persidangan. Keadaan negara yang membahayakan itu diselamatkan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berisi pembubaran Dewan Konsituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berla-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kunya UUD 1950, serta pembentukan MPRS dan DPAS.³²

Tindakan tepat Presiden Sukarno itu didasarkan pada staatsnoodrecht, hukum keselamatan negara dalam keadaan bahaya luar biasa.³³ Tindakan Presiden Sukarno itu mendapat dukungan dari militer khususnya Angkatan Darat. Hal itu terbukti ketika Letnan Jenderal A.H. Nasution memerintahkan secara langsung agar angkatan bersenjata menaati Dekrit Presiden.³⁴

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga berarti memberi kekuasaan kepada Presiden Sukarno untuk langsung memerintah. Ia bukan saja sebagai kepala negara akan tetapi juga sebagai kepala pemerintahan, seperti telah diatur dalam UUD 1945.³⁵ Dengan kata lain, kekuasaan Presiden Sukarno dipulihkan, lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai berlakunya kembali UUD 1945.

Menurut UUD 1945 Presiden Sukarno harus segera melengkapi badan-badan seperti DPA, MPR yang belum terbentuk. Mula-mula Presiden Sukarno membentuk pemerintahan karena PM Juanda telah mengembalikan mandatnya pada tanggal 6 Juli. Presiden Sukarno tetap menunjuk Juanda

32. Anak Agung Gde Agung, Twentieth Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965.

33. John D. Legge, Sukarno Sebuah Biografi Politik (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985), h. 350

34. Hall Kosud, ed., Indonesia: The Sukarno Years (New York : Interim History, 1967), h.

35. Dalam UUD 1945, khususnya pasal 4 sampai dengan 15 memuat mengenai hak-hak dan kewajiban presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dalam Kabinet Kerja. Kedudukan yang diberikan kepada Juanda adalah Menteri Pertama, karena sejak Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden, jabatan itu kosong. Presiden Sukarno mengadakan jabatan Menteri Pertama sebagai jabatan langsung di bawah Presiden.³⁶ Dengan demikian Kabinet yang dikenal sebagai Kabinet Kerja ini dipimpin oleh Juanda di bawah Presiden Sukarno.

Kabinet Kerja ini mempunyai program sebagai berikut:

- a. Melengkapi sandang pangan rakyat.
- b. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara.
- c. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat).³⁷

Kabinet kerja ini tersusun dalam dua tingkat, selain Sukarno dan Juanda, ada sembilan menteri dan 24 menteri muda.³⁸ Para menteri pemegang departemen utama seperti kementerian keamanan dan pertahanan, keuangan, luar negeri, dalam negeri mengkoordinasi menteri-menteri muda seperti penerangan, urusan veteran, pertanian, pekerjaan umum, transmigrasi, perhubungan dan kesehatan. Sedang ketiga kepala staf, kepala kepolisian, serta Jaksa Agung diangkat menjadi menteri *exofficio*. Kabinet ini diambil sumpahnya oleh Presiden Sukarno tanggal 10 Juli.

Setelah Kabinet Kerja ini tersusun, maka Presiden

36. HalKosud *op.cit.*, h. 115

37. *Ibid.*

38. John D. Legge. *op.cit.*, h. 358

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sukarno segera melengkapi alat-alat kenegaraan. Dewan Pertimbangan Agung segera dibentuk. Lembaga tinggi negara ini terdiri dari 43 anggota yang pengangkatannya berdasarkan ketiga golongan ditambah Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketua dan Sukarno sebagai ketua³⁹, 43 anggota itu terdiri dari 12 anggota wakil kesepuluh partai penting, 8 anggota wakil daerah dan 23 anggota diberikan kepada wakil golongan kekaryaan. Presiden Sukarno juga segera membentuk Dewan Perancang Nasional diketuai oleh Mohammad Yamin.

DPRS hasil pemilu masih tetap dipertahankan. Akan tetapi adanya perselisihan paham mengenai anggaran belanja negara antara Presiden dan DPRS menyebabkan lembaga ini dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk DPRGR lewat pengangkatan. DPRGR ini akan bertugas sampai pemilihan umum mendatang, berdasarkan UU Pemilihan Umum yang baru.

Pembagian kursi dalam DPRGR ini berdasarkan partai penting dan golongan kekaryaan. 130 orang wakil diangkat dari partai-partai penting yakni 44 wakil dari PNI, 36 wakil dari NU, dan 30 wakil dari PKI. Selebihnya 153 kursi diberikan kepada golongan kekaryaan, 15 kursi untuk Angkatan Darat, masing-masing 7 kursi untuk Angkatan Laut dan Udara, 5 kursi untuk Kepolisian dan selebihnya untuk buruh, tani, tokoh-tokoh Islam, pemuda, wanita dan

39. Ibid. h. 359; periksa HalKosud h. 79

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Cendekiawan.⁴⁰ Pada akhirnya DPRGR ini bertugas selama dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin karena Presiden Sukarno belum sempat mengadakan pemilihan umum.

Sebagai kelengkapan tambahan dari lembaga-lembaga perwakilan, baik yang berdasarkan konstitusi atau panitia khusus dibentuk suatu badan baru, Front Nasional untuk menggantikan Front Pembebasan Irian Barat yang dikuasai tentara.⁴¹ Lembaga ini menghidupkan kembali gagasan Presiden Sukarno mengenai suatu organisasi yang dapat dikerahkan dan menyalurkan pendapat dan keinginan massa. Front Nasional ini dapat menjembatani secara langsung antara rakyat dan Sukarno serta memungkinkan untuk melampaui partai.

Setelah Kabinet Kerja mencapai usianya yang ketiga, Presiden Sukarno mengadakan perubahan dalam susunan dan tata cara kerja Pemerintah. Tujuan perubahan ini adalah mempertinggi efisiensi dalam pemerintahan negara dan daya tempur Kabinet Kerja.⁴² Untuk itulah pada tanggal 15 Januari 1962 dibentuk satu Panitia ad hoc yang terdiri enam orang menteri inti. Hasil kerja panitia itu adalah satu kabinet yang lebih sederhana daripada sebelum perubahan. Perbedaan pokoknya adalah bila sebelum perubahan Kabinet Kerja terdapat beberapa menteri inti yang tidak

40. Ibid., h. 360

41. Ibid.

42. Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif (Djakarta: CV. Karya Nilam, 1963), h. 170

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

termasuk suatu bidang, sedang sekarang semua menteri digolongkan dalam satu bidang.⁴³

Selain reorganisasi kabinet, Presiden Sukarno juga melaksanakan integrasi terhadap Lembaga-lembaga Kenegaraan Tinggi yang ada, menurut UUD 1945 ataupun peraturan negara lainnya, secara piramidal dengan presiden sebagai pucuknya. Integrasi itu diharapkan tercapai dengan mengikutsertakan pimpinan badan-badan yang dimaksud dalam musyawarah Kabinet Kerja. Kedudukan mereka tidak sebagai wakil dari badan-badan yang dipimpinnya melainkan untuk ikut dalam musyawarah para pembantu presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, dan untuk mengamankan policy pemerintah dalam badan yang dipimpin masing-masing.⁴⁴

Keikutsertaan pimpinan badan-badan itu dalam musyawarah Kabinet Kerja dengan memberikan kedudukan setingkat menteri kepada pimpinan badan-badan itu. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, dan Ketua Dewan Perancang Nasional diberikan kedudukan Wakil Menteri Pertama. Sedang Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diberikan kedudukan sebagai menteri. Tindakan Presiden Sukarno tersebut sudah merupakan satu penyimpangan konstitusional yang juga

43. Ibid. h. 171

44. Ibid.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berakibat penyimpangan kebijaksanaan luar negeri. Pemberian kedudukan Pimpinan badan-badan negara tidak sebagaimana mestinya bertentangan dengan UUD 1945, karena menurut UUD 1945 kedudukan mereka sejajar dengan Presiden tidak berada di bawah Presiden.⁴⁵

B. Perencanaan GBHN Oleh Presiden Sukarno

Setelah alat-alat kenegaraan terbentuk, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Presiden Sukarno adalah menentukan pola pembangunan. Untuk itu Presiden Sukarno yang pada masa Demokrasi Terpimpin ini getol dengan slogan-slogan dan akronim berupaya untuk mengarahkan rakyatnya ke tugas nation building, membangun satu bangsa yang bersatu. Sebagai puncaknya adalah pidato kenegaraan yang diucapkan dalam rangka memperingat Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi kita. Pidato ini sangat berapi-api dan mengkritik pelaksanaan pemerintahan di masa lalu seperti pernyataannya sebagai berikut :

"... saya merasa bahwa revolusi kita ini pun menderita segala macam siksaan syaitan neraka, segala penderitaannya inferno, dan kemudian dengan kembali kita kepada UUD 1945, kini sedang mengalami pencucian, agar nantinya kita bisa memasuki surga. Kini kita sedang dalam purgatorio, sedang dalam dicuci dari segala kekotoran sedang dalam loutering proses dalam segala hal, agar nanti kita sudah tercuci, sudah "gelouted", kita dapat memasuki kebahagiaan paradisonya masyarakat adil dan makmur.

Syaitan liberalisme, syaitan federalisme, syaitan individualisme, syaitan kepetualangan,

45. Ibid.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

syaitan dualisme ... segala macam syaitan yang telah menerkam kita di dalam inferno itu dan sekarang kita sedang mengalami purgatorio di segala lapangan. Heriorientasi retooling ... itu semuanya adalah purgatorio yang perlu supaya kita bisa melanjutkan perjalanan kita di atas relnya revolusi, menuju kepada tujuan revolusi.⁴⁶

Dari pidato itu jelas bila Presiden Sukarno berupaya untuk mensahkan tindakannya mencetuskan ide Demokrasi Terpimpin.

Pidato Presiden Sukarno itu menjadi pedoman pelaksanaan program Kabinet Kerja. Pokok-pokok yang diuraikannya dalam pidato ini ditetapkan menjadi GBHN oleh MPRS. GBHN itu lebih dikenal sebagai manifesto politik yang berintikan USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, serta Kepribadian Indonesia).⁴⁷ Menurut Anak Agung Gde Agung Manifesto politik itu sangat diperlukan dalam pembentukan lima badan⁴⁸ yakni:

- a. The Supreme Advisory council, which shall be obliged to answer question sub-mitted by the president and shall have the right to make proposal to the government ...
- b. The National Planning Council, to design a blueprint for just and properous society and to make a bluprint af and Indonesian society in which there is social justice.
- c. Bapekan, body for controlling the activity of states apparatus, to control the activities of state's apparaturs both vertically and horizontally, in order to quarantee the maximum working

46. Departemen Penerangan RI, Dari Proklamasi Sampai Takari (Yayasan Prapantja), h. 415-416

47. G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 Jilid 2 (Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1988), h. 115

48. Anak Agung Gde Agung, op.cit., h. 273

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- efficiency.
- d. The Majelis Permusyawaratan Rakyat, which consist of member of Dewan Perwakilan Rakyat augmented with deputies from the regions and groups nominated by president.
 - e. The National Front, which is untended in order to have a means of stimulating the activities of society in democratic way, which in the first place is needed in the field of construction and development, proceeding toward the completion of revolution.

Pidato Presiden Sukarno itu juga merumuskan suatu kerangka tegas mengenai rintisan-rintisan sejak zaman kolonial hingga masa kemerdekaan yang dipakai dalam menjalankan tugas-tugas revolusi Indonesia selanjutnya. Kerangka itu terdiri dari tiga segi.⁴⁹ Pertama, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke. Kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia Afrika atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerja bersama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju pada perdamaian yang sempurna.

Lebih lanjut Presiden Sukarno menegaskan bahwa Republik Indonesia sedang berevolusi. Baik itu ke dalam

⁴⁹. Deppen RI, Dari op.cit., h. 421

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ataupun keluar. Revolusi ke dalam ditujukan kepada diri bangsa Indonesia sendiri, sedangkan keluar ditujukan untuk menentang imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Pandangan Sukarno mengenai revolusi ini akan menjiwai sikap dan kebijaksanaannya selama Demokrasi Terpimpin.

Menurut Presiden Sukarno, dalam berevolusi Indonesia mempunyai modal dasar yang bisa dipakai sebagai alat-alat perjuangan seperti yang diutarakannya: "Marilah kita mengadakan stok opname lebih dulu daripada modal Nasional kita pada waktu ini, yang dapat kita pakai sebagai bahan dan alat perjuangan. Apa yang kita miliki? Pertama, UUD 1945 dan jiwa revolusi 1945. Jiwa ini tidak lahir begitu saja dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tetapi harus kita pupuk terus dan kita gelorakan terus terutama sekali dengan intensifikasi jiwa berkorban, baik mental maupun materiil.

Kedua, hasil daripada segala pikiran dan keringat sejak tahun 1945 hingga sekarang yang merupakan yang berupa hasil-hasil materiil maupun yang berupa tenaga-tenaga baru, kader-kader baru dalam segala lapangan.

Ketiga, makin bertumbuhnya kekuatan ekonomi yang menjadi milik nasional atau di bawah pengawasan nasional, yang pada waktu ini sudah meliputi lebih kurang 70% daripada seluruh kekuatan yang ada di Indonesia.

Keempat, Angkatan Perang yang makin lama makin kuat, administrasi pemerintahan yang makin lama makin baik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kelima, wilayah kekuasaan Republik Indonesia yang kompak, unitaris dan amat luas dan yang letaknya amat strategis dalam politik, ekonomi dunia, serta jumlah rakyat yang kini sudah 88.000.000 tetapi terus bertambah pesat, sehingga dalam waktu singkat Indonesia akan mempunyai man power 100.000.000, 120.000.000, 150.000.000 orang.

Keenam, kepercayaan kepada kemampuan dan kedaulatan bangsa sendiri, yang sudah dibuktikan di zaman yang lampau juga dibandingkan dengan revolusi-revolusi bangsa lain yang sedang berjalan sekarang, juga dibandingkan dengan revolusi-revolusi di negeri-luaran yang sekarang sudah selesai.

Ketujuh, kekayaan alam, kekayaan di atas bumi dan kekayaan di dalam bumi, yang sungguh saya tidak omong kosong tidak ada tandingannya di seluruh dunia ini, tidak ada tandingannya di delapan penjuru angin.⁵⁰

Karena itu revolusi yang dilaksanakan di Indonesia akan berkesinambungan didukung alat-alat perjuangan milik bangsa sendiri. Presiden Sukarno memakai manifesto politik ini sebagai alat untuk menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Namun demikian kenyataannya apakah semuanya dapat berjalan lancar dengan dicanangkannya GBHN ? Bagaimana situasi ekonominya ?

50. Ibid., h. 404

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Situasi Ekonomi yang Memprihatinkan

Kesukaran ekonomi yang diakibatkan oleh kabinet yang silih-berganti masih terasa ketika UUD 1945 diberlakukan kembali. Sudah banyak upaya pemerintah yang dilakukan untuk memperbaiki dan menyetatkan perekonomian, yakni dengan melaksanakan ekonomi terpimpin, sesuai dengan manifesto politik yang telah digariskan. Tujuan Ekonomi Terpimpin adalah untuk mencapai kemakmuran yang sebesar mungkin bagi rakyat dengan tenaga produktif yang ada di dalam masyarakat.⁵¹

Dengan tetap memperhatikan pasal 33 UUD 1945 sebagai sendi utama bagi politik perekonomian, yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵² Sebagai acuan, pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi sebagai kitab suci. Dengan penekanan melaksanakan rencana pembangunan Indonesia harus berdikari.⁵³

Deklarasi ekonomi mencanangkan strategi dasar

51. Mohammad Hatta. Ekonomi Terpimpin (Jakarta : Penerbit Fasco, 1960), h. 49

52. G. Moedjanto, Demokrasi Terpimpin, SPPS (Yogyakarta : IKIP Sanata Dharma, 198), h. 15

53. UUD 1945; juga dapat diperiksa Mohammad Hatta, Ekonomi Terpimpin, h. 45

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ekonomi Indonesia yang terbagi dalam tahap-tahap⁵⁴ sebagai berikut : Tahap pertama, harus diciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokrasi yang bersih dari sisa-sisa feodalisme. Tahap kedua, tahap ekonomi sosialis Indonesia yakni ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, di mana tiap-tiap orang dalam masyarakat Indonesia dijamin akan pekerjaan, sandang pangan dan perumahan serta kehidupan kultural spiritual yang layak.

Menurut Dekon, Masyarakat Indonesia sekarang berada dalam tahap pertama di mana kewajiban utama bidang ekonomi adalah mengikis habis sisa-sisa imperialisme di bidang ekonomi, menggerakkan semua potensi nasional yang bebas dari imperialisme dan feodalisme sebagai landasan menuju masyarakat sosialis Indonesia. Karena kapitalis yang telah diwariskan oleh pemerintah kolonial telah merusak perekonomian Indonesia seperti yang telah digambarkan oleh J.H. Boeke bahwa "... asas-asas liberal yang menempatkan orang-seorang di muka sebagai sendi perusakan dari serangan kapitalisme telah merobohkan di Indonesia -lebih lagi di Eropa- sendi-sendi persekutuan hidup dan menghalau kaum lemah ... politik perekonomian yang membuka pintu Indonesia untuk kapitalisme yang keras hati, politik yang menghubungkan segala yang jauh dan merombak pagar persaingan, asas kemerdekaan berdagang

54. ---, Deklarasi Ekonomi Peraturan Pelaksanaan serta Penjelasannya (Bandung: Penerbit CV. "Dua R", 1963), h. 9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang membukakan pintu pada lawan bersaing dari luar, kemerdekaan pasar yang mempertajam persaingan perniagaan dalam negeri, aturan bayar pajak yang makin lama makin dilakukan dengan uang ... kemerdekaan yang ditimbulkan dengan tidak membangkitkan tenaga baru."⁵⁵ Untuk itu dengan membersihkan perekonomian Indonesia dari imperialisme dan feodalisme diharapkan akan dicapai kemakmuran. Benarkah demikian?

Deklarasi ekonomi dan pelaksanaan ekonomi terpimpin ternyata hanya sekedar impian belaka. Perekonomian tetap didominasi oleh orang-orang Cina perantauan. Situasi yang sebenarnya mau diubah dengan adanya Deklarasi Ekonomi itu ternyata sulit untuk diubah. Peningkatan dan stabilitas ekonomi yang diharapkan ternyata tidak tercapai. Kenyataan yang ada adalah inflasi tinggi, harga-harga kebutuhan pokok untuk sehari-hari semakin tinggi. Salah satu ciri dari masa ini adalah penindasan dan pengekanan kegiatan masyarakat perseorangan lebih banyak dilakukan dan lebih terang-terangan, tetapi pemerajaan dan tindakan kekerasan terhadap perseorangan jarang dilakukan⁵⁶ Misalnya dalam hal mengeluarkan kritikan terhadap pemerintah, kritikan hanya diterima bila kritikan itu digolongkan sebagai kritik membangun. Pembatasan pendapat itu berarti Presiden Sukarno tidak pernah secara wajar

55. Mohammad Hatta, Lampau dan Datang (Djakarta : Penerbt Djambatan, 1956), h. 5 sampai dengan 7

56. G. Moedjanto, SPPS, op.cit., h. 13



menerima social control, bahkan ada kecenderungan he can do no wrong.⁵⁷ Contoh lain, unsur terpimpin dari demokrasi terpimpin sangat kuat, sehingga penguasa pusat dengan ketat mengawasi lembaga-lembaga pemerintahan, pers serta partai-partai. Demikian pula dengan perekonomian, pusat sangat ketat mengawasi bidang ini, sehingga kerjasama untuk memperbaiki perekonomian antara pemerintah, swasta, dan koperasi yang direncanakan tidak dapat terlaksana, dan yang terjadi adalah yang bermodal kuat menguasai perekonomian di Indonesia.

Keadaan itu menyebabkan kebijaksanaan pemerintah yang tertuang dalam Deklarasi Ekonomi untuk menyusun antara lain PN, Dewan Perusahaan, koperasi⁵⁸ tak mungkin lagi, karena kenyataannya pemerintah berperan dalam ekonomi, baik secara langsung ataupun tidak langsung.⁵⁹ Koperasi yang seyogyanya akan dipakai sebagai soko guru perekonomian⁶⁰ dan dipakai untuk melestarikan tradisi gotong-royong masyarakat Indonesia harus 'dikebiri' karena semuanya telah diatur dari atas, dan pengaturan dari atas ini seolah bertendensi untuk memfeodalisasikan gerakan koperasi.⁶¹ Pernyataan Hatta mengenai koperasi

57. Ibid.

58. ..., Dekon ... op.cit., h. 11

59. Deliar Noer, Mohammad Hatta Biografi Politik (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 543

60. Pasal 33 UUD 1945

61. Deliar Noer, op.cit., h. 550

masa Demokrasi Terpimpin adalah sebagai berikut:

"Ekonomi Terpimpin Sukarno terhadap koperasi menjadi ekonomi diperintah. Jiwa demokrasi hendak dilenyapkan dari koperasi dan diganti dengan menunggu perintah. Sifat koperasi diganti dari organisasi selfhelp dan otoaktifita menjadi badan pembagian jatah pada rakyat. Ini dalam teori! Dalam praktek sedikit sekali barang yang dibagikan kepada rakyat ... pembagian jatah sebagai tugas koperasi adalah bujukan kepada rakyat untuk membangun badan koperasi sebanyak-banyaknya. Tiap-tiap orang digerakkan masuk koperasi pertukangan dan koperasi pertanian misalnya dimasuki orang yang bukan tukang dan bukan tani."⁶²

Kegagalan Ekonomi Terpimpin yang berintikan pada koperasi semakin memprihatinkan keadaan ekonomi Indonesia. Barang terbatas sedangkan harga barang tinggi, sementara pemerintah menghadapi masalah peredaran uang di masyarakat yang cukup banyak. Keadaan itu menyebabkan munculnya keputusan pada tanggal 25 Agustus 1959 untuk mengurangi nilai nominal rupiah menjadi 1/10-nya dengan maksud untuk mengurangi inflasi⁶³ Peraturan pengguntingan uang itu menimbulkan pro dan kontra. Harapannya untuk menaikkan nilai mata uang, kenyataan yang terjadi adalah mempertinggi inflasi, karena kebijaksanaan pengguntingan uang itu diikuti dengan pencetakan uang baru oleh pemerintah.

Menanggapi kebijaksanaan pemotongan uang itu Hatta dalam suratnya kepada Presiden Sukarno menyatakan :

"Dengan cara sewenang-wenang menurunkan nilai uang semacam itu tidak terutama terkena kaum saudagar besar dan spekulan, melainkan produsen dan konsumen

62. Ibid., h. 555-556

63. G. Moedjanto, SPPS , h. 14

Indonesia. Politik semacam itu rupanya diambil dengan tidak mempelajari sedalam-dalamnya struktur perekonomian Indonesia. Saudagar besar kapitalis dan spekulan pada galibnya uangnya sebagian besar terletak pada barang sebagian kecil berupa uang mati di rumah, sebagian deposito di bank. Tetapi sebagian terbesar mereka pergunakan untuk penumpukan barang dan membiayai perniagaan gelap. Pada akhirnya uang kontan ini yang terdiri atas uang kertas Rp 500,00 dan 1000 jatuh kepada produsen asli barang-barang pertanian, ternak dan kerajinan. Produsen-produsen asli ini tidak menyimpan uang di bank tetapi di rumah. Negeri kita bukanlah negeri seperti Inggris, Amerika, dll, di mana ada bank dan cabangnya sampai ke kota-kota kecil dan rakyat produsen yang terbanyak itu tidak biasa bekerja dengan bank karena nilai uang kita sudah merosot benar maka uang pecahan itu penuh di desa."⁶⁴

Lebih lanjut Hatta menyatakan bahwa :

"Lebih terkena lagi orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap saban bulan seperti pengarang buku, dan lain-lainnya. Ada yang menerima hasil bukunya setahun sekali dan biasanya dengan uang besar. Uang itu baginya untuk belanja hidup setahun disimpannya di rumah dengan maksud membelanjakan dari bulan ke bulan. Dan orang-orang ini sekonyong-konyong dipotong uang belanjanya. Ada yang kehilangan uang belanja 10 bulan, 8 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Dapat saudara pikirkan betapa pahit rasa hatinya ?"⁶⁵

Surat Hatta yang memuat mengenai contoh-contoh akibat pengguntingan uang hakekatnya mengingatkan pada Presiden Sukarno, bahwa tindakan penyelamatan yang dimaksudkan telah memakan korban yang salah, bukannya memperbaiki melainkan memperburuk. Rakyat kecil semakin tidak mampu membeli kebutuhannya karena harga barang yang semakin tinggi hanya orang-orang yang beruang cukup mampu

64. Mochtar Lubis, Hati Nurani Melawan Kezaliman (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1986), h. 54

65. Ibid., h. 55

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membeli. Di pihak lain, orang-orang Cina yang kebanyakan menjadi pedagang besar semakin kaya karena keuntungan yang berlipat sedangkan pedagang eceran tetap saja keadaannya.

Melihat keadaan itu Hatta meminta agar kebijaksanaan pengguntingan uang ini dicabut. Pengguntingan uang katanya tidak dapat dilakukan dengan defisit belanja pemerintah yang besar, yang diperkirakan lebih dari Rp 10 milyar.⁶⁶ Tindakan pemerintah mengeluarkan kebijakan pengguntingan uang itu akan sia-sia belaka karena pemerintah tetap mencetak uang baru bermilyar-milyar jumlahnya. Kenyataan itu hanya memperbesar inflasi dalam masyarakat. Untuk mengatasi inflasi pemerintah juga menaikkan tarif-tarif keperluan umum seperti air, listrik, dan transportasi menjadi berlipat ganda. Tetapi pejabat-pejabat yang sudah mendapat kemudahan-kemudahan banyak yang terlibat tindak korupsi. Masalah lama yang senantiasa menghantui pemerintah. Seolah-olah kebijakan pemerintah untuk mengurangi inflasi sia-sia, karena setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan berakibat yang lain. Keadaan ini memperkuat kerisauan ekonomi Indonesia.

Untuk mengelabui mata dunia mengenai keadaan ekonomi Indonesia yang sebenarnya, dan mempertebal kebanggaan nasional, maka pemerintah melaksanakan proyek-proyek besar seperti pembangunan Monumen Nasional,

⁶⁶. Deliar Noer, op.cit., h. 561

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sarinah, dan pada tahun 1962 menjadi tuan rumah Asian Games. Semua itu dimaksudkan untuk memperlihatkan pada dunia, bahwa Indonesia mampu seperti bangsa-bangsa lain. Terlebih lagi ketika Presiden Sukarno merencanakan menjadikan Indonesia menjadi pusat Nefos, maka pembangunan semakin gencar dilaksanakan untuk menjadikan Jakarta sebagai mercusuar bagi negara-negara yang bergabung dalam Nefos. Keadaan menjadi lebih buruk ketika bantuan dari Amerika Serikat dihentikan dan nasionalisasi perusahaan milik Inggris akibat konfrontasi yang dilancarkan Indonesia terhadap Malaysia. Biaya besar yang dibutuhkan untuk konfrontasi terhadap Malaysia, sehingga kesejahteraan rakyat sedikit terabaikan. Nasionalisasi perusahaan milik Inggris juga ikut memperburuk ekonomi karena perusahaan itu dikelola oleh orang-orang yang bukan ahli. Untuk itu Indonesia kemudian menengok kepada Cina agar memberikan bantuan finansial pada Indonesia karena saat itu hubungan Indonesia-Cina terlihat akrab. Pemerintah Cina dengan cepat menanggapi permintaan Indonesia dan memberikan bantuan pada Indonesia. Bantuan itu semakin membuat ketergantungan pada pemerintah Cina.

Anggaran belanja negara yang sebagian terbesar ditujukan untuk membiayai konfrontasi Malaysia, membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Semua perhatian ditujukan untuk kemenangan konfrontasi. Dengan demikian keadaan ekonomi Indonesia semakin kacau. Rakyat dilanda kekacauan. Situasi itu dipergunakan oleh kaum komunis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk mencengkeramkan pengaruhnya pada rakyat itu ditandai dengan pemberontakan tanggal 30 September 1965 walaupun mengalami kegagalan.

D. Piramida Kekuasaan di Indonesia

1. Kedudukan Partai-partai Sebelum Demokrasi Terpimpin

Setelah pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 3 Nopember yang ditandatangani oleh wakil presiden Hatta, mulailah babak baru perkembangan politik Indonesia. Isi pokok maklumat itu adalah anjuran pemerintah untuk membentuk partai-partai politik. Tujuannya agar demokratisasi menjadi berkembang. Partai-partai yang terbentuk setelah maklumat pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 itu antara lain Masyumi yang didirikan 7 Nopember 1945 setelah dirintis sebelumnya tanggal 21 Oktober, PNI yang didirikan pada 29 Januari 1946, serta banyak partai kecil lain yang berdiri. Munculnya partai-partai itu akhirnya mengubah sistim pemerintahan di Indonesia. Kabinet yang mula-mula bertanggungjawab kepada Presiden akhirnya menjadi kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Partai-partai itu membawa kepentingan kelompok masing-masing, sehingga wajarlah bila kadang-kadang terjadi benturan-benturan atau partai untuk mempertahankan pendiriannya.

Perkembangan politik masa demokrasi Parleментар dipengaruhi partai-partai yang ada. Kabinet silih berganti, sementara partai politik yang mengendalikan tampuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemerintahan hanya mementingkan partai mereka. Fungsi oposisi yang diharapkan sebagai korektor yang konstruktif terhadap pemerintah tidak berjalan dengan baik. Tindakan mereka bahkan menyerang pemerintah berdasarkan alasan yang kerap kali tidak wajar untuk memaksa pemerintah jatuh dan kemudian mengganti kedudukannya.⁶⁷ Situasi itu berulang kali terjadi, sehingga partai yang berkuasa lebih mementingkan cara mempertahankan kekuasaannya dari serangan oposisi daripada memikirkan kepentingan rakyat banyak.

Disamping catatan negatif dimasa itu dapat pula dicatat hal-hal positif. Hal-hal itu antara lain adanya kebebasan atas dasar pengakuan hak-hak sipil warga negara kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat cukup dijamin pelaksanaannya. Pengadilan juga benar-benar bebas dari campur tangan alat kekuasaan atau lembaga-lembaga negara yang lain di dalam tugasnya mempertahankan keadilan berdasarkan hukum.⁶⁸

Ketika tahun 1955 diadakan pemilihan umum diharapkan akan memperbaiki situasi, karena pemegang pemerintahan adalah partai-partai hasil pemilihan umum. Keempat partai pemenang pemilihan umum itu, yakni Masyumi yang mendapat 57 wakil, PNI juga memperoleh wakil yang sama, NU

67. G. Moedjanto, SPSS , h.2

68. Ibid., h.1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mendapat 45 wakil, serta PKI mendapat 39 wakil. Sedangkan yang ditunjuk sebagai formatur adalah Ali dari PNI, yang bekerja sama dengan Masyumi untuk menjalankan pemerintahan. Tetapi yang terjadi, kedua partai utama, PNI dan Masyumi tidak dapat bekerja sama dalam kabinet. Pandangan yang berbeda dari kedua partai dan persaingan intern dalam partai menjadi penyebab gagalnya kerjasama diantara mereka. PKI tidak masuk dalam kabinet karena memang untuk menghindari masuknya pengaruh komunis dalam pemerintahan. Akhirnya pada 14 Maret 1957 Ali menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Umum menyatakan bahwa sebelum tahun 1957 kepemimpinan yang parlementer (parliamentary leadership) masih benar-benar penting dan menentukan.⁶⁹ Artinya, partai-partai memegang peranan penting dalam sistem parlementer dan juga suara-suara mereka dihargai. Peranan PKI belum begitu nampak jelas di masa ini karena masih dihalang-halangi AD serta keadaan partai yang masih lemah dibandingkan partai-partai lain setelah peristiwa Madiun. Dalam perkembangan lebih lanjut, setelah tahun 1957 terjadi pergeseran, PKI mulai bangkit dan muncul dalam arena politik Indonesia. Peran Angkatan Darat juga mulai muncul dan masuk ke arena politik. Keadaan itu akhirnya membentuk suatu peta politik baru Indonesia dan diwarnai dengan persaingan-persaingan antara kedua kekuatan itu.

⁶⁹. Ibid., h.3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Kedudukan Partai-partai Politik Setelah Demokrasi Terpimpin dan Dominasi PKI Dalam Percaturan Politik di Indonesia

Pada bulan Pebruari 1957 Presiden Soekarno memperkenalkan konsepsi baru yang diharapkan mampu merubah situasi akibat dipakainya demokrasi parlementer di Indonesia. Konsepsi ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Ada yang menolak Kabinet Gotong Royong karena PKI masuk di dalamnya dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Tetapi presiden tetap dengan pendiriannya akan melaksanakan konsepsi itu. Pelaksanaan konsepsi itu menjadi jelas ketika Konstituante gagal melaksanakan tugasnya dan akhirnya memunculkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Konsepsi Presiden juga memeplihatkan perubahan pandangan Soekarno mengenai partai-partai politik. Perubahan pandangan itu juga nampak dalam pidatonya yang dikutip Legge, "kuburkan semua partai".⁷⁰ Pidato itu kemudian diulang dengan tegas dihadapan Persatuan Guru Republik Indonesia, "Saya tidak lagi cuma mimpi," katanya "Malah pembubaran parta-partai dengan tegas saya anjurkan."⁷¹ Perubahan-perubahan Presiden Soekarno mengenai kepartaian karena penyebab kekacauan negara yang menganut demokrasi parlementer adalah banayknya partai. Perubahan pandangan ini memunculkan perimbangan kekuatan selama

70. John D. Legge, *op.cit.*, h.321

71. *Ibid.*, h.322

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

demokrasi Terpimpin. Dengan Dekrit Presiden 5 juli 1959 telah memperkenalkan suatu orde baru yang didasarkan pada keseimbangan kekuatan dengan titik tumpu kekuatan Soekarno.⁷² Artinya Presiden Soekarno menjadi pusat kekuatan di Indonesia dan peranan partai-partai politik menjadi berkurang.

Susunan kabinet juga telah menunjukkan kurangnya peran partai, karena mereka yang duduk dalam kabinet diharapkan melepaskan diri dari kepartaian mereka sejak pelantikan. Kabinet sebelumnya menteri-menteri yang duduk menjabat adalah anggota-anggota partai. Maka dari itu kabinet ini dianggap sebagai kabinet non partai dan komposisinya menunjukkan semakin hilangnya pengaruh kepartaian.⁷³ Dari kabinet itu diharapkan akan tercipta suatu pemerintahan yang relatif stabil karena adanya persaingan antar partai, yang dibawa oleh anggota partai sebagai seorang menteri. Menurut Hatta, bila dilihat komposisi kabinet maka golongan-golongan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan kabinet yang mendukung sistem Soekarno disitu tidak ada homogenitas malahan mereka itu sendiri terdiri dari berbagai aliran yang bertentangan satu sama lain yang batas membatasi dan hambat-menghambat. Mereka itu dapat bekerja sama dengan musyawarah karena

72. Ibid., h.351

73. Ibid., h.358

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ada Soekarno yang menentukan dan mereka mengiakan.⁷⁴

Upaya pemerintah dalam meletakkan posisi partai politik di bawah kontrolnya atau bila mungkin menghapuskannya dilaksanakan dengan ketat. Contohnya pada tanggal 12 Januari 1960 Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres Penyederhanaan Sistem Kepartaian yang isinya, pertama, partai politik harus menerima dan mempertahankan UUD 1945 dan Pancasila dan harus memakai cara damai dan demokratis untuk mencapai tujuan politik mereka. Kedua, partai politik boleh menerima bantuan umum hanya dengan izin dari pemerintah. Ketiga, presiden bisa memerintahkan pemeriksaan dalam administrasi keuangan dan kehidupan partai-partai. Keempat, presiden bisa menolak program tiap partai yang diprogramkan. Untuk menolak prinsip dasar partai atau secara resmi boleh mendukung tindakan tiap partai yang mendukung pemberontakan.⁷⁵ UU ini menyebabkan partai-partai semakin tidak berdaya, bahkan urusan intern partaipun harus diketahui oleh presiden.

UU tahun 1960 dijadikan alat oleh presiden untuk mengecilkan peran partai-partai politik, kecuali 10 partai yang dilindungi pemerintah termasuk PKI. Situasi baru ini membawa semua partai tunduk pada satu manifesto politik yang bertujuan untuk mencapai cita-cita nasional

⁷⁴: Deliar Noer, op.cit., h.495

⁷⁵. Donald Hindley, The Communist Party of Indonesia 1951-1963 (Los Angeles: Univercity of California Press, 1964), h.277

yang satu. Terwujudnya rencana masyarakat sosialis Indonesia dengan satu sumber norma politik : presiden.⁷⁶ Partai-partai yang tidak mengindahkan undang-undang itu dengan cepat dibubarkan atau dilarang.

Berbeda halnya dengan PKI. Bila partai-partai lain relatif tidak punya suara lagi dalam penentuan nasib negara dalam demokrasi terpimpin, PKI setahap demi setahap mampu bangkit menjadi satu partai yang kuat dan patut dipertimbangkan. Sejak pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, PKI merupakan satu partai yang sakit parah dan tidak membahayakan serta tidak masuk perhitungan parta-partai politik lain. Organisasinya kacau, keanggotaannya tercecer dan tidak beraturan. Di masa kabinet Sukiman tahun 1952 diadakan pembersihan, anggota PKI yang mula-mula berjumlah 100.000 orang menyusut menjadi 7.910 orang anggota.⁷⁷ Wajarlah bila PKI dianggap partai kecil yang tidak membahayakan bagi partai politik lain. PKI yang memberikan dukungan untuk PNI tidak memprihatinkan, karena ada anggapan bahwa PKI memerlukan waktu lama untuk tumbuh menjadi partai besar. Anggapan yang meremehkan PKI itu ternyata menguntungkan perkembangan PKI.

⁷⁶. Herbert Feith dan Lence Castles, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 (Jakarta : LP3ES, 1988), h.113

⁷⁷. KKK, Dari Madiun ke Lubang Buaya Dari Luang Buaya ke ...? (Jakarta:-, 1967), h.37

Munculnya DN Aidit sebagai pimpinan muda PKI, membawa kebangkitan baru. PNI diperalatnya dalam suatu aliansi untuk mencapai tujuan, sebagai langkah awal. Keuntungan yang diperoleh dari aliansi ini adalah makin kuatnya kedudukan PKI, dan langkah berikutnya untuk merebut kekuasaan. Keuntungan-keuntungan itu⁷⁸ antara lain, pemerintah mengizinkan PKI dan organisasi masanya untuk bekerja tanpa pembatasan sehingga PKI tumbuh menjadi semakin besar dan kuat, dari 400 ribu anggota menjadi 3,5 juta anggota; aliansi itu menjadikan PKI lebih dekat lagi dengan nasionalisme utama; perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan kaum nasionalis mempermudah PKI untuk memenangkan dukungan masa; dukungan komunis (PKI) terhadap partai pemerintah (PNI) semakin memperlebar pertentangan antar partai yang bermusuhan, antar Masyumi dan PNI sehingga PKI dapat dengan mudah menyusup ke dalam partai itu; dukungan PKI setidak-tidaknya memperpanjang kedudukan kabinet; dukungan PKI terhadap pemerintah, mengakibatkannya bebas menyerang partai-partai anti komunis khususnya Masyumi dan PSI.

Keberhasilan PKI dalam membina aliansi dengan PNI itu dipakai sebagai landasan untuk menjalin hubungan dengan Presiden Soekarno yang akan membawanya ke kursi terhadap partai pemerintah (PNI) semakin memperlebar pertentangan antar partai yang bermusuhan, antar Masyumi

78. Donald Hindhely, *op.cit.*, h.51

dan PNI sehingga PKI dapat dengan mudah menyusup ke dalam partai itu; dukungan PKI setidaknya-tidaknya memperpanjang kedudukan kabinet; dukungan PKI terhadap pemerintah, mengakibatkannya bebas menyerang partai-partai anti komunis khususnya Masyumi dan PSI.

Keberhasilan PKI dalam membina aliansi dengan PNI itu dipakai sebagai landasan untuk menjalin hubungan dengan Presiden Soekarno yang akan membawanya ke kursi kekuasaan. Pada awalnya sikap Soekarno sendiri terhadap PKI cukup berhati-hati ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Ketegasan sikapnya tercermin dalam seruannya, "Ikut Muso atau ikut Soekarno Hatta."⁷⁹ Sikap PKI terhadap pemerintah juga cukup keras. Mereka seringkali mengeluarkan kritik-kritik pedas, misalnya mengenai menteri-menteri yang korupsi. Walau demikian karena satu-satunya jalan menuju kekuasaan lewat Soekarno, maka kritik-kritik itu berkurang.

Di mata Presiden Soekarno dan masyarakat umum PKI mempunyai nilai tambah tersendiri. Sebagai satu partai di luar kabinet PKI tidak terlibat dalam skandal korupsi. Keuntungan yang diperoleh PKI itu sedikit-demi sedikit mendekatkan dengan Presiden Soekarno. PKI juga menggunakan taktik yang cermat dalam upayanya mendekatkan diri dengan Presiden Soekarno. Ia selalu menyetujui dan mendukung tindakan Presiden Soekarno bahkan menggunakan

⁷⁹. KKK, op.cit., h.20

massanya untuk memasyarakatkan keputusan presiden dan meyakinkan kepada masyarakat mengenai keputusan presiden itu. Di pihak Presiden Soekarno melihat posisi dan kesetiaan yang ditunjukkan PKI itu merasa beruntung bila ia mengadakan aliansi dengan PKI. Dengan pertimbangan aliansi itu akan memperkuat kedudukannya dalam menghadapi AD yang muncul sebagai kekuatan politik non partai setelah tahun 1957 karena keberhasilannya menumpas pemberontakan daerah. Dengan demikian posisinya tetap, yakni sebagai pusat kekuasaan politik di Indonesia. Lain daripada itu PKI setelah bangkit merupakan satu partai besar yang terorganisir dengan baik. PKI juga bisa dipergunakan oleh Presiden Soekarno untuk alat legitimasi, sebagai bapak dan pemimpin revolusi dengan cara menggerakkan masa sebanyak-banyaknya. Aliansi dengan PKI dan AD karena tidak terjadi perang saudara antara PKI dan AD karena perannya sebagai penengah.⁸⁰ Aliansi dengan PKI juga berarti kekuatan tetap berada di tangan Presiden Soekarno

Aliansi dengan Soekarno bagi PKI sangat penting. Soekarno merupakan satu-satunya kekuatan dominan di Indonesia saat itu. Bila PKI mengidentifikasikan dirinya dengan Soekarno (salah satu cara yang dipakai untuk beraliansi dengan Soekarno) maka kedudukan PKI akan tetap kokoh. AD tidak akan berani gegabah terhadap PKI yang

80. Donald Hindley, *op.cit.*, h.257

berada dalam lindungan Presiden Soekarno. Dengan mengidentifikasikan dirinya berarti suara Soekarno adalah suara dirinya dan sebaliknya. Memakai alasan demokrasi, PKI dapat membentuk keseimbangan partai politik dalam membentuk kebijaksanaan pemerintah dan dipakai sebagai latihan bagi anggota-anggotanya agar lebih militan. Upaya militansi anggota-anggota PKI itu mendapat tantangan dari pihak AD yang tidak menghendaki terwujudnya militansi anggota partai. Aliansi itu juga mampu mengantar PKI masuk kabinet dan mendominasinya serta suatu saat akan dapat muncul sebagai penguasa.⁸¹

Kesempatan dan keuntungan yang diperoleh PKI dari aliansi dengan Soekarno dimanfaatkan secara baik oleh Aidit. Idealisme Soekarno ingin mempersatukan kekuatan-kekuatan nasionalis, agama serta komunis sangat membantu tumbuhnya PKI. Sehingga secara aklamasi PKI muncul sebagai satu kekuatan baru pendukung presiden. Tepatlah pernyataan Aidit bahwa bila kekuatan progresif tumbuh dengan kuat sementara kekuatan reaksioner walau tetap kuat, tumbuh melemah dan kekuatan penengah memberi indikasi yang bergerak meninggalkan kekuatan reaksioner.⁸² PKI lincah membina hubungan dengan Soekarno secara berangsur-angsur memakai cara selalu mendukung dan

81. Ibid., h.284

82. Ibid., h.300

memuji Bung Karno.⁸³ Walau demikian tetap ada kekuatan lain yang senantiasa menjadi penghambat bagi PKI yaitu AD.

AD muncul sebagai salah satu kekuatan yang mengaku selalu bertugas sebagai penyelamat negara, baik dalam menghadapi kekuatan asing ataupun dalam menghadapi pemberontakan-pemberontakan dalam negeri. T.B. Simatupang me-nyatakan bahwa tempat dan tugas angkatan bersenjata di luar militernya tersusun yakni tugas-tugas bertempur atau tugas 'combat' tergantung dari susunan pemerintah dan keadaan masyarakat suatu negara.⁸⁴ Kemudian lebih lanjut Simatupang menjelaskan bahwa dengan sebutan lain dia hanya alat teknis yang menjalankan perintah yang ditetapkan oleh politik dalam negara.⁸⁵

Ketika terjadi pemberontakan PRRI, angkatan perang dalam waktu singkat berhasil memadamkan pemberontakan itu. Tindakan itu jelas membawa pengaruh bagi AD, meningkatkan prestise bagi ABRI dan AD khususnya dan juga menunjukkan bahwa AD merupakan komponen yang sangat kuat.⁸⁶ Kedudukan AD semakin kuat ketika AD diberi wewenang mengeluarkan UU darurat Perang. Arti UU darurat

83. A.H. Nasution, memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5 (Jakarta : Gunung Agung, 1985), h.27

84. T.B. Simatupang, Pemerintah-Masyarakat-Angkatan Perang (Jakarta: PT Gramedia, 1960), h.59

85. Ibid., h.80

86. G. Mudjanto, SPPS ... op.cit., h.11

Perang itu adalah AD diberi wewenang untuk masuk pemerintahan secara menyeluruh seperti pernyataan Bernhard Dahm:

"... master in the field of ideology, the executive was dominated by military. Since the proclamation of the state of emergency in March 1957 the army had established itself as the power responsible for law and order and administration, more especially in outer provinces, but also in Java, where its influence was all-pervasive although it interfered less in administrative matter."⁸⁷

Ungkapan Bernhard Dahm ini lebih diperkuat oleh pernyataan Ulf Sundhahussen bahwa AD telah menggunakan kekuatan UU Darurat untuk mempengaruhi boleh dikatakan semua kegiatan pemerintahan, untuk merembesi dinas-dinas pemerintah dan perekonomian, dan untuk ambil bagian dalam kegiatan politik sehari-hari.⁸⁸

Martial Law menjadi senjata AD untuk mengatur pemerintahan sekaligus perlahan-lahan menjadi senjata untuk menyerang PKI. Berbagai cara diupayakan untuk menyerang PKI seperti menyensor setiap pidato yang akan dibacakan, pelarangan terbit bagi surat kabar yang berafiliasi dengan PKI, mengirim intel menyusup ke dalam setiap pertemuan diadakan. Akan tetapi karena kepandaian PKI dalam mengidentifikasikan diri dengan Presiden Soekarno dan menjadikannya sebagai pelindung PKI tetap selamat dari serangan AD. Bagaimanapun juga AD tidak bisa berbuat gegabah. PKI yang berada di bawah bayang-bayang

⁸⁷. Bernhard Dahm, History of Indonesia in The Twentieth Century (London : Praeger Publisher, 1971), h.197

⁸⁸. Ulf Sundhahussen, Politik Militer Indonesia Menuju Dwi Fungsi ABRI (Jakarta : LP3 ES, 1986), h.270

Presiden Soekarno cukup aman, karena suatu tindakan pelarangan PKI akan berarti suatu tantangan langsung terhadap Presiden Soekarno.⁸⁹ Sedang respek AD terhadap Presiden Soekarno tetap tinggi, akhirnya tindakan AD akan terhenti.

Tidak selamanya martial law akan tetap bertahan, dan pada tahun 1959 UU ini ditarik. Untuk tetap menjaga posisi AD, maka banyak personil-personil AD masuk ke lembaga-lembaga negara seperti DPR sebagai wakil golongan fungsional, Front nasional, kabinet. Masuknya AD dalam pemerintahan tidak mudah diterima partai-partai politik, karena tidak menginginkan rejim militer. Tetapi bagaimanapun juga AD telah berhasil mencengkeramkan pengaruhnya dan menjadi satu kekuatan yang patut untuk diperhitungkan oleh kekuatan lain.

Kekuatan lain di Indonesia adalah Soekarno. Ia tidak mempunyai satu partai tertentu, tetapi ia dapat mengembangkan suatu pola permainan politik sedemikian rupa sehingga ia terasa dibutuhkan oleh kekuatan politik dan sosial.⁹⁰ Demokrasi terpimpin ciptaannya ia pakai sebagai alat untuk memusatkan kekuasaan. Secara berangsur-angsur mengkonsolidasikan posisi politiknya selaku kepala pemerintahan menurut UUD 1945, mempraktekkan secara nyata jabatan panglima tertinggi (Pangti) serta

89. Ibid., h.256

90. G. Mudjanto, op.cit., h.12

penguasa perang tertinggi (Pangperti) sehingga terpusat kekuasaan di tangannya.⁹¹

Sebagai orator ia mampu menciptakan pemuja-pemuja dirinya yang siap untuk melaksanakan keputusannya. Bahkan secara tiak langsung konsep terpimpinnya memunculkan kembali konsep-konsep tradisional. Tetapi memang dirasakan oleh masyarakat bahwa pola pemerintahan yang terpusat di tangan seseorang lebih sesuai dengan susunan masyarakat Indonesia pada umumnya yang biasanya bersifat otoriter.⁹² Sejarah Indonesia yang diwarnai oleh raja, ratu, sultan serta penguasa absolut lainnya yang dianggap sebagai mediator antar dunia dan kekuatan kosmologi yang menguasai kehidupan masyarakat dan manusia. Kepercayaan dalam masyarakat yang memandang penguasa sebagai segala-galanya dipergunakan Soekarno untuk mewujudkan kekuasaan dalam tangannya. Walau Soekarno beruntung dengan pola tradisional masyarakat yang masih dianut untuk mewujudkan absolutisme akan tetapi Soekarno masih tetap membutuhkan partner untuk mengkonsolidasikan kekuasaan pusat ke daerah yakni AD dan PKI. Dua partai yang dipilihnya karena kedua-duanya sudah masuk ke pelosok-pelosok dan sudah terorganisir dengan baik. AD sangat menjunjung tinggi kedisiplinan sedangkan PKI ia pakai sebagai alat pengimbang kekuatan AD selain diketahui sebagai partai

91. Nasution, op.cit., h.1

92. Herbert Feith & Lance Castles.ed.,op.cit., h.113

yang progresif.⁹³

Soekarno sebagai penengah menjaga keseimbangan pengaruh antara kedua kekuatan itu. Kenyataannya sedikit demi sedikit Soekarno mulai condong ke kiri dan mulai mengurangi peran AD. Hal itu disebabkan karena kekhawatirannya akan terjadi kup militer. PKI juga sanggup memenuhi kewajibannya mempertahankan agitasi politik presiden atau juga karena kecurigaan presiden terhadap AD, karena perwira-perwiranya menginginkan pemerintahan yang dipimpin atau tergantung pada AD. Sedang lawan-lawan politiknya yaitu Hatta dan Masyumi mungkin akan memegang peranan yang besar di dalamnya. Karenanya Presiden Sukarno membutuhkan kawan yang dapat diandalkan, yaitu PKI.⁹⁴

Ide Nasakom Soekarno juga memperlihatkan posisinya yang mulai condong ke kiri. Keyakinannya mampu mempersatukan kekuatan bangsa lewat ide Nasakom sangat kuat. Tetapi keinginan tinggal keinginan, setelah PKI gagal melancarkan pemberontakkannya dan ia gagal berupaya membelanya. Ia harus turun dari kursi pemerintahan. PKI yang menjadi pendukungnya dibubarkan, maka berhenti pula upaya nasakomisasi yang ia harapkan mampu mendukungnya menjadi satu-satunya penguasa di Indonesia.

93. John M. Reinhardt, Foreign Policy and National Integration ... (Yale University Southeast Asia Studies, 1971), h.60

94. G. Moedjanto, SPPS ... op.cit., h.12

Kegagalan PKI sekaligus merupakan kegagalan Soekarno untuk mewujudkan ide Nasakomnya. Akan tetapi bagaimanapun juga Soekarno mencatat prestasi tersendiri, meletakkan landasan untuk mengkonsolidasi seluruh kekuatan bangsa Indonesia di tangannya. Apakah situasi hingar bingar di dalam negeri Indonesia juga berpengaruh terhadap politik luar negeri Indonesia ? Berikut akan dikaji mengenai petualangan Indonesia di luar neegri.



BAB IV

SITUASI LUAR NEGERI ERA PERANG DINGIN
DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Bab III telah menjelaskan mengenai situasi dalam negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin, yang ikut berperan untuk memunculkan politik luar negeri Indonesia keluar rel sebenarnya. Pada bab berikut akan menjelaskan situasi luar negeri Indonesia. Bab ini juga membicarakan praktek-praktek politik luar negeri Indonesia yang menyeleweng dari garis bebas aktif.

A. Blok-blok Yang Saling Bertentangan

Di Eropa, perang dunia kedua berakhir dengan kekalahan Jerman dan Jepang atas Sekutu di bawah pimpinan AS. Berakhirnya perang mengakibatkan pergeseran peta kekuatan. Kekuatan yang mula-mula berpusat di Eropa bergeser ke Amerika. Akan tetapi tidak diduga sebelumnya jika di pihak pemenang perang terjadi perpecahan akibat perbedaan ideologi. Amerika dan negara-negara Eropa Barat di satu pihak serta Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur di pihak lain.

Sejak saat itu dunia internasional seakan-akan terbagi menjadi dua kekuatan raksasa yang siap berlaga. Dua blok hasil perang dunia kedua itu juga menyebabkan pergeseran pemeran di dunia internasional, tidak lagi hanya negara-negara Eropa Barat akan tetapi juga negara-

negara dari blok sosialis.⁹⁵ Terbaginya dunia menjadi dua kekuatan juga memacu timbulnya persaingan untuk memperebutkan wilayah pengaruh, yang satu berusaha mengungguli yang lain. Persaingan itu terjadi di seluruh pelosok dunia, tidak hanya di Eropa juga di Asia dan Afrika serta di Amerika Latin.

Perkembangan komunisme sangat pesat, terbukti dengan cepat negara-negara Eropa Timur dengan cepat telah menjadi satelit Uni Soviet. Melihat keadaan itu Amerika Serikat berupaya untuk menghambat perkembangannya, agar negara-negara yang rusak setelah perang tidak jatuh ke dalam pengaruh komunis. Cara yang ditempuh Amerika dengan memberi bantuan ekonomi yang dikenal dengan program Marshall Plan, selain itu juga dibentuk pakta pertahanan NATO. Akan tetapi Uni Soviet tidak tinggal diam, badan ekonomi Comecon dibentuk untuk mengimbangi program bantuan ekonomi Marshall Plan serta Pakta Warsawa dibentuk untuk mengimbangi Pakta Pertahanan NATO. Situasi persaingan itu menyebabkan perimbangan kekuatan senantiasa tercipta karena satu sama lain berusaha mengimbangi. Walau demikian perluasan pengaruh dan penyebaran ideologi tidak dapat terelakan.

Uni Soviet memakai politik air hangatnya sebagai perisai untuk perluasan pengaruhnya. Suatu politik yang berupaya untuk mencari pelabuhan bebas es pada musim

95. Dudy Singadilaga, Op.Cit, h.9

dingin, karena hampir semua pelabuhan yang dimilikinya menjadi beku bila musim dingin tiba, keadaan itu sangat mengganggu perekonomian Uni Soviet. Untuk kepentingan itulah Uni Soviet sungguh-sungguh ingin mewujudkan pelabuhan bebas es dan itu dapat tercapai apabila pelabuhan-pelabuhan itu menjadi wilayah pengaruhnya. Tujuan itu sendiri sesuai dengan yang dicita-citakan para pemimpin komunis dunia, pertama ialah melemahkan negaranya dari dalam lalu menguasainya.⁹⁶ Cita-cita itu sangat mengkhawatirkan pihak Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Kekhawatiran itu cukup beralasan karena bukti telah menunjukkan bahwa dalam waktu cukup singkat negara-negara miskin di Eropa Timur berhasil masuk wilayah pengaruhnya. Situasi itu akan cepat berkembang bila tidak dihambat, karena itu segala daya upaya dilakukan baik dengan cara memberi bantuan ekonomi atau membentuk pakta pertahanan untuk menghambat perluasan lebih jauh. Situasi era perang dingin diwarnai persaingan antara dua blok, di satu pihak berusaha meluaskan, di pihak lain berusaha untuk menghambat atau sebaliknya.

B. Hubungan China-Uni Soviet

Usai perang dunia kedua Uni Soviet sebagai satu kekuatan menjadi saingan Amerika dan sekutunya. Peranan Uni Soviet sebagai pemimpin sangat berarti. Uni Soviet



⁹⁶. Ahmad Hussein, Pantjasila dan Komunisme (Djakarta: Penerbit Pusaka, 1957), h.32

berarti memimpin negara-negara satelitnya, menjadi model dan pola panutan bagi negara-negara satelitnya. Dengan kata lain semua kegiatan yang menyangkut komunisme dunia berpusat dan ditentukan Uni Soviet. Seperti ungkapan John Fairbank ...during the cold war of late 1940's and early 1950's however "monolithic internasional communism" seemed to be unified by a single dominant ideology as well as by the final authority of Stalin.⁹⁷

Demikian pula dengan Cina yang masa itu dipimpin oleh Mao Tse Tung. Sesudah pendirian RRC berpihak pada Soviet dan sekutunya di bidang politik luar negeri. Hal ini sesuai dengan pikiran Mao dari tulisannya yang berjudul 'Diktatur Demokratis' yang menuliskan bahwa pemerintah baru harus berada dipihak negara sosialis.⁹⁸

Pikiran Mao itu dilaksanakan dengan semakin dekatnya hubungan antara Cina dengan Soviet. Keakraban itu ditandai dengan pemberian bantuan Soviet kepada RRC untuk melaksanakan pembangunan dalam negeri secara bertahap. Mereka juga mengadakan perjanjian-perjanjian yang menguntungkan kedua pihak. Untuk menghormati Soviet, RRC secara berkesinambungan mengirimkan utusan setiap peringatan May Day. Dan Cina mengacu kepada Soviet dalam melaksanakan pembangunan.

97. John King Fairbank, The United State and China (USA : Harvard College, 1993), h.383

98. Willem G.J. Rimmelink, Sejarah China Ikhtisar Sejarah dan Kebudayaan dari Zaman Sejarah Sampai Kini (Yogyakarta, 1982), h.137

Akan tetapi keadaan berubah setelah Stalin meninggal dan digantikan Kruchew yang melaksanakan program destalinisasi, hubungan Cina-Soviet menjadi renggang.⁹⁹ Mao menafsirkan pengertian Marxisme dan melaksanakannya secara konkrit sesuai dengan realitas Cina. Keadaan itu dibenarkan oleh Fairbank yang menulis :

"... the CCP after 1949 set up "people's democratic dictatorship" and claim that more hegemony of the proletariat at the heart of a united front and coalition government representing the whole people a combination of all revolutionary classes..."¹⁰⁰

Penafsiran yang berbeda dari kedua teman itu menyebabkan pertentangan, terutama mengenai konflik ideologinya, dan masalah ini akan berkembang.

Berkembangnya konflik ideologi antara Cina-Soviet disebabkan¹⁰¹ hal-hal berikut; pertama, perkembangan dalam negeri Cina telah banyak menyimpang dari contoh Rusia; kedua, di bidang politik luar negeri Cina mengajukan garis yang lebih radikal, sebagai contoh adalah sikap Rusia dalam krisis Cuba Oktober 1962 dikutuk oleh Cina sebagai oportunisme kanan; ketiga, pada tahun 1963 Cina menolak menandatangani perjanjian percobaan nuklir; keempat, pada tahun 1964 Cina meledakkan bom atom untuk pertama kali yang dikembangkan setelah tahun 1960 tanpa bantuan Rusia; kelima, dalam gerakan komunis inter-

99. Ibid., h.150; periksa pula Fairbank The United.., h.383

100. John King Fairbank, op.cit., h.66

101. Remelink, op.cit., h.139

nasional Cina menuntut kedudukan yang sama dengan Uni Soviet yang berarti RRC mengklaim peran Uni Soviet sebagai model yang dicontoh oleh semua negara terutama bagi negara-negara di Asia dan Afrika seperti yang tertulis dalam artikel Lin Piao yang mengajukan sebagai bagian revolusi dunia; keenam, tuntutan Cina atas sebagian wilayah Rusia yang terletak di Asia Tengah dan pada tepi sungai Amur yang dirampas Rusia.

Hal-hal di ataslah yang menyebabkan semakin renggang hubungan Cina Soviet, bahkan menimbulkan persaingan antara kedua negara untuk meluaskan wilayah pengaruh. RRC akhirnya muncul sebagai suatu negara yang menjadi pola anutan bagi negara-negara sosialis khususnya di Asia dan Afrika. Jumlah penduduk yang cukup besar sangat mendukung pelaksanaan pembangunan. Kelebihan itu pula yang dipakai oleh Mao untuk menandingi Uni Soviet, menandai semakin buruknya hubungan RRC-Uni Soviet. Teknisi-teknisi Uni Soviet yang diperbantukan di RRC diusir tahun 1960¹⁰² dan akhirnya kedua negara menutup kedutaan besar masing-masing dan memanggil pulang perwakilannya.

C. Wilayah Pengaruh Komunisme di Asia

Pemimpin komunisme mencita-citakan penyebaran ideologinya ke seluruh dunia. Sasaran awal setelah Eropa Timur yang dipandang mudah menariknya adalah Asia dan

102. John King Fairbank, op.cit., h.386

Afrika. Untuk itu Rusia tetap teguh akan politiknya menguasai Timur (Asia) untuk selanjutnya menguasai dunia¹⁰³ karena mayoritas negara-negara di Asia dan Afrika tergolong miskin dan padat penduduknya. Keadaan itu sangat tepat untuk mewujudkan revolusi komunis. Revolusi hanya akan berkembang apabila penduduk Asia yang besar bersatu dengan kita (komunis Rusia)¹⁰⁴ Tentunya suatu negara miskin relatif lebih mudah dipengaruhi. Dalih yang dipergunakan untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup dan itu hanya bisa terwujud lewat suatu negara komunis, akan mudah disulut pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa dan mewujudkan satu negara komunis.

Salah satu negara di Asia yang telah menjadi negara komunis adalah Cina. Dikuasainya satu negara oleh ideologi ini akan mempermudah penyebarannya dan membentuk satu wilayah pengaruh. Pembentukan wilayah pengaruh ini menjadi tantangan bagi blok barat sekaligus bersaing untuk memperbanyak sekutu. Adapun cara yang dipakai berupa bantuan ekonomi ataupun hubungan perdagangan yang menyelubungi tujuan politik sesuai dengan keadaan dan situasi negara sasaran, contohnya India.

Struktur penduduk India terbagi dalam kasta-kasta. Kasta terbesar adalah Sudra, yang sebagian besar warganya

103. Ahmad Hussin, op.cit., h.44

104. Ibid., h.31

berada di bawah garis kemiskinan. Situasi ini amat menguntungkan bagi perkembangan komunisme. Ketidakadilan sering kali diterima oleh kasta ini. Banyak anggota kelompok ini yang pandai dan kaya, namun mereka dari kasta rendah tidak dapat berbuat banyak. Kemiskinan dan ketidakadilan yang berkembang di India akan menyuburkan revolusi yang dibutuhkan Komunisme. Juga diharapkan pengalihan revolusi nasional menjadi satu revolusi yang melahirkan suatu negara komunis akan mudah dilaksanakan walaupun harapan itu tidak terwujud. Pertentangan-pertentangan pribadi yang berlangsung terus-menerus antar tokoh-tokoh partai sangat menghambat terwujudnya revolusi mewujudkan negara komunis.¹⁰⁵ Pusat gerakan itu di Calcuta dan Benggala Timur serta India Selatan yang padat penduduknya terutama di negara bagian Kerala.¹⁰⁶ Akan tetapi komunisme gagal di India. Banyak faktor yang menyebabkan seperti partai yang tidak sehat dan kesadaran pemerintah Nehru akan bahaya yang mengancam setelah secara terbuka meluaskan daerahnya ke wilayah India yang menuntut daerah seluas 50.000 mill¹⁰⁷ persegi serta campur tangan RRC mengenai masalah Kashmir antara India-Pakistan.

Situasi mirip India juga terjadi di Birma.

105. KKK, Komunisme di Asia (Jakarta, 1963), h.24

106. Ibid., h.25

107. Ibid., h.27

Pemerintah pusat lemah dan memancing timbulnya kekacauan yang disebabkan oleh golongan separatis dan suku. Karena yang menuntut kekuasaan ekonomi dari pemerintah pusat.¹⁰⁸ Segera partai komunis ikut menunggangi gerakan itu. Gerakan-gerakan itu mengalami kegagalan setelah pemerintah militer berdiri di bawah Jenderal Ne Win. Di Birma juga diberlakukan sistim partai tunggal yang menutup kemungkinan komunisme berkembang.

Seperti halnya di daerah Asia Selatan, di wilayah Asia Tenggara tidak mengalami kegagalan. Partai komunis di kawasan ini agak kuat dan telah mengadakan aksi-aksi teror dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan tokoh non-komunis seperti yang terjadi di Laos, Muangthai, Vietnam. Langkah lain yang ditempuh adalah melakukan kerja sosial dan secara lambat laun menanamkan perasaan anti pemerintah. Hasilnya adalah simpatisan semakin besar, seperti yang terjadi di Muangthai. Komunis juga pandai memanfaatkan peluang yang ada, yakni dengan mengikutsertakan kaum agama seperti di Laos, Kamboja dan Vietnam yang memakai biksu agama Budha. Mereka mengidentifikasikan diri dengan Budha yang bersifat damai dan tenang. Kaum komunis adalah pejuang paling gigih bagi perdamaian di dunia modern. Untuk itulah antara komunis dan Budha wajib bekerjasama.¹⁰⁹ Kepandaian dan ketepatan menggunakan

108. Ibid., h.31

109. Ibid., h.40

kesempatan dan situasi di negara-negara itu mengantarkan partai sebagai penguasa.

Di Laos komunisme juga dapat memanfaatkan situasi negara itu. Pathet Lao (Partai Komunis Laos) terus menerus memecah belah negara yang senantiasa dilanda kekacauan dan kebobrokan yang disebabkan oleh golongan militer. Taktik yang dipergunakan itu mampu mewujudkan kedudukan yang kuat. Keberhasilan itu juga didukung oleh Hanoi dan Peking yang memberi bantuan Pathet Lao dalam menciptakan dan melahirkan negara dalam negara.¹¹⁰

Keberhasilan Pathet Lao diikuti pula rekan-rekan sesama komunis di Vietnam. Vietnam pada tahun 1954 lewat persetujuan Geneva menjadi dua wilayah Vietnam Utara yang komunis dan Vietnam Selatan yang non komunis. Cara-cara yang dipergunakan gerilyawan komunis sehingga mampu berkuasa yakni dengan mengadakan ormas-ormas sebagai wadah penampungan bagi gerilyawan-gerilyawan. Membentuk front dengan golongan-golongan lain dan posisi-posisi yang penting dikuasai oleh komunis. Menciptakan dan menggunakan ketidakpuasan rakyat yakni tuntutan rakyat yang untuk sementara waktu diperjuangkan kaum komunis.¹¹¹ Selain cara-cara itu juga pemerintah Ngo Dinh Diem yang lemah ikut mendukung keberhasilan kaum komunis. Kup yang sering terjadi setelah kematian Ngo Dinh Diem serta

110. Ibid., h.41

111. Ibid., h.43-44

perang saudara yang melibatkan RRC dan Rusia yang memberi bantuan semakin memperkuat kedudukan kaum komunis di Vietnam.

Akan tetapi tidak semua daerah di Asia dikuasai kaum komunis. Pakistan yang merupakan negara Islam, Malaysia, Philipina mampu melepaskan diri dari proyek perluasan ideologi untuk mewujudkan satu wilayah pengaruh Asia. Komunis juga berhasil untuk sementara waktu menjadikan kawasan ini daerah kacau karena persaingan ideologi antara blok Barat dan Timur serta dipihak komunis sendiri. Situasi persaingan yang terjadi di Asia ini sangat mempengaruhi perjalanan politik luar negeri Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya politik luar negeri bebas aktif mengalami pergeseran dari rel.

D. Kiprah Indonesia di Luar Negeri

Setelah rencana umum dibicarakan mengenai situasi dunia dan Asia yang ikut mendukung terbentuknya politik luar negeri bebas aktif sehingga keluar dari relnya, berikut ini akan dibicarakan politik luar negeri Indonesia dalam pelaksanaannya yang meliputi hubungan Cina-Indonesia, upaya Indonesi dalam mewujudkan cita-cita menjadi satu kekuatan dunia.

1. Hubungan Indonesia-RRC

Semakin eratnya hubungan Indonesia-Cina diawali sekitar tahun 1950-an, ketika itu timbul masalah Dwi-

kewarganegaraan dari orang-orang Cina perantauan yang ada di Indonesia.¹¹² Orang Cina selama penjajahan Belanda dan Jepang tidak menimbulkan masalah dengan hak-hak istimewa di bidang perdagangan yang mereka miliki. Orang Cina itu masih tetap berhak dengan kewarganegaraan mereka. Keadaan ini dijadikan sebagai alat bagi penjajah untuk memecah belah agar tidak terjadi penyatuan dengan pribumi.

Setelah Indonesia merdeka masalah kewarganegaraan timbul, karena Indonesia menganut sistim Ius Soli sedangkan RRC menganut sistim Ius Sanguinis. Perbedaan sistem yang dianut itu menyebabkan orang-orang Cina perantauan mempunyai dua kewarganegaraan. Masalah-dwi kewarganegaraan ini diselesaikan bersamaan dilaksanakannya KAA di Bandung. Perjanjian yang disepakati pada pokoknya menyatakan bahwa orang Cina perantauan berhak memilih kewarganegaraann dalam jangka waktu tertentu. Bila memilih RRC maka harus kembali ke negara itu. Berawal dari sinilah hubungan RRC-Indonesia semakin membaik.

Hubungan kedua negara itu sekamin erat, karena memburuknya hubungan RRC-Uni Soviet yang disebabkan perbedaan prinsip kedua negara. Eratnya hubungan Indonesia-Cina juga karena keinginan RRC untuk mewujudkan komunis Asia dengan satu pemerintahan pusat di RRC.¹¹³

112. Subandrio, Indonesia On March Jilid I., (Djakarta : Djambatan, 1959), h.11

113. Sheldon W. Simon, The Broken Triangle Peking-Djakarta And PKI (Baltimore : The Simon Johnes Hopkins Press, 1969), h.16

Untuk mewujudkan RRC butuh partner yang bisa diajak kerjasama. Dipilihnya Indonesia, karena sesuai dengan idelaisme RRC. Indonesia juga merupakan negara yang berpotensi untuk mendukung RRC, baik itu jumlah penduduk ataupun kekayaan alamnya, serta sosok Soekarno sebagai pemimpin waktu itu. Banyak persamaan-persamaan antara kedua negara ini, seperti ketidaksukaan terhadap kolonialisme, karena pengalaman dijajah. RRC sangat mendukung perang kebebasan nasional dan itu berarti penyebaran ideologi dapat tersamarkan. Dengan kata lain Peking akan mengawali petualangannya dengan bekerjasama dengan kaum elit non komunis sehubungan dengan masalah anti imperialisme tetapi tidak mendukung keabsahan mereka.¹¹⁴

Prospek hubungan Cina-Indonesia sangat menguntungkan Cina bagi perkembangan ideologi komunis. Ambisi Soekarno yang ingin mewujudkan kekuasaan tertinggi di tangannya dengan Demokrasi Terpimpin sebagai alatnya serta perkembangan Partai Komunis Indonesia yang pesat memperbesar optimisme Cina akan mendapat kemenangan di wilayah ini. Optimisme penetrasi terhadap partai politik yang cukup berpengaruh, PNI.¹¹⁵ Alasan lain mengapa RRC lebih memilih Indonesia sebagai mitra sejawat karena secara diplomatis bila berhubungan dengan Indonesia berarti RRC mampu memecahkan politik Amerika untuk mengepung RRC

114. Ibid., h.17

115. Ibid., h.19

mulai dari Korea Selatan dan Jepang sampai Okinawa-Taiwan dan Vietnam Selatan. Secara ekonomis daerah ini merupakan sumber bahan baku bagi pembangunan industri dan merupakan pasaran potensial bagi barang-barang RRC.¹¹⁶ Kesemua itu merupakan kemenangan komunis dari Barat.

RRC mengetahui ambisi Soekarno dalam mewujudkan diri sebagai pimpinan negara-negara Asia-Afrika. Sikap itu dipakai sebagai alat untuk menarik simpati dari negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Kemampuan Soekarno sebagai orator serta kharisma yang dimilikinya akan mempermudah terwujudnya politik Cina. Politik untuk mewujudkan satu blok eksklusif dari berbagai macam komunitas di Asia dan Afrika yang dapat dipermainkan peranannya oleh Cina.¹¹⁷

Di dalam forum-forum resmi eratnya hubungan kedua negara tampak dari jalur-jalur pemikiran yang sama. Sebagai contoh, ketika Soekarno mempunyai ide untuk mengadakan KAA II, RRC dengan antusias mendukung ide tersebut. Dukungan itu disertai bantuan dana kepada Indonesia. Dalam KAA II RRC melihat kesempatan untuk tampil dan membangun satu kekuatan pengaruh diantara bangsa-bangsa yang baru merdeka. Ketika di Jakarta diadakan konperensi wartawan, RRC menolak kehadiran wartawan Vietnam Utara dan sikap itu didukung Indonesia. Kedua

116. Lie Tek Tjeng, RRT dan Singapura: Suatu Pandangan (LIPI Seri No. IX/4, 1970), h.4

117. Ibid.

negara juga saling mengirimkan delegasinya untuk mempererat persahabatan. Pada bulan April 1963 Presiden Liu Shao-Chi mengunjungi Jakarta dan mengadakan pembicaraan mengenai peningkatan persahabatan kedua pihak. Dalam pertemuan itu dikeluarkan pernyataan tentang kesamaan tujuan politik luar negeri kedua bangsa. Soekarno juga menandakan bahwa kedua bangsa berada dalam posisi yang sama sebagai komponen NEFO yang sedang berjuang gigih menentang the old established forces.

Kesejajaran Cina-Indonesia juga nampak. Ketika kedua negara sama-sama menolak kehadiran kontingen Israel dan Vietnam Selatan dalam penyelenggaraan Asian Games di Jakarta. Alasan penolakannya karena kedua negara itu merupakan suatu proyek nekolim. Tindakan Indonesia itu dikritik oleh IOC dan karena kritikan itu pula maka Indonesia segera memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut. Sikap Indonesia itu didukung oleh Cina dan dipuji sebagai tindakan yang berani untuk menentang imperialisme. Setelah Indonesia keluar dari IOC kemudian membentuk badan tandingan khusus beranggotakan bangsa-bangsa baru merdeka dan menyelenggarakan pesta olah raga yang dikenal dengan Ganefo. Cina menunjukkan kesepakatan-nya dengan memberikan bantuan kepada pihak Indonesia. Ganefo yang dibuka tanggal 10 Nopember 1963 berjalan dengan lancar.

Gambaran lain yang menunjukkan eratnya hubungan antara Cina-Indonesia akan tetapi juga sebagai bukti

ketergantungan Indonesia terhadap pemerintah Cina adalah di bidang ekonomi. Keadaan ekonomi Indonesia sangat memprihatinkan, proyek mercu suar yang dilakukan Presiden Soekarno untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat NEFO memakan biaya yang besar. Sedang keadaan ekonomi setelah perjuangan memperebutkan Irian Barat belum pulih. Soekarno mengunjungi Chou En-Lai di Shanghai untuk menyelaraskan politik luar negeri kedua negara dan juga meminta bantuan ekonomi untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Kunjungan Soekarno ternyata membawa hasil. Dalam pertemuan tersebut disepakati hal-hal berikut: pertama, akan diadakan tukar menukar informasi dan pengalaman dalam rangka menentang imperialisme, kolonialisme dan neo kolonialisme. Kedua, akan mendiskusikan bersama masalah dunia yang sedang atau yang akan datang untuk membangkitkan semangat juang. Ketiga, kedua pihak sependapat bahwa perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme merupakan suatu perjuangan yang tidak terpisah satu sama lain. Keempat, Cina meyakinkan penduduknya untuk membantu Indonesia sepenuhnya dalam menghadapi Malaysia, karena Malaysia merupakan ancaman bagi negara-negara Asia Tenggara. Kelima, Cina akan membantu Indonesia sebesar 50 juta dollar.¹¹⁸

Masalah konfrontasi Indonesia-Malaysia dibawa sampai

118. Frans F. Fernandes, Hubungan Internasional dan Peranan Bangsa Indonesia (Jakarta : Depdikbud., 1988), h.174

ke PBB. Pada saat itu Malaysia ditunjuk dan terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Terpilihnya Malaysia itu menyebabkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 9 Januari 1965. Sikap RRC mengenai masalah ini, bahkan memberi acungan jempol pada Indonesia, karena sikap Indonesia itu merupakan perwujudan perjuangan menentang imperialisme dan kolonialisme. Sebaliknya dari dunia internasional sikap Indonesia itu mendapat kecaman dan berakibat terisolir dari pergaulan internasional. Untuk mengatasi masalah itu dikirim delegasi ke Cina dibawah Menlu Subandrio yang berangkat pada tanggal 23 Januari 1965. Hasil perjalanan itu pada tanggal 28 Januari 1965 ditandatangani bersama kesepakatan yang berisi:¹¹⁹

- a. Kedua negara mengutuk Amerika Serikat sebagai pimpinan imperialisme, kolonialisme yang melaksanakan intervensi, subversi, intimidasi dan agresi di Asia, Afrika serta Amerika Latin.
- b. Kedua negara mengutuk kejahatan imperialis Amerika dan Inggris dan menyatakan mendukung rakyat Kamboja, Vietnam serta Laos.
- c. Kedua negara sepakat membantu gerakan anti imperialis secara kesataun menyeluruh.
- d. Indonesia mempertegas perjuangan terhadap Malaysia dan Cina tidak akan tinggal diam jika Inggris atau Amerika

119. Ibid., h.175; periksa Anak Agung..., h.449-450

menyerang Indonesia.

- e. Kedua pihak memutuskan untuk menegaskan kerjasama teknik perluasan perdagangan dan peningkatan transportasi laut ... dan perluasan kontak persahabatan militer.

Meluasnya kerjasama Indonesia-RRC dari waktu ke waktu mencakup ke semua bidang. Hal itu telah menunjukkan semakin tergantungnya Indonesia terhadap RRC, terlebih setelah Indonesia keluar dari PBB. Bantuan yang diberikan Amerika kepada Indonesia dihentikan, menjadikan Indonesia semakin tergantung pada Cina, karena hanya negara itulah yang mau memberikan bantuan kepada Indonesia. Untuk menunjukkan eratnya hubungan Cina-Indonesia, bahkan dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1965 Presiden Soekarno menyatakan eksistensi kekuatan, kehebatan, keutuhan poros Jakarta-Pnompehn-Hanoi-Peking-Pyong Yang (versi Soekarno) Adapun tujuan pembentukan poros itu untuk melawan orde imperialisme-kolonialisme dan mengancurkan pengaruh Barat di Asia. Dengan demikian akan tercipta kawasan bebas imperialisme-kolonialisme di Asia dipimpin RRC dan Indonesia. Selain itu dengan mempererat hubungan kelima negara cita-cita Soekarno untuk mewujudkan "pax Indonesia" seperti pada masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit dapat terwujud. Bantuan dari Cina lama kelamaan akan dilepas dan memunculkan Indonesia sebagai satu pimpinan tunggal. Tetapi cita-cita itu mengalami kegagalan, setelah peristiwa G 30 S PKI terjadi dan

meretakkan hubungan Indonesia-Cina. Penguasa baru memutuskan mengutuk pemberontakan itu sekaligus memutuskan hubungan dengan Cina, karena dianggap sebagai sponsor pemberontakan. Hubungan Cina-Indonesia pun menjadi beku saat itu.

2. Upaya Untuk Mewujudkan Cita-cita Menjadi Satu Kekuatan Dunia

a. Aksi konfrontasi dengan Malaysia

Keinginan Indonesia menjadi pemimpin bangsa-bangsa yang baru merdeka diwujudkan dengan membantu memecahkan masalah yang terjadi di negara tetangganya, Malaysia. Koloni Inggris itu sedang mengupayakan pembentukan satu federasi dengan landasan kepentingan politik¹²⁰ yakni untuk menghadapi gerakan komunis serta untuk mengatasi dominasi Cina keturunan yang ada di wilayah itu dengan menggabungkan Sabah, Brunei, Serawak serta Singapura. Dengan penggabungan itu diharapkan agar partai-partai yang menentukan kebijaksanaan pemerintah nantinya tidak dikuasai golongan minoritas Cina.¹²¹ Pembentukan federasi itu ternyata menimbulkan pro dan kontra. Brunei dan Singapura menolak bergabung karena alasan ekonomi dan politik. Sikap penolakan juga ditunjukkan oleh negara

120. A. Kardiyath Wiharyanto, Reaksi Terhadap Pembentukan Federasi Malaysia (Yogyakarta IKIP Sanata Dharma, 1989) h.43

121. Hidayat Mukmin, TNI Dalam Politik Luar Negeri (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), h.87

tetangga Indonesia dan Philipina karena kepentingan masing-masing. Namun yang akan dikaji lebih jauh adalah sikap Indonesia terhadap pembentukan Malaysia.

Keberhasilan Indonesia dalam perjuangan merebut kembali Irian Barat ternyata membekas di hati Soekarno sekaligus semakin memperdalam sikap anti imperialisme dan kolonialisme. Lewat kaca mata itulah Indonesia memandang pembentukan Federasi Malaysia sebagai suatu proyek nekolim yang didukung oleh Inggris. Terlebih lagi setelah terjadi pemberontakan di Brunei pada tanggal 18 Desember 1962 yang menuntut pembentukan negara Kalimantan Utara dengan wilayah seluruh bekas jajahan Inggris yang dulu pernah menjadi kekuasaan kesultanan Brunei.¹²² Indonesia mendukung gerakan itu. Akibatnya, Indonesia dituduh terlibat dalam pemberontakan itu. Ini berarti memperburuk hubungan kedua negara. Menanggapi tuduhan itu Indonesia dengan tegas mengeluarkan pernyataan resmi menolak pembentukan Federasi Malaysia pada tanggal 8 Januari 1963. Meskipun hubungan kedua negara buruk tetap dilakukan upaya-upaya yang mengarah pada redanya ketegangan antara kedua pihak.

1) Upaya untuk meredakan ketegangan antara Indonesia-Malaysia

Sebagai seorang nasionalis Soekarno tidak rela jika

122. A.K. Wiharyanto, *op.cit.*, h.48

ada negara besar lain di kawasan Asia Tenggara.¹²³ Indonesia ingin menjadi satu-satunya negara yang besar di kawasan ini. Untuk itulah maka segala upaya dilakukan untuk mencegah munculnya saingan di kawasan ini, termasuk dengan penolakan terhadap Federasi Malaysia yang dianggap mengancam kedudukan Indonesia. Akibatnya hubungan kedua negara menjadi tegang.

Meskipun hubungan kedua negara mengalami ketegangan, tetapi upaya untuk perbaikan hubungan terus dilakukan. Pada bulan Mei 1963 Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal bertemu di Manila. Pertemuan itu menghasilkan gagasan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan kepala-kepala pemerintahan. Pada akhir bulan Mei secara rahasia Soekarno dan Tunku Abdul Rahman bertemu di Tokyo untuk mendapatkan kesepakatan bagi kedua pihak. Hasil kesepakatan itu mereka akan mengadakan perjanjian persahabatan dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan nasional dengan semangat keramahtamahan dan dijiwai oleh semangat deklarasi Maphilindo.¹²⁴

Upaya itu dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri tiga negara, PTM yang diwakili Tun Abdul Razak, Pelaez mewakili Philipina, serta Subandrio mewakili Indonesia. Kedua negara, Indonesia dan Philipina menyatakan bahwa mereka menyambut baik pembentukan Federasi

123. Ibid., h.49

124. Ibid.

Malaysia dengan catatan dukungan rakyat di wilayah Kalimantan Utara dipastikan oleh pejabat yang independen dan tidak memihak, yakni Sekjen PBB atau pejabat yang mewakili. Hasil plebisit tidak memuaskan pihak Indonesia. Pada tanggal 14 September pengumuman hasil plebisit menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Sabah dan Sarawak setuju bergabung dengan Federasi Malaysia.¹²⁵ Inggris telah menyetujui pula persyaratan pembentukan Federasi Malaysia yang kesepakatannya diadakan di London tanggal 31 Agustus 1963 oleh Wakil PTM, Singapura dan Sabah.

Tindakan yang ditempuh oleh Inggris dan PTM itu semakin memperkeruh masalah. Walau demikian pertemuan puncak kepala pemerintahan tetap berlangsung pada akhir Juli hingga awal Agustus di Manila. Pertemuan itu menghasilkan Manila Agreement yang pada pokoknya memuat tentang suatu organisasi longgar namun permanen untuk menangani masalah kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan militer terutama di wilayah Asia Tenggara.¹²⁶ Organisasi itu lebih dikenal sebagai Maphilindo.

2) Ketegangan makin memuncak dan pecahnya konfrontasi pihak Indonesia-Malaysia

Hasil Manila Agreement ternyata tidak dapat terlaksana karena semakin tegang hubungan Indonesia-Malaysia.

125. Hidayat Mukmin, op.cit., h.95

126. Hall Kosud, op.cit., h.85

Hasil plebisit di Kalimantan Utara dinyatakan tidak jujur oleh Indonesia. Menurut Sekjen PBB tidak ada keraguan mengenai keinginan mayoritas rakyat Kalimantan Utara untuk bergabung ke dalam Federasi Malaysia. Federasi Malaysia lahir tanggal 16 September 1963 dengan pusat pemerintahan di Kuala Lumpur.

Reaksi yang timbul dari terbentuknya Federasi Malaysia segera bermunculan. Mula-mula pernyataan dan demonstrasi yang beraspek politik dilontarkan. Di Jakarta terjadi demonstrasi yang menyerang kedutaan Malaya dan Inggris, pada tanggal 16 September bertepatan diumumkannya pembentukan Federasi Malaysia. Tindakan pembalasan dilakukan di Kuala Lumpur. Demonstrasi yang terjadi di sana merusak lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika.¹²⁷ Konfrontasi kemudian ditingkatkan ke bidang ekonomi, Buruh Indonesia yang sudah masuk pengaruh PKI melakukan aksi pengambilan alih beberapa perusahaan milik Inggris. Dan untuk mengatasi agar perusahaan-perusahaan itu tidak hancur maka pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan itu. Sebagai puncak konfrontasi ekonomi setelah pada tanggal 21 September Presiden mengeluarkan Surat perintah yang pada pokoknya memerintahkan untuk memutuskan hubungan lalulintas perekonomian dengan daerah-daerah yang menamakan diri "Malaysia" terutama Singapura dan Malaya. Tindak lanjut Surat Perintah

127. Hidayat Mukmin, *op.cit.*, h.96

Presiden itu pemerintah menetapkan Belawan, Makasar dan Tanjung Priok sebagai free trade zone dan pelabuhan Sabang sebagai free port.¹²⁸ Akhirnya hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi terputus dengan ditutupnya kedutaan Indonesia di Malaysia tanggal 17 September 1963. Ditutupnya kedutaan itu berarti hubungan politik dan ekonomi terutama perdagangan menjadi terputus dengan negara itu, dan Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia sudah bertekad untuk mengganyang Malaysia.¹²⁹

Tindakan Soekarno selanjutnya adalah mendukung perjuangan rakyat Kalimantan Utara untuk mewujudkan kebebasan. Untuk itu Presiden Soekarno membentuk pasukan sukarelawan yang bersemboyan 'ganyang Malaysia'. Dan untuk membakar semangat rakyat Soekarno mencetuskan Dwikora dalam pidatonya tanggal 3 Mei di hadapan lebih kurang 1 juta orang. Isi Dwikora itu :

- a) Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
- b) Bantulah perjuangan revolusioner rakyat Malaka, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai untuk memerdekakan diri dan membubarkan Malaysia.

Gerilyawan-gerilyawan diselundupkan lewat perbatasan Kalimantan Indonesia-Kalimantan Malaysia. Kelompok pemberontak dipersenjatai dan dilatih dengan sponsor RRC.

Malaysia yang baru lahir tentunya tidak tinggal

128. Ibid., h.97

129. Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967 (Jakarta : LP3ES, 1986), h.295

diam. Dengan dibantu Inggris, patroli-patroli udara dan laut digalakkan. Tempat-tempat yang diperkirakan sebagai kantong-kantong gerilya ditembaki dan dibersihkan. Patroli Inggris-Malaysia juga berhasil menangkap gerilyawan yang diselundupkan ke Malaysia di Selat Malaka. Melihat itu bukannya Indonesia mereda melainkan semakin antusias membantu pemberontak untuk memenagkan konfrontasi. Akhirnya Malaysia membawa masalah ini ke PBB dengan alasan bahwa Indonesia telah melakukan agresi terhadap urusan dalam negeri Malaysia. Tetapi pendapat itu disangkal oleh pimpinan delegasi Deputi Luar Negeri Sudjarwo Tjokronegoro, bahwa Indonesia tidak berperang dengan Malaysia tetapi dengan kolonialisme.¹³⁰ Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa Malaysia adalah negara kolonial yang diciptakan oleh Inggris untuk mengepung Indonesia.¹³¹

3) Indonesia keluar dari PBB

Masalah Indonesia-Malaysia di PBB mendapat tanggapan pro dan kontra. Pihak kontra meminta agar DK PBB mengeluarkan resolusi pada kedua negara. Isi resolusi itu agar kedua pihak mencegah penggunaan senjata dan menghormati integritas dan kemerdekaan satu sama lain dan menyelesaikan

130. Hall Kosud, op.cit., h.97

131. Ibid.

kan masalah dengan perundingan.¹³² Pihak pro didukung oleh USSR sponsor Indonesia, Cina serta Czechoslovakia.

Tindakan Indonesia dikutuk, dan meminta pada Indonesia untuk menarik bantuannya. Hal ini menambah ketidaksukaan Indonesia. Puncak ketidaksukaan Indonesia terhadap Malaysia mencapai puncak ketika Indonesia menyampaikan pernyataan keluar dari PBB pada tanggal 1 Januari 1965 sebagai sikap protes karena dipilihnya Malaysia anggota tidak tetap DK PBB. Pengunduran diri Indonesia secara resmi diterima oleh Sekjen PBB U Thant tanggal 21 Januari 1965 yang disampaikan oleh Duta Besar Indonesia di PBB Lambertus N. Palar.

Ketidaksetujuan Indonesia dengan terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB dikemukakan Palar pada saat diusulkannya negara itu menjadi calon anggota. Palar mengemukakan alasannya dalam wawancara dengan New York Time tanggal 4 Januari, bahwa kita ingin membuat dunia bersih. Kita harus mempertimbangkan kerusakan yang sedang dilakukan pada kita. Malaysia merupakan manifestasi dari kolonialisme Inggris, sedang pemilihannya dalam DK PBB, yang merupakan badan tertinggi dunia untuk menjamin keamanan negara-negara.¹³³ Bila demikian Malaysia tidak mungkin dipilih menjadi salah satu anggota tidak tetap DK PBB.

132. Ibid., h.98

133. Ibid., h.99

Presiden Soekarno juga menyatakan sikap yang tercermin dalam pidatonya di Jakarta tanggal 31 Desember 1964. Indonesia akan menarik diri dari keanggotaan PBB jikalau Malaysia duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Presiden Soekarno menegaskan kembali sikap itu dalam pidatonya yang lain pada 7 Januari 1965 di Jakarta. Ia menegaskan bahwa jika Malaysia menjadi anggota tidak tetap DK PBB akan saya perintahkan Indonesia keluar dari PBB.¹³⁴ Tindakan selanjutnya pada tanggal 12 Januari Menlu Subandrio memerintahkan perwakilan PBB di Indonesia yang dipimpin Vokyo Pavicic dari Yugoslavia untuk menutup kantor misinya dan menutup semua kegiatan PBB di Indonesia. Indonesia didukung RRC tetap melanjutkan politik konfrontasinya dengan Malaysia sampai nanti muncul pemerintahan Orde baru yang merintis hubungan baik dengan Malaysia.

b. Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok

1) Sejarah singkat Gerakan Non Blok sampai tahun 1965

Dijiwai oleh suksesnya Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, yang mampu memunculkan dan melahirkan semangat dan negara-negara baru di Asia-Afrika Gerakan Non Blok dicetuskan. Ide ini muncul setelah pada tanggal 14 Desember 1957 PBB menerima resolusi tentang hubungan bertetangga baik dan damai antar bangsa-bangsa. Prinsip

134) Ibid.

itu nantinya menjadi salah satu tiang penyangga Gerakan Non Blok.

Ide pembentukan Gerakan Non Blok ini berasal dari Tito Presiden Yugoslavia. Setelah diterimanya hubungan bertetangga baik dan damai antar bangsa-bangsa diterima PBB Yugoslavia segera melepaskan diri dari pengaruh USSR dan memutuskan untuk bersikap non alignment dalam melaksanakan politik luar negerinya. Tito berkunjung ke Mesir. Dalam kunjungan itu ia menyatakan idenya apakah tidak mungkin bila negara-negara non alignment berkumpul dan membicarakan masalah-masalah dunia dengan membentuk suatu kelompok di luar non blok yang saling bertentangan.¹³⁵ Tidaklah mungkin melaksanakan KAA II karena peta politik dan suhu pertentangan kedua blok meningkat. Ide yang dilontarkan itu mendapat sambutan hangat dari Presiden Mesir, Nasser.

Kesepakatan antara dua kepala negara itu kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat kepada Nehru dan mengajaknya untuk bergabung sebagai negara sponsor. Akan tetapi Nehru bersikap acuh tak acuh serta beranggapan bahwa pertemuan itu sia-sia dan ada kemungkinan akan memperuncing pertentangan antara kedua blok. Berulang kali Nasser dan Tito berusaha meyakinkan Nehru, akan tetapi tanggapannya tetap. Akhirnya Tito dan Nasser memutuskan untuk menjadi negara sponsor. Namun diputuskan untuk

135) Anak Agung Gde Agung, Op.Cit., h.318



mengajak Soekarno menjadi salah satu pendukung.

Presiden Soekarno dengan antusias menerima ajakan Nasser dan Tito, karena seolah-olah mendapat jalan untuk mencapai tujuannya. Hal ini nampak dalam pidatonya di depan Sidang Umum PBB tanggal 30 September 1960 yang dikenal dengan judul "Membangun Dunia Baru". Ia mengungkapkan bahwa politik konfrontasi harus dilaksanakan oleh negara-negara baru merdeka terhadap negara-negara yang telah mapan, dimana konfrontasi ini bertujuan untuk membebaskan dunia dari eksploitasi bangsa terhadap bangsa lain.¹³⁶ Maka dari itu tepatlah bila Soekarno diajak menjadi salah satu negara sponsor terselenggaranya konferensi itu.

Ketiga tokoh itu sepakat untuk mengadakan konferensi pendahuluan yang akan diadakan di Kairo. Dari hasil konferensi pendahuluan itu dirumuskan hal-hal yang akan dibicarakan pada konferensi mendatang, tempat penyelenggaraan, undangan yang akan ditandatangani oleh ketiga negara pengundang, dan disepakati pula kriteria negara yang dinundang harus memenuhi syarat¹³⁷ sebagai berikut :

- a) Melaksanakan politik bebas berdasarkan koeksistensi damai;
- b) Tidak termasuk aliansi kekuatan militer di dalam konflik negara adikuasa;

136. Ibid., h.134

137. Ibid., h.323

- c) Secara konsisten mendukung gerakan kemerdekaan;
- d) Bila telah mengizinkan basis militer harus dibuat dalam kaitan pertikaian negara adikuasa;
- e) Bila memiliki bentuk-bentuk organisasi pertahanan bilateral atau harus bukan merupakan bagian dari rangkaian konflik-konflik negara adikuasa.

Tempat penyelenggaraan ditentukan di Beograd, Yugoslavia, dari tanggal 1 sampai 6 September 1961. Juga disepakati tujuan kemerdekaan dan perdamaian. Ia adalah suatu gerakan dinamis yang memobilisasi jiwa nasionalisme dan patriotisme bangsa-bangsa yang ingin mencegah perang dingin kedua negara super power yang sangat berbahaya itu.¹³⁸ Gerakan Non Blok juga dimaksudkan sebagai kelanjutan dari emansipasi bangsa-bangsa yang dulu menjadi korban politik terjajah untuk terus membebaskan dirinya dari sisa-sisa belenggu penjajahan ekonomi dan kultural yang kini terasa sekali.¹³⁹

- a) Konperensi Beograd tanggal 1 sampai 6 September 1961

Dari undangan yang disebarkan pada bangsa-bangsa di Asia, Afrika serta Amerika Latin, hanya 25 negara yang menyatakan untuk datang dan 3 negara Amerika Latin mengirimkan peninjau. Kedua puluh lima negara itu adalah Afganistan, Algeria, Burma, Kamboja, Ceylon, Congo,

138) Roeslan Abdulgani, Indonesia Menatap Masa Depan, (Jakarta : Pustaka Merdeka, 1987), h.329

139) Ibid., h.428

Cyprus, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Libanon, Mali, Maroko, Nepal, Saudi Arabia, Sudan, Tunisia, Uni Republik Arab, Yaman, Yugoslavia. Dan ketiga negara peninjau ialah Bolivia, Brasil dan Equador.¹⁴⁰

Konperensi Beograd juga memunculkan tokoh-tokoh baru yang sebelumnya, pada KAA di Bandung belum muncul, disamping tokoh laama seperti Nehru, Nasser dari Mesir, bila di Bandung hanya berperan sebagai pendengar saja, di Beograd ia berperan sebagai salah satu pendukung utama konferensi. Sosok Nasser tampil memikat sebagai seorang diplomat dan negarawan yang patut didengar. Ghana ketika di Bandung bukanlah satu negara merdeka. Di Beograd negara itu tampil sebagai negara merdeka di bawah pimpinan Nkrumah yang mampu membawa Afrika sebagai negara yang patut diperhitungkan. Pangeran Sihanouk dari Kamboja, bila dulu di Bandung hanya sebagai pendengar, di Beograd ia mampu tampil sebagai seorang negarawan yang membuat kerajaannya yang kecil didengar oleh dunia. Presiden Tito dari Yugoslavia, wakil negara komunis Eropa yang keluar dari pengaruh USSR. Terakhir adalah Soekarno dari Indonesia. di Beograd ia tampil beda dengan ketika di Bandung. Ia tampil sebagai seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan atau sebagai satu-satunya orang terkuat di negeri ini. Ia muncul ke Beograd untuk menjadi pemimpin bangsa-bangsa non alignment dan ingin

140) Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, h.324

mencapai tujuan politik luar negerinya yang telah tergambar dalam pidatonya yang berjudul "Membangun Dunia Baru".

Sesuai dengan tujuan gerakan ini yang ingin mengengahi perang dingin, maka acara konferensi itu dicoba diarahkan pada tujuan itu. Masalah-masalah dunia saat itu dicoba dipecahkan bersama-sama. Akan tetapi gerakan ini terbagi menjadi dua kelompok karena perbedaan pendapat dalam cara pengatasannya. Kelompok pertama dipimpin Nehru, menginginkan cara moderat dalam mengatasi masalah, sedang kelompok kedua dipimpin Soekarno memilih cara yang lebih radikal dan militan.

Kelompok pertama yang mendukung kebanyakan negara Asia ditambah Maroko, Ethiopia dan Cyprus menginginkan agar konferensi secara realistik melihat dan mengatasi masalah yang sedang dihadapi seperti pengurangan ketegangan dunia dan perlombaan senjata.¹⁴¹ Karena hal itu amat perlu untuk mempertahankan dan mencapai situasi damai bagi dunia. Sedang kelompok kedua yang tergabung dalam kelompok Casablanka menyerukan semangat anti barat, anti kolonialisme. Negara-negara non alignment merupakan manifestasi kekuatan baru harus menentang dominasi negara oldefo yang bersifat imperialistis dan kolonialistis. Jikalau imperialistis dan kolonialistis tetap ada maka

141) Fernandez, *op.cit.*, h.166

perdamaian tidak akan terwujud.¹⁴²

Walaupun terjadi perbedaan pendapat namun dicapai kesepakatan yang merupakan hasil konferensi dan ditujukan pada negara adikuasa yang isinya :¹⁴³

- 1) pernyataan mengenai bahaya perang dan tuntutan akan perdamaian;
- 2) pernyataan negara-negara non blok yang menyangkut masalah dunia seperti kolonialisme, hubungan internasional, posisi PBB, masalah Jerman, perlucutan senjata dan berbagai isu perang dingin.

Konferensi juga menunjuk wakil negara non blok untuk menyampaikan hasil-hasil kepada pimpinan Amerika dan USSR. Presiden Soekarno dan Presiden Kaita (Mali) ke Amerika Serikat, sedang Presiden Nkrumah dan PM Nehru ke USSR.

b. Konferensi Kairo 1964

Konferensi ini merupakan kelanjutan konferensi Beograd. Seperti konferensi sebelumnya, konferensi diawali dengan konferensi pendahuluan yang diadakan di Srilanka. Pemrakarsa konferensi pendahuluan adalah Nasser dan Bandaranaike. Masalah yang akan dibahas dalam konferensi kedua telah dirumuskan dalam konferensi pendahuluan yang menyangkut masalah umum dunia.

142) Ibid., h.167

143) Ibid.

Konperensi yang dihadiri oleh 47 negara anggota dan 10 negara peninjau berlangsung di Kairo dari tanggal 5-10 Oktober 1964. Ke-47 negara itu adalah Afganistan, Aljasair, Angola, Burma, Burundi, Kamboja, Kamerun, Srilanka, Republik Afrika Tengah, Chad, Congo, Cyprus, Ethiopia, Dahoney, Kuba, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Mauritania, Yordania, Kenya, Kuwait, Laos, Libanon, Malawi, Mali, Maroko, Libia, Nepal, Nigeria, Arab Saudi, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Syria, Togo, Tunisia, Uganda, Republik Persatuan Arab, Yaman, Yanganyika, Zanzibar, Yugoslavia serta Zambia. Kesepuluh negara peninjau adalah Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Finlandia, Yamaica, Mexico, Trinidad-Tobago, Uruguay dan Venezuela.¹⁴⁴

Satu hal yang menarik dari konperensi Kairo adalah semakin tajamnya perbedaan pendapat antara dengan an India. Walaupun Nehru telah meninggal, tetapi penggantinya, Shastri, tetap melanjutkan kebijaksanaan pendahulunya. Perbedaan juga terjadi mengenai konsep prioritas pencurahan pikiran pada perjuangan melawan penjajah atau pada peaceful-coexintence.¹⁴⁵

Presiden Soekarno menyatakan bahwa imperialisme dan kolonialisme belum berakhir. Bahkan imperialisme dan kolonialisme bekerja sama untuk kepentingan sendiri dalam

144) Ibid., h.169

145) Suli Suleman, op.cit., h.18

berbagai bentuk seperti invasi, subversi, manipulasi. Hal itu berarti yang beruntung adalah kekuatan-kekuatan yang telah mapan. Oleh karena itu imperialisme dan kolonialisme harus dihadapi dengan konfrontasi yang didukung solidaritas bangsa-bangsa yang tergabung dalam Gerakan Non Blok. Melalui solidaritas itu akan dicapai kekuatan dan dengan perimbangan kekuatan itu akan dicapai koeksistensi damai.

Konperensi di Kairo ini juga menampakkan peran Cina terhadap Indonesia. Indonesia berupaya mensukseskan politik luar negerinya dengan konsepsi dan tujuan politik Cina. Konsep The Emerging Forces yang dilemparkan pada konperensi oleh Presiden Soekarno sebagai salah satu upayanya. Dengan menghimpun kekuatan menjadi The New Emerging Forces, Indonesia dan Cina akan terdorong keinginannya untuk menghilangkan pengaruh Barat dari Asia umumnya dan Asia Tenggara khususnya. Jika berhasil maka Cina dan Indonesia akan tampil sebagai negara pemimpin di kawasan itu.

Ada dua bagian yang menarik dari konperensi Kairo, disamping soal-soal politik yang telah tercantum sebagai hasil konperensi Beograd, yakni :

- 1) Satu bagian khusus mengenai PBB dan peranannya dalam persoalan internasional, pelaksanaan keputusannya dan perubahan piagamnya.

- 2) Satu bagian mengenai perkembangan dan kerjasama ekonomi antara negara-negara non alignment.¹⁴⁶

c. Keinginan Indonesia menjadi pemimpin negara-negara

Munculnya Soekarno menjadi orang terkuat di Indonesia membawa warna tersendiri bagi kebijakan politik luar negerinya. Ketika ia berpidato di depan Sidang Umum PBB telah tersampaikan keinginannya untuk menjadi pemimpin satu kekuatan bangsa-bangsa baru merdeka yang berdasarkan semangat nasionalisme :

"...we must not cease from struggle at this moment when victory is in sight, but instead we must redouble our effort. We have a pledge to the future and that pledge must be fullfilled. In this, we do not struggle for ourselves alone, but we struggle for mankind, yes, our struggle is even for those againts whom the struggle.

Build the new world, built it solit and strong and sane. Build that world in which all nations exist in peace and brrotherhood. Build the world fit for dreams and deals of humanity ourselves with the future.¹⁴⁷

Sebelum dikaji lebih jauh, akan ditinjau secara singkat pandangan Soekarno sehingga memunculkan Soekarno yang bersifat konfrontatif. "Soekarno adalah campuran isme-isme nasionalis, Islam tetapi sekaligus juga Marxis."¹⁴⁸ Dengan menggunakan kepandaiannya mengolah gagasan pemikirannya ditunjang kemampuan berpidatonya sangat menarik perhatian para pengikutnya. Pandangan-

146) Ibid., h.19

147) Ibid.

148) Legge, op.cit., h.329

pandangannya yang tidak pernah lepas dari garis politiknya adalah semangat nasionalisme anti Barat, yang selalu disesuaikan dengan keadaan dan situasi di sekitarnya. Modal inilah yang dimilikinya untuk menghimpun kekuatan dan memberi bentuk dan corak di dalam pelaksanaan politik luar negerinya.

Pada setiap penampilannya ia selalu mengemukakan hal itu. Seperti ketika berpidato dalam pertemuan reguler MU PBB tahun 1960, ia mengemukakan bahwa ketegangan internasional yang semakin mengakar disebabkan antagonisme yang berakar pula pada negara besar. Imperialisme dan kolonialisme dan berlanjutnya kekuatan memecah belah bangsa-bangsa -saya tekankan kata-kata itu- adalah akar hampir semua kejahatan internasional dan ancaman kita ini. Selama kejahatan-kejahatan yang dibenci pada masa lalu itu belum berakhir, tak akan ada ketenangan dan perdamaian di seluruh dunia.¹⁴⁹ Juga dalam kesempatan konperensi negara-negara non blok di Beograd tahun 1961, pandangannya mengenai anti imperialisme jelas terungkap dari penafsirannya mengenai sistem internasional :

"...pendapat dunia yang ada dewasa ini membuat kita percaya bahwa sumber ketegangan dan perselisihan internasional yang sesungguhnya ialah konflik ideologi antara negara-negara adikuasa. Saya kira hal itu tidak benar. Ada konflik yang menembus lebih dalam raga manusia, yaitu konflik antara kekuatan yang baru lahir bagi kemerdekaan dan keadilan dan kekuatan dominan yang lama, yang satu mendorong

149) Michael Leifer, Politik Luar Negeri Indonesia, (Jakarta : Penerbit PT Gramedia, 1986), h.84

kepalanya tanpa belas kasih melalui lapisan bumi yang telah memberinya darah kehidupan, sedangkan yang lain berjuang tanpa lelah untuk mempertahankan semua yang ia dapat coba untuk menahan jalan Sejarah.¹⁵⁰

Dari situlah, maka Soekarno membagi dunia ini menjadi dua kekuatan yakni kekuatan baru (NEFO) dan kekuatan lama yang sudah mapan (OLDDEFO). Yang pertama dilukiskan terdiri atas bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin, negara sosialis, serta kelompok progresif di negara kapitalis. Sedang kedua adalah negara-negara yang mempunyai tanah jajahan dan menguasai perekonomian dunia karena memang sudah kuat ekonominya.¹⁵¹ Untuk membangun satu dunia baru, Indonesia sebagai anggota kelompok kekuatan progresif dinamis ditugasi oleh sejarah untuk melawan dan mengacaukan kekuatan penindasan dan eksploitasi reaksioner.¹⁵² Indonesia juga berkewajiban untuk memimpin bangsa-bangsa yang baru bangkit untuk bersatu padu menghilangkan kungkungan kekuatan yang sudah mapan dan berakar, sehingga akan tercapai dunia damai. Tidaklah mungkin jika kekuatan-kekuatan yang baru bangkit tidak bersatu akan memperoleh kekuatan penuh untuk menandingi kekuatan-kekuatan yang sudah mapan.

Langkah-langkah diupayakan untuk mewujudkan keinginan menjadi pimpinan bangsa-bangsa ketiga. Ajakan

150) Ibid., h.85

151) Ibid., h.86; periksa Bernhard Dahm op.cit., h.206

152) Ibid.

Nasser untuk menjadi negara sponsor bagi konperensi Gerakan Non Blok disambut dengan antusias, karena ia memandang lewat konperensi ini ia akan muncul sebagai satu pemimpin dunia. Cina dalam hal ini selalu mendukung baik moril ataupun materiil yang menambah semangat Soekarno. Tindakan Soekarno itu juga didukung oleh Menlu Subandrio yang ikut pula mewarnai politik luar negeri Indonesia. Kunjungan Subandrio ke Peking menghasilkan pernyataan kerjasama yang pada intinya bahwa Indonesia dan Cina bekerjasama di dalam perjuangan sekarang ini dimana berada di satu pihak kekuatan imperialis, wakil dari dominasi Oldefo, eksploitasi, kesewenang-wenangan serta agresi dan di lain pihak anti imperialis progresif dan kekuatan revolusioner menjadi new emerging forces di dunia sekarang ini.¹⁵³ Dari pernyataan itu, nampak dukungan Cina terhadap ide pembentukan Nefo oleh Indonesia dan mendukung semua kegiatan Indonesia yang mengarah kesitu, termasuk ketika Indonesia menyelenggarakan Ganefo, suatu pertandingan olah raga yang hanya diikuti oleh negara-negara yang tergabung dalam Nefo.

Ide diadakannya Ganefo bermula dari kritikan IOC (International Olympic Committee) terhadap penolakan Jakarta yang menjadi tuan rumah Asian Games keempat terhadap partisipasi Taiwan dan Israel tahun 1962. Sebagai reaksi terhadap kritikan itu, Indonesia keluar

153) Seldom, op.cit., h.49

dari keanggotaan IOC. Alasan yang dikemukakannya, kalau lembaga itu telah didominasi oleh Amerika Serikat yang merupakan kekuatan neokolonial bersama sekutu. Untuk itu Indonesia berkeinginan untuk membentuk lembaga keolahragaan yang bebas dari dominasi Amerika dan sekutunya, yang merupakan wadah tandingan yang bisa mempersatukan seluruh kekuatan Nefo. Lewat Ganefo juga membuktikan pada dunia bahwa angin timur sedang berhembus lebih kuat daripada angin barat.¹⁵⁴ Indonesia tidak dapat memisahkan politik dari semua aspek kehidupannya, termasuk juga dibidang olahraga. Menurut Subandrio olahraga tidak dapat dipisahkan dari politik, bahkan bekerja pada asosiasi keolahragaanpun dengan dasar politikmari kita menciptakan suatu lembaga keolahragaan dengan dasar new emerging forces.¹⁵⁵ Presiden SOekarno menyatakan hal yang sama dalam konperensi pendahuluan Ganefo, bahwa pertandingan olimpiade internasional telah terbukti sebagai alat imperialisme ...saya merencanakan untuk berterusterang, sekarang, bahwa olah raga bisa berkaitan dengan politik. Indonesia merencanakan untuk mencampurkan olah raga dan politik dan cepat-cepat kita membentuk pertandingan Nefo, Ganefo ...melawan Oldefo.¹⁵⁶

Ganefo diselenggarakan dengan meriah serta menarik

154) Ibid., h.51

155) Ibid., h.57

156) Anak Agung Gde Agung, op.cit., h.435

perhatian dunia seperti yang diinginkan Soekarno. Dihadiri oleh 51 negara. Pendukung utama kegiatan ini adalah Cina baik atlet ataupun dana penyelenggaraan Ganefo. Keseluruhan kegiatan ini diwarnai dengan tema dan slogan anti imperialisme dan kolonialisme. Slogannya yang terkenal adalah 'onward no retreat'.

Tujuan penyelenggaraan Ganefo yang telah disepakati partisipan dari Asia, Afrika serta Amerika Latin ingin mewujudkan :

- a) Ganefo dirancang untuk menghalangi dominasi Amerika di IOC;
- b) Ganefo adalah tahap progresif sepanjang jalan solidaritas Asia, Afrika, Amerika Latin yang muncul dari semangat Bandung;
- c) CPR mempersatukan diri dengan perjuangan bersama dari seluruh bangsa-bangsa baru muncul untuk mengembangkan kebijaksanaan olahraga nasional dengan dasar, yang akan menyebabkan mereka terhindar dari kontrol Barat di dalam organisasi olah raga internasional.

Disepakati pula pelaksanaan Ganefo 4 tahun sekali.

Setelah pernyataan keluarnya Indonesia dari PBB diumumkan pada tanggal 9 Januari sebagai protes melawan pemilihan Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Soekarno mencetuskan ide untuk membentuk Conefo. Ia memimpikan Conefo sebagai PBB kedua yang beranggotakan wakil-wakil yang tergabung dalam Nefo dengan pusat di Jakarta. Sambutan hangat mula-mula datang dari Cina dan

menjanjikan bantuan dana untuk melaksanakan ide tersebut. Seperti juga Indonesia, RRC menuduh bahwa PBB telah pula didominasi oleh kaum imperialis dan tidak lagi suatu lembaga yang menjamin perdamaian dunia. Untuk itu kedua negara membuat pernyataan bersama-sama yang masing-masing diwakili oleh Chen in dan Subandrio bahwa PBB harus diorganisir kembali. Suatu organisasi revolusioner sebagai rival akan segera dibentuk.¹⁵⁷ Tentunya lembaga itu adalah Conefo yang direncanakan diselenggarakan tahun 1966. Rencana itu tinggal rencana setelah orde baru berkiprah usai pemberontakan PKI yang gagal. Ambisi Soekarno untuk mewujudkan kembali masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit pun mengalami kegagalan.

Kiprah Indonesia di luar negeri amatlah mengesankan. Sebagai satu negara berkembang yang baru lahir berkeinginan untuk mewujudkan suatu kekuatan ketiga di luar kedua kekuatan yang ada. Keinginan untuk memimpin kekuatan ketiga itu diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh Indonesia. Hal itu didukung oleh politik luar negeri bebas aktif. Sedemikian aktifnya Indonesia mewujudkan cita-cita dan ambisinya sehingga menghalalkan segala cara. Maka dari itu apakah Indonesia tetap setia melaksanakan politik luar negeri bebas aktif ataukah telah menyimpang ? Inilah yang akan dikaji lebih jauh dalam berikut.

157) Sheldom, *op.cit.*, h.53

A. Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Politik Konfrontatif (Politik Anti Imperialisme dan Anti Kolonialisme)

Soekarno muncul sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan di Indonesia. Keadaan itu ternyata membawa corak tersendiri dalam pemerintahannya, termasuk dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Demokrasi Terpimpin ia pakai untuk memusatkan kekuasaan dengan didukung dua kekuatan lain membentuk piramida kekuasaan di Indonesia. Sebagai penguasa tunggal, watak serta pribadi Soekarno ikut mewarnai kebijaksanaan yang ditempuhnya. Seperti ungkapan Michael Leiffer bahwa selama Demokrasi Terpimpin kebijaksanaan luar negeri Indonesia bergaung keras dan tegar mencerminkan temperamen Soekarno, dan sifat hingar-bingar politik luar negeri.¹⁵⁸

Salah satu pandangan mengenai kebenciannya terhadap kaum imperialis dan kolonialis sejak dulu (masa mudanya) sangat mengesankan Soekarno. Segala manifestasi dari imperialisme dan kolonialisme ditolaknyaa dan diupayakan untuk menghancurkannya. Pengalamannya memperjuangkan kemerdekaan republik ini dengan gigih, menambah fanatisme pandangannya. Ketertarikannya terhadap marxisme ikut menambah luas cakrawala politiknya. Kepandaiannya berpidato dan mencari slogan-slogan mampu mengajak simpatisan-simpatisan untuk mendukungnya dan bahkan sangat fanatik terhadapnya cenderung untuk militan.

158) Michael Leiffer, *op.cit.*, h.87

Kemampuan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ambisi dan fanatisme itu menarik perhatian RRC untuk menjadikannya sebagai partner untuk mewujudkan cita-citanya. Keakraban dengan RRC sangat berpengaruh terhadap politik luar negeri Indonesia yang memunculkan politik konfrontasi.

Prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif sebenarnya kesamaan derajat serta mengarah kepada kepentingan nasional yang tidak bertentangan dengan kepribadian Indonesia yakni Pancasila. Sebaliknya Soekarno dengan perlahan-lahan membawa Indonesia keluar dari rel sebenarnya. Ide membagi dunia menjadi dua kekuatan yang saling bertentangan, yakni Nefos dan Oldefos, menyebabkan dunia tidak damai. Soekarno dalam pidatonya yang berjudul "Membangun Dunia Baru" menghimbau dan mengajak negara-negara yang termasuk dalam Nefos untuk melakukan konfrontasi. Sebagai sasaran, kaum imperialis dan kolonialis dengan berlandaskan pada semangat anti imperialisme dan kolonialisme. Sekilas pandangan Soekarno mengenai anti imperialisme dan kolonialisme ini memang benar. Memang bukti sudah menunjukkan, kalau imperialisme dan kolonialisme telah memakan korban dari negara-negara yang baru bangkit atau lebih dikenal sebagai dunia ketiga. Akan tetapi anjuran Soekarno untuk melakukan konfrontasi menyeluruh ini sebenarnya tidak sejalan dengan jiwa politik luar negeri bebas aktif yang menghendaki Indonesia selalu mengarah pada perdamaian.

Upaya-upaya untuk mencapai perdamaian abadi digalakkan bahkan PBB dengan gigih memperjuangkan agar kedua blok yang saling bertentangan melakukan perundingan-perundingan untuk mencapai kesepakatan damai. Akan tetapi Soekarno bahkan menganjurkan konfrontasi dalam segala bentuk.

Politik konfrontasi ini diilhami oleh teori dialektika komunis. Di dalam ajaran komunis, untuk mencapai negara komunis dikenal adanya pertentangan-pertentangan antara tingkatan masyarakat. Ajaran komunis juga telah berhasil menggerakkan suatu tingkatan terendah dalam negara untuk melenyapkan penindasan dan pengisapan oleh sistem imperialisme dan telah berhasil menjelmakan gerakannya dengan merebut kekuasaan serta mendirikan organisasi perjuangan dalam wujud negara.¹⁵⁹ Diilhami oleh dialektika komunis itulah Soekarno mencetuskan ide membagi dunia menjadi dua kekuatan, dan kekuatan Nefos harus menghancurkan kekuatan Oldefos bila ingin mewujudkan dunia damai.

Garis politik luar negeri Indonesia yang dicanangkan saat itu bertentangan dengan rel politik bebas aktif. Sifat konfrontatif yang terkandung dalam politik luar negeri saat itu menghendaki benturan-benturan untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik bebas aktif menghendaki penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat.

159) Chaerul Saleh, Proklamasi 17 Agustus 1965 : Ledakan Penjelmaan New Emerging Forces (1964), h.41

Pancasila juga menyiratkan anti kekerasan dan sangat menghargai nilai kemanusiaan. Imperialisme dan kolonialisme yang berkembang sangat ditentang, karena dalam pengertian itu tercakup kekerasan dan penghisapan manusia atas manusia lain. Dipilihnya sifat konfrontatif dalam kebijaksanaan luar negeri Indonesia tidak lepas dari situasi dalam negeri.

Situasi dalam negeri pasca demokrasi parlementer tidak jauh dari keadaan sebelumnya. Persaingan antara PKI dan AD yang merebut pengaruh untuk mendapatkan kekuasaan yang berlangsung cukup serius. Masing-masing pihak saling berlomba memberikan simpati pada setiap tindakan presiden, sehingga kedudukan mereka di mata presiden terus meningkat. Pada akhirnya presidenlah yang menentukan pilihannya, peluang-peluang banyak diberikan pada PKI. PKI senantiasa bersikap mengiyakan kebijakan presiden, bahkan dengan kekuatan massa yang dimiliki menjadi pendukung utama presiden, termasuk pencetus politik konfrontasi. Sikap dan petualangan Indonesia di luar negeri yang agresif militan sebenarnya sangat menguntungkan pihak PKI serta sejalan dengan rel perjuangan revolusioner yang dianutnya. Bila kebijaksanaan pemerintah hanya dipusatkan pada sikap agresif militannya di luar negeri, dengan melakukan berbagai macam konfrontasi, tentunya kesejahteraan rakyat akan terabaikan, serta suhu politik akan terus meningkat, karena adanya pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap

kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah itu. Situasi dan kondisi itu sangat memudahkan bagi PKI untuk memperkokoh basisnya dan menunggu saat yang tepat untuk muncul sebagai penguasa. Mula-mula AD bersikap sama, akan tetapi kemudian bersikap mendua karena melihat dan menyadari bahwa politik konfrontasi yang dipilih itu kabur dan tidak menghasilkan apa-apa, bahkan cenderung merugikan kepentingan nasional, seperti Indonesia harus kehilangan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat akibat pelaksanaan politik konfrontasi terhadap Malaysia.

Keberhasilan mendapatkan kembali Irian Barat dari tangan Belanda sangat membekas. Ketika Federasi Malaysia akan dibentuk, Indonesia melancarkan politik konfrontasinya, setelah sebelumnya Indonesia bersikap setuju. Hal itu dipandang perlu oleh presiden karena melihat semangat revolusioner mulai memudar dan untuk mengalihkan pandangan dunia terhadap keadaan ekonomi Indonesia yang sangat memprihatinkan. Legge mengungkapkan Indonesia tetap memerlukan suatu peristiwa hangat yang serupa dengan masalah Irian jika sudah selesai untuk menimbulkan semangat revolusioner bangsa.¹⁶⁰

Dipilihnya Malaysia sebagai sasaran politik konfrontasi RI menurut Mackie berdasarkan empat hal. Pertama, Malaysia merupakan bentukan kaum imperialis dan kolonialis baru, terbukti yang menjadi sponsor utama

160) John D. Legge, op.cit., h.414

adalah Inggris. Kedua, Malaysia adalah ancaman bagi keamanan Indonesia. Ketiga, karena Inggris adalah sponsor utama kemerdekaan Malaysia maka secara historis Malaysia akan senantiasa tergantung pada Inggris, hal ini berarti membahayakan Indonesia. Keempat pelanggaran terhadap hasil Manila Agreement.¹⁶¹

Pengertian konfrontasi yang dilancarkan terhadap Malaysia itu sebenarnya kabur. Indonesia yang mula-mula bersikap netral terhadap pembentukan Malaysia kemudian menjadi berbalik menentangnya. Selain itu bila dipandang dari etnis, kebudayaan maka tidak tepatlah bila Indonesia melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia. Kedua sama-sama rumpun bangsa Melayu, mayoritas penduduknya pun beragama Islam akan tetapi keputusan untuk berkonfrontasi dengan Malaysia tetap didukung walaupun tidak seperti mendukung perjuangan Irian Barat.

Menurut Presiden Soekarno, Malaysia merupakan hasil bentukan nekolonialis Persekutuan Tanah Melayu yang didukung oleh Inggris. Dalam pandangan Soekarno juga nampak jikalau dalam Malaysia ada unsur pemaksaan, penindasan. Korbannya adalah rakyat di Kalimantan Utara. Pemberontakan di bawah pimpinan Azahari membuktikan, bahwa rakyat di wilayah itu menolak untuk bergabung karena melihat adanya unsur pemaksaan dan penindasan.

¹⁶¹) J.A.C. Mackie, Konfrontation : The Indonesia - Malaysia dispute 1963-1966, (Kuala Lumpur, 1974), h.202 - 208.

Indonesia mendukung gerakan pembebasan itu dan tidak menyetujui pembentukan Malaysia. Sementara di dalam negeri PKI terus mendesak presiden agar memberikan bantuan militer kepada rakyat di Kalimantan Utara yang sebenarnya komunis juga. Walaupun PBB telah melaksanakan plebisit di daerah itu, akan tetapi hasilnya tidak memuaskan pihak Indonesia. Indonesia tetap memberikan bantuan kepada kaum pemberontak, dengan latihan-latihan militer. Cara yang ditempuh pihak Indonesia dengan membantu pejuang-pejuang Kalimantan Utara bisa dikatakan kalau Indonesia telah memasuki urusan dalam negeri Malaysia. Sikap Indonesia itu seakan-akan mencari permusuhan dengan pihak Malaysia.

Sikap anti imperialisme dan anti kolonialisme yang sebenarnya menjadi salah satu jiwa politik luar negeri bebas aktif dalam pelaksanaannya diubah menjadi politik luar negeri agresif militer. Sikap anti imperialisme dan kolonialisme yang menggebu-gebu telah "membutakan" pandangan Presiden Soekarno, sehingga tidak ada jalan lain untuk menghancurkan kaum imperialis dan kolonialis kecuali dengan berkonfrontasi di segala bidang. Sikap agresi militer dari politik luar negeri masa itu sangat bertentangan dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia Pancasila. Sila kedua Pancasila khususnya menghendaki adanya persamaan hak dan juga menghendaki penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Sedangkan dalam konfrontasi mengandung pengertian kekerasan.

Tujuan konfrontasi terhadap Malaysia sangat kabur. Apakah merupakan perwujudan dari semangat anti imperialisme dan kolonialisme ataukah ada motif lain? Soekarno dalam kebijaksanaannya terhadap masalah Malaysia bersikap silih berganti kadang keras atau kadang lunak. Tujuan diplomasi yang mencolok itu pada hakikatnya bukanlah tujuan yang sebenarnya. Kelihatannya, yang penting bukan hanya tujuan yang dicapai lewat perundingan, ancaman atau akhirnya konfrontasi itu sendiri, tetapi sesuatu di atas masalah Malaysia itu sendiri. Fungsi masalah Malaysia ialah agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia. Ringkasnya, politik konfrontasi akhirnya dijalankan bukan hanya karena Tengku Abdul Rahman tidak bijaksana atau karena sebaliknya Soekarno tidak mendapat cukup keuntungan diplomatik untuk memuaskan jiwanya mengenai tuntutan diri dan bangsanya akan kepemimpinan di kawasan itu, tetapi juga karena prinsip politik luar negeri Soekarno adalah perluasan politik dalam negerinya.¹⁶²

Kedadaan dalam negeri yang sedikit banyak telah terjadi pergeseran pengaruh, dari AD ke PKI yang banyak mendapat dukungan dari presiden, termasuk kebijaksanaannya mengenai konfrontasi. Presiden Soekarno sedikit banyak membutuhkan konfrontasi itu untuk menyatukan

162) John D. Legge, *op.cit.*, h.427

seluruh kekuatan bangsa.¹⁶³ Dengan semua pandangan dipusatkan pada masalah Malaysia maka persaingan antara kekuatan (AD dan PKI) dapat terhindarkan.

Dengan demikian sikap anti imperialisme dan kolonialisme yang fanatik telah "membutakan" pandangan Presiden Soekarno. Hal itu berakibat buruk dalam perkembangan politik luar negerinya yang merupakan gambaran politik dalam negeri. Dipilihnya sifat konfrontatif dalam politik luar negerinya mengaburkan pandangan dan sikap anti imperialisme dan anti kolonialisme itu sendiri, karena yang nampak adalah sifat imperialistis. Hal itu jelas bertentangan dan tidak dikehendaki oleh Pancasila yang mengakui persamaan derajat dan menghendaki agar dikembangkan persahabatan seluas-luasnya untuk mencapai kebutuhan nasional. Pancasila juga menghendaki semua masalah diselesaikan dengan diplomasi tanpa kekerasan atau lewat perundingan untuk mencapai mufakat. Lalu bagaimanakah sikap konfrontatif politik luar negeri Indonesia ini ditunjukkan pada Gerakan Non Blok serta PBB ?

B. Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Gerakan Non Blok

Petualangan Indonesia tidak hanya berhenti pada konfrontasi dengan Malaysia. Terhadap Gerakan Non Blok pun yang seyogyanya dapat dipergunakan Indonesia melakukan dan mengembangkan politik luar negeri bebas aktif

163) Ibid.

sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa dipakai sebagai ajang politik konfrontatif. Awalnya Indonesia patut mendapat acungan jempol. Indonesia berhasil menyelenggarakan KAA Bandung yang berkesan bagi dunia, pengalaman itu mendorong Indonesia untuk tampil sebagai salah satu negara sponsor konferensi Gerakan Non Blok.

Tujuan Gerakan Non Blok seperti telah dirumuskan dalam Konferensi Pendahuluan di Kairo adalah merupakan suatu kelanjutan gerakan kemerdekaan dan perdamaian. Ia adalah satu gerakan dinamis yang memobilisasi jiwa nasionalisme dan patriotisme bangsa-bangsa yang ingin mencegah perang dunia lagi dan mengakhiri perang dingin antara kedua negara super power yang sangat berbahaya itu. Gerakan yang lahir karena perang dingin ini juga mendukung tinggi peacefull co-existence yang sebelumnya telah disetujui PBB dan diwujudkan untuk mencapai perdamaian dunia. Ibarat dua sisi mata uang perdamaian sangat diperlukan, agar pembangunan di setiap negara dapat dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non Blok mengemban tugas berat, yakni sebagai mediator antara kedua kekuatan yang bertentangan.

Indonesia yang tergabung dalam gerakan ini juga mempunyai misi yang sama lingkungan negara-negara lain terhadap dua kekuatan yang saling bertentangan. Akan tetapi sikap Soekarno yang fanatis anti imperialisme dan kolonialisme ternyata menjadi batu sandungan bagi



pencapaian tujuan gerakan ini. Soekarno muncul, berpidato dengan berapi-api membagi dunia ini menjadi dua kekuatan yang saling bertentangan, yakni antara Nefos dan Oldefos. Bahkan Soekarno dengan antusias mengajak bangsa-bangsa yang tergabung dalam Nefos, yakni bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika Latin, serta negara-negara sosialis untuk melenyapkan dan meruntuhkan kekuatan yang sudah mapan dengan negara-negara satelitnya. Ajakan itu mengandung arti bahwa Indonesia menentang pada negara-negara barat yang pernah mempunyai daerah jajahan dan juga harus bertentangan dengan hampir semua negara barat dan negara lain yang termasuk blok komunis.¹⁶⁴

Fungsi sebagai mediator bagi kedua blok yang bertentangan ternyata tidak mudah dikerjakan. Di dalam gerakan itu sendiri telah terjadi pertentangan pendapat mengenai masalah dunia. Sikap agresif militan yang ditampilkan Indonesia dengan membagi dunia menjadi dua kekuatan yang bertentangan mendapat dukungan sebagian peserta yang berpendapat lebih moderat dan tetap mempertahankan prinsip awal, melihat masalah-masalah dunia secara realistis. Pertentangan pendapat antara kelompok radikal dan moderat ini berakibat perpecahan pada Gerakan Non Blok. Satu kekuatan yang diharapkan mampu menjembatani perang dingin antara kedua pihak, ternyata mengalami keretakan yang pasti akan mempengaruhi keberadaanya.

164) Suli Suleman, *op.cit.*, h.23

semangat tinggi.¹⁶⁵

Gerakan Non Blok yang berintisarikan hasil KAA Bandung tahun 1955 inisekaan-akan mau dibawa oleh Presiden Soekarno untuk menjadi sekutu Cina yang ideal. Maksudnya, membentuk satu-kesatuan lain di luar kekuatan yang saling bertentangan dan bila telah memungkinkan menandingi kekuatan yang ada. Itu berarti Gerakan Non Blok mau dibawa Indonesia lepas dari tujuan yang telah disepakati bersama. Politik bebas aktif yang sebenarnya bisa diwujudkan lewat kerjasama dengan negara-negara Non Blok diselewengkan dengan mengacu pada Cina yang mempunyai kepentingan tersendiri terhadap negara-negara Non Blok. Setelah melihat sepak terjang Indonesia dalam masyarakat internasional, apakah tindakan-tindakan itu merupakan perjuangan revolusioner yang sebenarnya ataukah hanya untuk mempertahankan prestise belaka ?

C. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Masa Demokrasi Terpimpin : Sebuah Prestise ?

Pelaksanaan politik luar negeri tidak lepas dari kepentingan dalam negeri, serta watak dan sifat pemimpin yang tengah berkuasa, termasuk Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Dasardasar pemikiran, yang merupakan racikan berbagai macam paham yang ada di dunia seperti anti kolonialisme dan anti imperialisme. Marxisme

165) John D. Legge, *op.cit.*, h.424

serta revolusioner ikut pula meramaikan corak politik luar negeri. Terlebih lagi didukung Menlu Subandrio yang senantiasa mendukung kebijaksanaan Presiden Soekarno Presiden Soekarno juga memimpikan masa kejayaan Majapahit dan Sriwijaya muncul kembali di bumi Indonesia. Sementara di dalam negeri Presiden Soekarno gagal sedikit demi sedikit menjaga keseimbangan kekuatan stabilitas piramida kekuasaan. PKI mulai menggeser keberadaan AD dan keadaan itu sangat mempengaruhi kebijaksanaan politik luar negeri saat itu.

Keberhasilan Indonesia terhadap tuntutan balik wilayah Irian Barat, baik dengan diplomasi ataupun dengan konfrontasi ternyata membawa kesan yang mendalam bagi masyarakat dunia ataupun masyarakat Indonesia. Seluruh perhatian dan kemampuan waktu itu dipusatkan pada perjuangan untuk memperoleh kembali wilayah Irian Barat. Keadaan ekonomi yang buruk tidak dapat cepat diatasi karena Soekarno bukanlah seorang ahli ekonomi. Untuk menutupi keadaan buruk yang dialami Indonesia setelah perjuangan Irian Barat, maka dibutuhkan atraksi yang dapat mengalihkan pandangan umum mengenai masalah-masalah kemiskinan dan merosotnya perekonomian di dalam negeri.¹⁶⁶ Dengan kata lain ia membutuhkan konfrontasi lagi, sehingga momentum revolusi simbolik yang telah lama dihentikan setelah perjuangan merebut Irian Barat dapat

166) Ibid., h.427

tetap dipertahankan.

Dalam masalah Malaysia, Indonesia seolah-olah tidak diakui keberadannya oleh Tengku Abdul Rahman dan Inggris yang mempunyai gagasan membentuk Federasi Malaysia. Sebagai satu negara besar bila ditinjau dari luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia merupakan satu negara besar di kawasan Asia Tenggara ini. Oleh karena itu sebagai satu negara yang besar di kawasan ini. Untuk hal itu presiden Soekarno menyatakan, bahwa Indonesia ditakdirkan sebagai pihak yang harus diajak bicara dalam setiap perubahan wilayah, terutama apabila dalam pengaturan pertahanan memberikan bekas penjajah hak untuk menggunakan pangkalan terdekat yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian di Asia Tenggara.¹⁶⁷ Anggapan itu disepelekan pihak Kuala Lumpur. Anggapan Presiden Soekarno secara resmi dikemukakan pada bulan Oktober 1963 yakni :

"Suatu ketentuan seperti itu dalam persetujuan bilateral antara Kerajaan Inggris dan Malaysia yang merebut untuk dirinya sendiri hak memasukkan wilayah lain di luar wilayah pihak yang sepakat tanpa persetujuan pemerintah yang bersangkutan, tidak dapat ditafsirkan lain kecuali memiliki motif terselubung terhadap tetangga terdekat Malaysia. Untuk alasan-alasan keamanan nasional Indonesia tidak dapat mempunyai alternatif lain kecuali menentang Malaysia bentukan kolonial Inggris."¹⁶⁸

Ungkapan itu menunjukkan kecurigaan dan ketakutan Indonesia. Ketakutan akan adanya saingan sebagai negara

167) Michael Leifer, op.cit., h.118

168) Ibid.

besar di kawasan Asia Tenggara.

Menurut Mackie empat alasan dasar mengapa Indonesia memilih konfrontasi dengan Malaysia bukanlah mengada-ada. Fanatisme anti imperialisme dan kolonialisme sangat mendukung munculnya keempat alasan itu. Malaysia bagi Indonesia merupakan ancaman yang sangat membahayakan. Malaysia dan Cina yang keras menentang imperialisme dan kolonialisme serta segala bentuk neokolonialisme.¹⁶⁹ Karenanya itulah Malaysia harus dihancurkan. Cara yang ditempuh pun mirip ketika memperjuangkan Irian Barat, gabungan antara diplomasi dan konfrontasi.

Konfrontasi dimulai di bidang ekonomi dan disertai demonstrasi-demonstrasi yang didukung massa PKI di Jakarta, pengambilan alih perusahaan milik Inggris yang kemudian ditingkatkan menjadi konfrontasi fisik setelah pengumuman Dwikora. Tindakan PBB yang memberi pengakuan terhadap Malaysia juga dikecam Indonesia. Tindakan keabsahan itu merupakan suatu provokasi dan permusuhan yang terang-terangan terhadap Indonesia, yang tidak mungkin dibiarkan oleh suatu negara yang punya harga diri.¹⁷⁰ Itu dibiarkan merupakan keabsahan tindakan konfrontasi terhadap Malaysia. Dilangkahinya Indonesia dalam pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris dan PTM, menyinggung harga diri Indonesia sebagai satu negara

169) Anak Agung Gde Agung, op.cit., h.490

170) Dewan Pertimbangan Agung, Deklarasi Indonesia Keluar dari PBB (Jakarta : Deppen RI, 1965), h.6

besar di kawasan Asia Tenggara. Dengan konfrontasi itu Indonesia ingin menunjukkan Indonesia mempunyai kekuatan, bila mau dengan cepat dapat membubarkan Malaysia.

Kebijaksanaan lain yang tidak mengingat kepentingan Indonesia adalah mengenai pernyataan keluar dari keanggotaan PBB dan juga IOC. Indonesia keluar dari IOC karena kritikan badan itu terhadap penolakan Indonesia atas delegasi Israel dan Taiwan pada Asian Games keempat di Jakarta. Alasan yang diutarakan adalah sebagai negara yang menentang imperialisme dan kolonialisme tidak bisa menerima negara-negara yang merupakan proyek kolonialisme. Organisasi IOC telah didominasi oleh kolonialis dan imperialis. Indonesia juga akan membuktikan pada IOC bahwa Indonesia mampu menghimpun bangsa-bangsa yang sealian dengan Indonesia untuk menyelenggarakan pertandingan khusus bagi negara-negara yang tergabung dalam Nefos. Dari sini nampak bila Presiden Soekarno tidak mau setiap tindakannya dikritik, dengan alasan anti imperialisme dan kolonialisme keluar dari keanggotaan IOC.

Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB dengan alasan karena Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Dari kaca mata Indonesia, Malaysia adalah nekolim, memaksakan keinginannya pada rakyat Kalimantan Utara. Tidak pantas bila negara seperti itu masuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Selama ini menurut pandangan Indonesia lembaga itu tidak lebih dari satu lembaga yang menjadi antek kaum imperialis. Dipilihnya Malaysia,

berarti citra dewan itu semakin buruk lagi. Sikap Indonesia itu tidak lebih dari pelampiasan rasa kecewa karena gagal mengisolasi Malaysia dari pergaulan internasional. Indonesia juga gagal mencari dukungan, bahkan bangsa-bangsa Asia-Afrika yang biasa mendukung juga menolak memberi dukungan. Wakil Indonesia di PBB Sudjarwo Tjondronegoro menyatakan bahwa Malaysia yang berdaulat itu tidak ada dan tidak pernah di depan mata kita sehingga konfrontasi militer yang dilakukan sukarelawan-sukarelawan itu sukar dikategorikan sebagai agresi.¹⁷¹ Ketika itu Indonesia dituduh melakukan agresi terhadap Malaysia.

Pernyataan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB diumumkan Soekarno yang nyatanya bertentangan dengan nasehat Menlu Subandrio.¹⁷² Prakarsa itu, keluarnya Indonesia dari PBB, merupakan satu upaya yang menurut desakan perasaan untuk menyelematkan apa yang dipandang menghina pribadi dan kebanggaan nasional.¹⁷³ Pernyataan keluarnya Indonesia dari PBB juga menampakkan sikap frustrasi karena tidak mampu mempengaruhi PBB untuk bertindak sesuai tujuan Indonesia. Dan itu berarti gengsi Indonesia ditantang. Semua negara berhak dipilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB, termasuk pula Indonesia.

171) Michael Leiffer, op.cit., h.148

172) Ganis Harsono, Cakrawala Politik Era Soekarno (Jakarta : Inti Idayu Press, 1985), h.179

173) Michael Leiffer, op.cit., h.179

Tetapi dengan terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, merupakan pelecehan terhadap Indonesia. Indonesia sudah cukup lama menjadi anggota PBB sedangkan Malaysia merupakan anggota baru, dan merupakan negara nekolim pula. Mengapa tidak Indonesia yang dipilih ? Sedangkan Indonesia benar-benar pejuang yang anti imperialisme dan kolonialisme yang patut untuk dipilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB hanya didukung oleh pemerintah Peking, dan kepergian Indonesia ini sebagai salah satu langkah akhir ke arah pemihakan lebih dekat dengan RRC.¹⁷⁴

Untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di mata dunia, dengan dukungan RRC, Indonesia bermaksud mendirikan suatu lembaga dunia tandingan PBB dengan pimpinannya Indonesia sendiri. Keanggotaan lembaga ini khusus untuk negara-negara Nefos. Penerimaan anggotanya juga dibuat sangat sederhana dan ringkas sehingga semua negara dapat masuk sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sebelum lembaga itu dibentuk akan diselenggarakan Conefo. Pusat gerakan ini di Jakarta, dan Jakarta akan dijadikan mercusuar bagi negara-negara yang baru bangkit. Itu artinya presitise bangsa Indonesia sebagai negara sponsor akan terangkat. Tindakan Indonesia itu bukan berarti tidak mengundang risiko. Bantuan Amerika yang diberikan

174) Ibid.

sebelumnya dihentikan, hal itu semakin mempertinggi inflasi di dalam negeri. Bagaimanapun Presiden Soekarno dalam mewujudkan ambisinya menjadikan Jakarta sebagai mercusuar bagi bangsa-bangsa Nefos membutuhkan biaya yang cukup besar. Dihentikannya bantuan itu membuat Indonesia semakin tergantung pada RRC yang masih mau memberikan bantuan, setelah Indonesia mulai terkucil dari masyarakat internasional. Bila melihat fakta-fakta itu apakah politik luar negeri bebas aktif bisa dinyatakan sebagai politik bebas aktif ?

D. Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin Politik Bebas Aktif ?

Jawaban yang diperoleh dari pertanyaan di atas adalah tidak. politik luar negeri Indonesia memang aktif. Semangat anti imperialisme dan kolonialisme yang menggebu telah membutuhkan pandangan Presiden Soekarno sebagai pemegang kemudi, sehingga seakan-akan menghalalkan segala cara dan akhirnya terjadi penyelewengan. Ibarat pendulum jam ketika sedang bergerak ke kriri terhenti sejak lama sebelum nantinya bergerak lagi ke kanan.

Pengaruh PKI semakin menguat di dalam negeri bahkan mulai masuk ke tubuh AD. Kekuasaan Soekarno sebagai decision maker di Indonesia benar-benar membuat partai-partai dan lembaga lain yang dibentuknya berada di bawah kekuasaannya. Kecerdikan Soekarno dengan membubarkan setiap partai yang dipandang akan menghalanginya, memper-

licin terwujudnya kekuasaan di tangannya, sehingga kesewenangan Soekarno tidak dapat dibendung oleh siapapun. Bahkan PKI yang selalu mendapat kesempatan darinya pun tetap tidak dapat menghambatnya. Bahkan PKI berusaha untuk mendukung setiap kebijaksanaan presiden dengan mengerahkan massa pendukungnya. Dukungan itu semakin menambah semangat Soekarno untuk melakukan petualangan di luar negeri. Tetapi situasi yang kacau dalam negeri menguntungkan PKI dalam mempersiapkan diri untuk muncul sebagai penguasa. Hubungan dengan RRC pun terjalin dengan baik, setelah mulai terkucil dari pergaulan internasional Indonesia semakin mendekati pada RRC terutama untuk bantuan ekonomi dan itu semakin membuktikan ketergantungan Indonesia terhadap RRC. Situasi dalam dan luar negeri yang kacau terus berlanjut, dan puncaknya pengumuman pembentukan poros Jakarta, Peking, Pnom Penh dan Pyong Yang oleh Presiden Soekarno. Kota-kota yang dihubungkan itu merupakan penentang utama imperialisme dan kolonialisme menurut versi Soekarno. Pembentukan poros itu jelas tidak sejiwa dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pembagian dunia menjadi dua kekuatan yang saling bertentangan, yakni Nefos dan Oldefos juga merupakan suatu bentuk penyelewengan dari prinsip bebas aktif. Politik konfrontatif yang diilhami oleh teori komunisme yang berpijak pada pengertian dialektika, yang terdiri dari tesis dan antitesis, kedua kekuatan itu akan saling

berbentrok dan akhirnya akan muncul sintesis,¹⁷⁵ mewarnai perjalanan politik luar negeri masa itu. Sedangkan politik luar negeri bebas aktif tidak mengenal pengertian dialektika. Politik bebas aktif mengharapkan Indonesia jangan hanya menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional. Ia harus tetap berdiri menjadi subyek yang berhak menentukan sikap sendiri.¹⁷⁶ Dianutnya pengertian dialektika dalam politik luar negeri masa itu, Indonesia akan selalu terbawa dalam konflik-konflik yang merupakan pengaruh dari dialektika. Sebelum muncul sintesis baru yang kuat dan tangguh maka konfrontasi itu tidak akan berhenti. Untuk itu Indonesia harus berhadapan langsung dengan negara-negara barat yang sudah kuat baik secara ekonomi atau militer. Bila benar-benar terjadi konfrontasi fisik pastilah Amerika Serikat tidak akan membiarkan sekutunya diserang. Hal itu tidak mudah bagi Indonesia.

Politik konfrontatif yang dianut Indonesia juga mengakibatkan Indonesia bergantung pada negara lain. Bila seluruh anggaran dan perhatian dipusatkan pada politik konfrontasi pasti ada bidang-bidang lain yang terbengkalai. Dan suatu hal yang mustahil sebagai suatu negara baru Indonesia mempunyai ekonomi yang kuat apalagi setelah perjuangan merebut kembali Irian Barat yang sangat menyita sebagian besar kekuatan ekonominya.

175) M. Sabir, op.cit., h.193

176) Suli Sulaiman, op.cit., h.4

jaminan hak-hak negara sehingga tidak akan terjadi pihak yang dieksploitasi dan yang menguntungkan. Sehingga dalam situasi dan kondisi yang demikian itu pembangunan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan terwujud dunia baru.

Sebagai puncak ketidakbebasaktifan politik luar negeri Indonesia ketika Presiden Soekarno setelah pernyataan keluarnya Indonesia dari PBB mengatakan pembentukan poros lima negara. Poros lima negara itu sebenarnya merupakan satu rencana kerja sama yang erat dengan RRC sebagai satu manifestasi Nefos yang menentukan hari depan Asia Tenggara. Pernyataan pembentukan itu disampaikan dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1965 :

"Keruan saja rentetan revolusi-revolusi di Asia itu menggoncangkan seluruh dunia. Oleh sebab itu ... kalau kita sekarang membuat suatu poros anti imperialisme, poros anti kolonialisme, yakni poros Jakarta, Pnom Penh, Peking dan Pyong Yang serta Hanoi, janganlah kiranya bahwa poros ini adalah poros bikin-bikinan, tidaklah poros ini poros yang dibentuk oleh jalannya sejarah sendiri."¹⁷⁷

Rencana menghubungkan titik-titik satu atau negara-negara yang ingin dijadikan sebagai model Cina dan mempengaruhi di wilayah Asia Tenggara ini merupakan satu bentuk penyelewengan politik bebas aktif yang cukup mendasar pula. Bila terwujud maka poros ini hanyalah menjadi permainan bagi politik Cina yang ingin mewujudkan wilayah pengaruh komunis Cina.

Rencana konfrontasi Presiden Soekarno itu tidak saja

177) M. Sabir, *op.cit.*, h.194

ditujukan wilayah Asia Tenggara, tetapi juga meliputi seluruh dunia, yang ia mulai dari gerakan non blok. Pencanaan konfrontasi semesta ini dikemukakannya dalam pembukaan Sidang Umum MPRS III yang diselenggarakan di Bandung. Ia mengungkapkan sebagai berikut :

"Rakyat Indonesia sedang melaksanakan ofensif revolusioner manipolis melawan nekolim; revolusi Indonesia sedang menyelesaikan tahap pertama nasional demokratis dan akan memasuki tahap kedua scsialisme Indonesia; perasaan Pancasila adalah nasakom; dalam rangka menciptakan dunia baru, konfrontasi yang terus menerus harus ditingkatkan; perjuangan rakyat Asia Afrika dan Amerika Latin harus dirintis dan digalang ... dan hijrahnya Indonesia dari PBB adalah untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat di seluruh bumi."¹⁷⁸

Tindakan Presiden Soekarno nampaknya menjadi-jadi. Bahkan politik konfrontasi Indonesia ditingkatkan ke seluruh muka bumi. Maka tepatlah bila G. Modelski melikiskan jalannya politik bebas aktif di bawah kepemimpinan Soekarno sebagai berikut :

"Politik Indonesia secara berangsur-angsur bergerak ke arah jurusan baru. Di tahun 1960 Presiden Soekarno masih merupakan wakil dunia Asia-Afrika. Tahun 1961 ia telah mulai mempersoalkan arti baru politik non blok dan melihat terutama sebagai gerakan anti kolonialisme; dan tahun 1963 ia menjadi pendukung terbuka terhadap masyarakat dunia bayu yang terpecah menjadi dua, dimana ia berdiri sebagai juru bicara Nefos yang sedang muncul. Sampai sejauh itu politik luar negeri Indonesia sudah tidak dapat diuraikan lagi sebagai politik tidak memihak."¹⁷⁹

Akan tetapi sebelum semuanya tergelincir terlalu jauh dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif,

178) Ibid.

179) Ibid., h.195

di dalam negeri terjadi kup yang dilakukan oleh PKI sebagai akibat matangnya situasi dalam negeri karena petualangan di luar negeri Soekarno dan kemudahan-kemudahan yang diperoleh PKI dari Soekarno. Kup itu menimbulkan korban dari angkatan darat yang merupakan saingan PKI. Walaupun demikian kup itu juga merupakan titik balik perjalanan politik luar negeri bebas aktif. Presiden Soekarno yang tidak mau membubarkan PKI akhirnya turun kuasa dan digantikan oleh pemerintahan orde baru. Normalisasi hubungan dengan Malaysia segera dilakukan walaupun memakan waktu yang lama. Kemudian pemutusan hubungan dengan RRC pun juga dilakukan, karena dianggap negara itu turut mendalangi terjadinya kup di Indonesia. Dan sejalan dengan waktu politik luar negeri bebas aktif mulai dilaksanakan sesuai dengan relnya yakni berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Demikianlah akhir dari ambisi Soekarno. Itu berarti gagalnya cita-cita Presiden Soekarno untuk menjadi pemimpin bangsa-bangsa Asia-Afrika dengan memakai alat politik konfrontatif. Orde baru telah mengembalikan kemudi politik luar negeri bebas aktif.

BAB 6

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjalanan politik luar negeri Indonesia sangat menarik untuk dipelajari. Sejak pencetusan ide politik luar negeri bebas aktif sampai pada pelaksanaannya. Politik bebas-aktif yang idenya dicetuskan oleh Hatta pada tahun 1945, tidaklah berjalan mulus, karena pelaksanaannya mengalami pasang surut menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dunia dan kepentingan nasional. Sebagai contoh antara tahun 1959-1965 politik bebas aktif cenderung ke kiri. Politik bebas aktif terpaksa menyeleweng dari prinsip dan pengertian sebenarnya, bebas dan aktif. Bebas artinya tidak terikat oleh ideologi atau politik negara asing atau blok-blok negara-negara tertentu. Aktif artinya secara aktif menghapuskan atau ikut serta menghapus penjajahan, aktif memperjuangkan perdamaian dengan tetap bertindak sebagai subyek dan tidak boleh lepas dari tujuan nasional yang hendak dicapai.

Penyelewengan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif tidaklah bisa lepas dari berbagai faktor, yang bisa digolongkan dengan faktor dari dalam ataupun dari luar. Faktor dari dalam meliputi situasi ekonomi dan situasi politik, sedang faktor dari luar mencakup situasi perang dingin serta ambisi RRC untuk mewujudkan wilayah pengaruh

komunisme di Asia. Secara umum situasi politik luar negeri Indonesia era 1959-1965 cukup memprihatinkan. Situasi ekonomi yang buruk peninggalan kaum penjajah masih menghantui. Perekonomian masih dikuasi oleh orang-orang yang bermodal kuat, dan itu sebagian besar adalah orang-orang China perantauan. Upaya pemerintah dengan mendirikan organisasi koperasi dengan maksud untuk memperbaiki taraf hidup rakyat, terhenti di tengah jalan, tidak sesuai dengan tujuan koperasi yang sebenarnya. Dikuasainya per-ekonomian oleh satu golongan bermodal kuat akan menyebabkan harga akan mudah diatur oleh golongan itu, sehingga harga-harga barang sangat tinggi dan para pedagang kuat yang bisa mengatur jumlah barang yang beredar di pasaran. Pemerintah sendiri sedang menghadapi masalah peredaran uang di masyarakat yang cukup tinggi, hingga menimbulkan inflasi. Langkah pemerintah untuk menanggulangi masalah inflasi dengan kebijakan pemotongan nilai uang menjadi 1/10-nya, tetapi di lain pihak pemerintah tetap mencetak uang baru sebanyak-banyaknya. Hal itu dimaksudkan untuk membiayai pembangunan yang tengah dijalankan. Tetapi yang terjadi adalah inflasi yang lebih besar. Kekurangan yang terjadi di dalam negeri ini tentunya diupayakan jalan pemecahannya, salah satunya dengan mencari bantuan luar negeri. Akan tetapi bantuan yang diberikan oleh Amerika terpaksa dihentikan, karena sikap dan tindakan Indonesia yang melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan nasionalisasi

perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia. Dalam keadaan kekurangan tersebut Indonesia sangat membutuhkan bantuan dari luar dan bantuan dari Amerika dihentikan akibat tindakan Indonesia sendiri, kemudian berpaling ke RRC yang saat itu berhubungan erat dengan Indonesia. Seperti telah diketahui RRC adalah satu negara komunis yang cukup kuat di Asia. Ketergantungan di bidang ekonomi Indonesia terhadap RRC, bisa mengubah jalannya pelaksanaan politik bebas aktif. Pengaruh yang kuat akan menjadikan Indonesia sebagai boneka belaka, karena kebutuhan ekonomi merupakan salah satu kebutuhan vital suatu negara, bila bantuan ekonomi dihentikan maka akan berakibat buruk bagi negara.

Situasi politik dalam negara juga menjadi salah satu penyebab penyelewengan politik bebas aktif. Kembalinya Presiden Soekarno menjadi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, mengembalikan hak-hak yang dimiliki, sekaligus memperkuat posisinya. Tindakan Presiden Soekarno memusatkan seluruh kekuasaan di tangannya dengan cara menempatkan semuanya (Ketua lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara) berada di bawah kontrolnya menjadikan dirinya sebagai satu-satunya pembuat keputusan. Idenya untuk mempersatukan semua golongan berada di bawahnya lewat ide Nasakom, memberi kesempatan bagi organisasi yang dulunya kurang mungkin tumbuh berkembang, PKI menjadi berkembang cukup pesat, walaupun sebenarnya Presiden Soekarno kurang setuju dengan adanya partai-partai politik yang dianggap

sebagai biang kekacauan selama demokrasi parlementer berlangsung. PKI tumbuh cukup pesat, ide Nasakom sangat mendukung pesatnya pertumbuhan itu. Presiden Soekarno menjamin, karena tidak menginginkan adanya perpecahan dalam bangsa Indonesia. Akan tetapi PKI yang mendapat kemudahan itu mempergunakannya sebagai sarana untuk menyusun kekuatan hingga suatu hari nanti melakukan penggulingan kekuasaan. Sebagai satu partai yang selalu berada di luar kabinet PKI mendapat nilai plus di pandangan Presiden Soekarno. Sebagai salah satu partai progresif yang dalam waktu singkat berhasil menyusun masa pendukung besar sangat diperlukan oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kekuasaannya supaya tetap berdiri kokoh. Lain daripada itu PKI juga dibutuhkan Presiden Soekarno sebagai pengimbang AD yang bersama-sama PKI berfungsi sebagai pendukung piramida kekuasaan di Indonesia. Kedisiplinan AD yang menyebar sampai ke pelosok-pelosok sangat diperlukan oleh Presiden Soekarno untuk menyampaikan setiap keputusan Presiden Soekarno. Akan tetapi hal itu juga merisaukan Presiden Soekarno, bila suatu saat AD mengadakan kudeta, akan mendapat dukungan rakyat. Untuk itulah PKI diperlukan sebagai "tameng" pengaruh AD. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya sedikit demi sedikit pengaruh PKI mulai mendominasi pemerintah dibandingkan dengan partai-partai lain. Hal itu berakibat pula terhadap setiap pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh partai ini, termasuk juga keputusan dalam

politik luar negerinya, sehingga lebih cenderung ke kiri.

Bukan hanya pengaruh dari dalam saja yang memberi pengaruh terhadap penyelewengan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, tetapi juga faktor dari luar. Situasi dunia yang sedang dilanda perang dingin antara blok komunis dan blok liberal cukup mencemaskan dunia, terlebih lagi bagi negara-negara berkembang yang baru mendapatkan kemerdekaan setelah PD II berakhir. Situasi perpecahan dunia itu menyulitkan negara-negara ini untuk mengejar ketinggalan mereka di segala bidang. Mereka membutuhkan bantuan dari negara-negara yang bertentangan itu, karena kebanyakan dari merekalah yang mempunyai bahan serta sarana yang mereka butuhkan. Kesulitannya bila perjanjian diadakan senantiasa ditanyakan ikut blok mana. Sementara persaingan antara kedua blok yang bertentangan untuk memperluas wilayah pengaruh mereka demikian ketat, satu sama lain saling menghalangi mencegah agar masing-masing pihak tidak mendapatkan tambahan wilayah pengaruh. Situasi persaingan antara kedua blok itu juga cukup mengganggu Indonesia. Karena kedua belah pihak berusaha untuk memasukkan Indonesia ke dalam wilayah pengaruhnya. Oleh sebab itu dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terombang-ambing mengikuti pola yang terjadi saat itu.

Satu hal yang cukup berpengaruh pula, sehingga terjadi penyelewengan politik bebas aktif adalah ambisi RRC untuk mewujudkan wilayah pengaruh komunisme di Asia.



RRC memeralat Indonesia sebagai salah satu kaki tangannya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Hubungan RRC-Indonesia yang diawali tahun 1950-an itu sebagai langkah awal bagi terwujudnya hubungan yang lebih erat bagi kedua negara. Dipakainya Indonesia sebagai alat bagi RRC untuk mewujudkan cita-citanya, karena RRC melihat bahwa kemungkinan itu ada. RRC melihat ambisi besar Presiden Soekarno untuk menjadi seorang pemimpin bangsa-bangsa yang besar dan Presiden Soekarno juga memiliki karisma dan kemampuan untuk itu. Hal lain ekonomi Indonesia dikuasai oleh pedagang bermodal kuat yang sebagian besar adalah orang China, tentunya akan lebih mudah dikuasai, serta yang terakhir berkembangnya partai komunis di Indonesia. Pesatnya perkembangan Partai Komunis Indonesia merupakan modal kuat dan harapan yang cerah untuk menjadikan negara Indonesia sebagai salah satu satelitnya yang setia bila suatu saat nanti Partai Komunis Indonesia akan melancarkan revolusi dan menjadi berkuasa di Indonesia. Untuk itulah Indonesia sebagai sasaran pertama untuk "ditaklukkan" sebelum negara-negara Asia lainnya. Nampaknya cita-cita RRC untuk menjadikan Indonesia sebagai satelitnya hampir terwujud, setelah Indonesia hampir tergantung sepenuhnya di bidang ekonomi, setelah bantuan-bantuan dari Amerika Serikat dihentikan. Sebagai puncaknya setelah diadakan perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia hampir pasti menjadi negara satelit China yang setia. Dengan demikian setiap kebijak-

sanaan yang dikeluarkan atau diputuskan Indonesia harus seijin dan sepengetahuan RRC dan harus mengacu ke RRC.

Faktor-faktor itulah yang menjadi sebab-sebab penyelewengan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, sehingga meninggalkan landasan, tujuan politik bebas aktif. Tidak dapat dipungkiri keaktifan politik luar negeri bebas aktif, akan tetapi keaktifan itu adalah keaktifan yang radikal dan menjerumuskan Indonesia hanya menjadi obyek, dalam hal ini oleh RRC. RRC memang cukup memberikan dukungan bagi setiap tindakan Indonesia di luar negeri. Seperti contohnya di dalam Gerakan Non Blok. Indonesia yang mendapatkan nama dalam KAA I di Bandung merasa berkepentingan dalam mendapatkan dalam gerakan ini. Demikian pula China yang pada KAA Bandung cukup mendapat simpati dari peserta sebagai salah satu bangsa Asia yang patut menjadi acuan. Bila KAA Bandung nama Indonesia cukup terkenal dengan idenya yang cemerlang di dalam Gerakan Non Blokpun Indonesia membawa ide cemerlang akan tetapi merugikan gerakan itu sendiri. Kebencian dan fanatisme terhadap imperialisme dan kolonialisme dunia secara tidak sengaja membagi dua anggota gerakan ini yakni yang radikal dan moderat. Sedangkan Indonesia memperkenalkan pertentangan antara Nefos dan Oldefos, semangat radikal yang tidak dikenal dalam prinsip politik bebas aktif yang moderat dan selalu mencari jalan damai dalam setiap pemecahan masalah dunia. Gerakan Non Blok juga hendak dibawa Indonesia ke arah perpecahan dengan

ide yang dibawanya itu, yang seharusnya adalah persatuan dari seluruh anggota gerakan untuk memudahkan penyelesaian masalah dunia.

Contoh lain bentuk penyelewengan politik luar negeri bebas aktif adalah masalah Indonesia dengan Malaysia. Indonesia dianggap ikut campur urusan dalam negeri PTM yang merencanakan pembentukan Malaysia dengan alasan tertentu bersama Inggris. Tetapi Indonesia melihat dua hal yang cukup menyinggung sikap anti imperialisme dan kolonialisme yang sangat dipegang erat. Pertama adalah unsur pemaksaan oleh pihak PTM terhadap Sabah dan Serawak untuk masuk Malaysia. Kedua, Inggris yang dikenal sebagai salah satu negara imperialis dunia menjadi sponsor pembentukan Malaysia itu. Hal inilah yang menjadikan Indonesia melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia. Bahkan ketika masalah ini dibawa ke PBB dengan tegar Indonesia tetap bertahan pada pendapatnya. Satu titik terburuk dari penyelewengan politik bebas aktif adalah pernyataan keluar dari PBB, setelah Malaysia ditunjuk menjadi salah satu anggota tidak tetap PBB. Tindakan Indonesia itu jelas nampak lepas meninggalkan landasan ideal politik B-A, Pancasila juga lepas dari tujuan politik luar negeri bebas aktif yang menghendaki Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan pada Pancasila. Akan tetapi penyelewengan politik luar negeri tidak terjadi selamanya, dengan terjadinya kup PKI tanggal 30 September 1965 membawa

perubahan total bagi penentu kebijaksanaan. Namun yang bisa dicatat pada masa ini adalah keberhasilan Presiden Soekarno tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terancam runtuh akibat pertentangan antara PKI dan AD. Presiden Soekarno menggunakan politik konfrontasi agar pertentangan yang terjadi di dalam negeri teralihkan, sehingga tercapai satu kesatuan yakni melaksanakan politik konfrontasi. Akan tetapi dengan Orde Baru membawa kembali pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif sesuai tujuan landasan yang sebenarnya sesuai tujuan nasional bangsa Indonesia. Walau orde baru sudah berusaha membalik arah, akan tetapi tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa pelestarian dan kewaspadaan yang tinggi dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Satu hal yang perlu diingat pula adalah stabilitas dalam negeri yang harus tetap dijaga, karena politik luar negeri merupakan perpanjangan politik dalam negeri sebagai upaya memenuhi kebutuhan nasional. Bagaimana cara pelestarian politik luar negeri bebas aktif ?

B. Saran

Politik luar negeri bebas aktif pada suatu saat akan kembali bisa menyeleweng bila tidak hati-hati dalam pelaksanaannya. Tugas untuk menjaga agar politik bebas aktif tetap pada prinsipnya diemban generasi muda sekarang ini. Tidaklah dapat dipungkiri bila politik luar negeri suatu bangsa merupakan perpanjangan politik dalam negeri untuk pencapaian kebutuhan nasional. Dalam upaya memenuhi kebutuhan nasional, pastilah harus menyesuaikan

dengan kondisi dunia yang sudah berubah dengan bubarnya blok komunis. Hal itu akan membahayakan perjalanan politik luar negeri.

Langkah yang memungkinkan adalah penjagaan stabilitas nasional. Tentunya stabilitas nasional akan dapat dicapai bila lembaga-lembaga negara duduk sebagaimana tugas yang diemban. Mengingat, pada masa Demokrasi Terpimpin karena lembaga-lembaga negara ini tidak duduk sebagaimana fungsinya, karena berada di bawah presiden, memunculkan ketidakstabilan nasional dan memunculkan "diktatur Soekarno". Presiden hampir-hampir tidak terlawan. Fungsi kontrol dari lembaga-lembaga negara haruslah tetap berfungsi, mengawasi pemerintah dalam mengeluarkan kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan nasional.

Dengan duduknya lembaga-lembaga negara sebagaimana mestinya, itu berarti dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 sesuai fungsinya. Itu berarti filter yang dipergunakan dalam pembangunan nasional dapat berfungsi. Berfungsinya filter itu akan menjadi penghambat bagi kemungkinan penyelewengan politik luar negeri bebas aktif. Selain itu dari generasi muda juga harus dipersiapkan sebaik-baiknya untuk mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan, terlebih dengan pola kekuatan dunia yang telah berubah dengan hancurnya blok komunis dan munculnya kekuatan tunggal Amerika. Itulah tugas berat generasi muda. Dengan demikian uraian mengenai politik luar negeri bebas aktif masa Demokrasi Terpimpin telah berakhir semoga mempunyai kegunaan bagi ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Husin
1957 Pantiasila dan Komunisme. Djakarta : Penerbit Pusaka.
- Bernhard Dahm
1971 History of Indonesia in the Twentieth Century. London, New York, Washington: Praeger Publisher
- Chairul Saleh
1964 Proklamasi 17 Agustus 1965 : Ledakan Penjelmaan New Emerging Forces.
- Deliar Noer
1990 Mohammad Hatta Biografi Politik. Jakarta: IP3ES
- Departemen Penerangan Republik Indonesia
1965 CONEFO Suatu Nasakom Internasional. Jakarta : Deppen RI
- DEPPEN
Dari Proklamasi Sampai Gesuri Yayasan Prapantja
- Donald Hindley
1964 The Communist Party of Indonesia 1951-1963. Berkley and Los Angeles : University of California Press.
- Dewan Pertimbangan Agung
1965 Deklarasi Indonesia Keluar dari PBB. Jakarta : Deppen RI
- Dudy Singadilaga
1973 Politik Luar Negeri Indonesia. Bandung Penerbit Alumni
-
- 1963 Deklarasi Ekonomi Peraturan Pelaksanaan Beserta Penielasannya. Bandung : Penerbit CV "Dua R" dan MPP Jabar.
- Ebenstein, William
1963 Isme-isme Dewasa ini. Penerbit Surabaya
- Fairbank, Frans F.
1985 Hubungan Internasional dan Peranan Bangsa Indonesia Suatu Pendekatan Sejarah. Jakarta : Dik.Bud.

- Ganis Harsono
1985 Cakrawala Politik Era Soekarno. Jakarta : Inti Idayu Press.
- Hall, Kosud, ed.
1967 Indonesia : The Soekarno Years. New York : interim History
- Hidayat Mukmin
1991 TNI Dalam Politik Luar Negeri : Studi Kasus Konfrontasi Malaysia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Herbert Feith dan Lance Castre, ed.
1988 Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta : LP3ES
- Ida Anak Agung Gde Agung
1973 Twenty Years Indonesia Foreign Policy 1945-1965. Mouton : The Netherlands
- I Wangsa Widjaya, Meutia F. Swasono
1981 Muhammad Hatta - Kumpulan Pidato dari Tahun 1942-1949. Jakarta : Yayasan Idayu Press.
- Ismail Suny
1984 Mekanisme Demokrasi Pancasila. Jakarta : Aksara Baru.
- Jones, Walter S.
1992 Logika Hubungan Internasional : Persepsi Nasional. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- K K K
1967 Dari Madiun ke Lubang Buaya Dari Lubang Buaya ke ...? Jakarta
-
- 1963 Komunisme di Asia. Jakarta
- Kardiyat Wiharyanto, A
1989 Reaksi Terhadap Pembentukan Federasi Malaysia. Yogyakarta IKIP Sanata Dharma.
- Lie Tek Tjeng
1970 RRT dan Singapura : Suatu Pandangan. LIPI : Lembaga research kebudayaan Nasional Seri IX/4.
- Legge, J.D., ed.
1985 Soekarno Sebuah Biografi Politik. Jakarta : Penerbit Sinar Harapan

- Leiffer, Michael
1986 Politik Luar Negeri Indonesia Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Louis Gottscalk
Mengerti Sejarah. Jakarta : Penerbit UI
- Mohammad Hatta
1953 Dasar Politik Luar Negeri Indonesia. Djakarta : Tintamas.
- _____
- Pengertian Pancasila. Jakarta : Idayu Press.
- _____
- 1960 Ekonomi Terpimpin. Jakarta : Penerbit Fasco.
- _____
- 1956 Lampau dan Datang. Djakarta: Penerbit Djambatan
- Moedjanto, G.
1988 Indonesia Abad ke-20 Jilid 2. Yogyakarta : Kanisius.
- Mochtar Kusumaatmadja
1983 Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa ini. Bandung : Penerbit Alumni.
- Mochtar Lubis
1986 Hati Nurani Melawan Kezaliman - Surat-surat Bung Hatta Kepada Presiden Soekarno 1951-1965. Jakarta : Penerbit Sinar Harapan.
- Mackie, J.A.C.
1974 Konfrontation : The Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966. Kuala Lumpur.
- Moeljarto Tjokrowinoto
1972 Beberapa Aspek Pikiran Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia. Yogyakarta : Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.
- Miriam Budiardjo
1986 Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia
- Notosoetardjo
1959 Kembali Kepada Djiwa Proklamasi 1945. Djakarta: Harian Pemuda
- Nasution A.H.
1985 Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5 : Kengan Orde Lama. Jakarta : Gunung Agung

- Roeslan Abdulgani
Sosialisme Indonesia - Perkembangan Tjita-Tjitanya Ketegasannya. Jajasan Prapantja
-
- 1961 Penjelasan Manipol USDEK. Deppen RI
-
- 1987 Indonesia Menatap Masa Depan Jakarta : Pustaka Merdeka.
- Sabir, M.
 1987 Politik Bebas Aktif. Jakarta : CV Mas Agung
- Saffri Yusuf
 1989 Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Simon, Sheldon W.
 1969 The Broken Triangle Peking Djakarta And PKI. Baltimore : The Johnes hopkins Press.
- Simatupang, TB
 1960 Pemerintah-Masyarakat-Anqkatan Perang. Jakarta: PT Indira
- Sartono Kartodirdjo
 1992 Pendidikan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah Jakarta : PT Gramedia Pustakka Utama
- Remelink, Willem G.J.
 1982 Sejarah China, Ikhtisar Sejarah dan Kebudayaan Chinna dari Zaman Pra-Sejarah Sampai kini. Yogyakarta.
- Reindhardt, John M.
 1971 Foreign policy and National Integration : The Case of Indonesia. Monograph Series No.17/Yale University South East Asia Studies
- Soediman Kartohadiprodjo
 1983 Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila. Bandung
- Suli Suleman
 1973 Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia. Jakarta : Deplu RI
- Sumpeno Prawirosaputra
 1984 Politik Luar Negeri RI. Bandung : Penerbit Remaja Karya CV.
- Sundhaussen, Ulf.
 1986 Politik Militer Indonesia Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta : LP3ES

Widjaya, AW.
1986 Indonesia-Asia-Afrika-Non Blok-Politik Bebas Aktif. Jakarta : Bina Aksara.

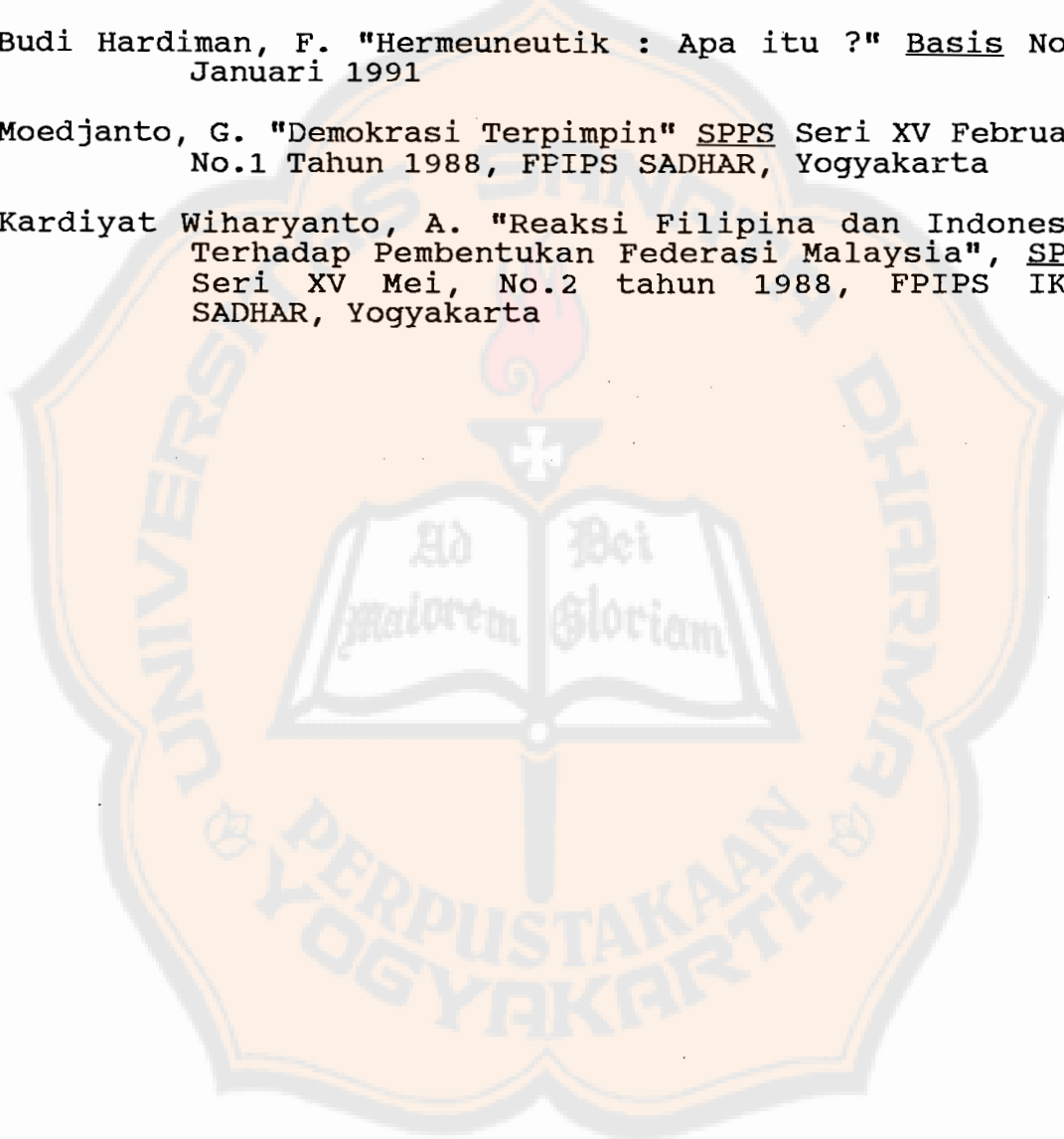
Artikel :

Juwono Sudarsono, "Bebas Aktif di Tengah Dunia" Prisma.
No.8 Tahun XIV September 1985

Budi Hardiman, F. "Hermeuneutik : Apa itu ?" Basis No.1
Januari 1991

Moedjanto, G. "Demokrasi Terpimpin" SPPS Seri XV Februari
No.1 Tahun 1988, FPIPS SADHAR, Yogyakarta

Kardiyat Wiharyanto, A. "Reaksi Filipina dan Indonesia
Terhadap Pembentukan Federasi Malaysia", SPPS
Seri XV Mei, No.2 tahun 1988, FPIPS IKIP
SADHAR, Yogyakarta



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PROGRAM SATUAN PELAJARAN I

I. IDENTITAS

BIDANG STUDI : SEJARAH

SUB BIDANG STUDI : SEJARAH NASIONAL

POKOK BAHASAN : POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

SUB POKOK BAHASAN : KONSEP-KONSEP POLITIK BEBAS AKTIF

II. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Siswa memahami politik luar negeri bebas aktif masa demokrasi terpimpin.

III. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

1. Siswa mengetahui konsep-konsep bebas aktif.
2. Siswa memahami landasan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
3. Siswa memahami tujuan dan sasaran politik luar negeri bebas aktif.

IV. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

1. Pendekatan dengan metode: ceramah, tanya jawab, pemberian tugas.
2. Langkah-langkah :
 - a. Apersepsi
 - b. Menerangkan bahan
 - c. Memberikan waktu bagi siswa untuk bertanya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

d. Rangkuman materi

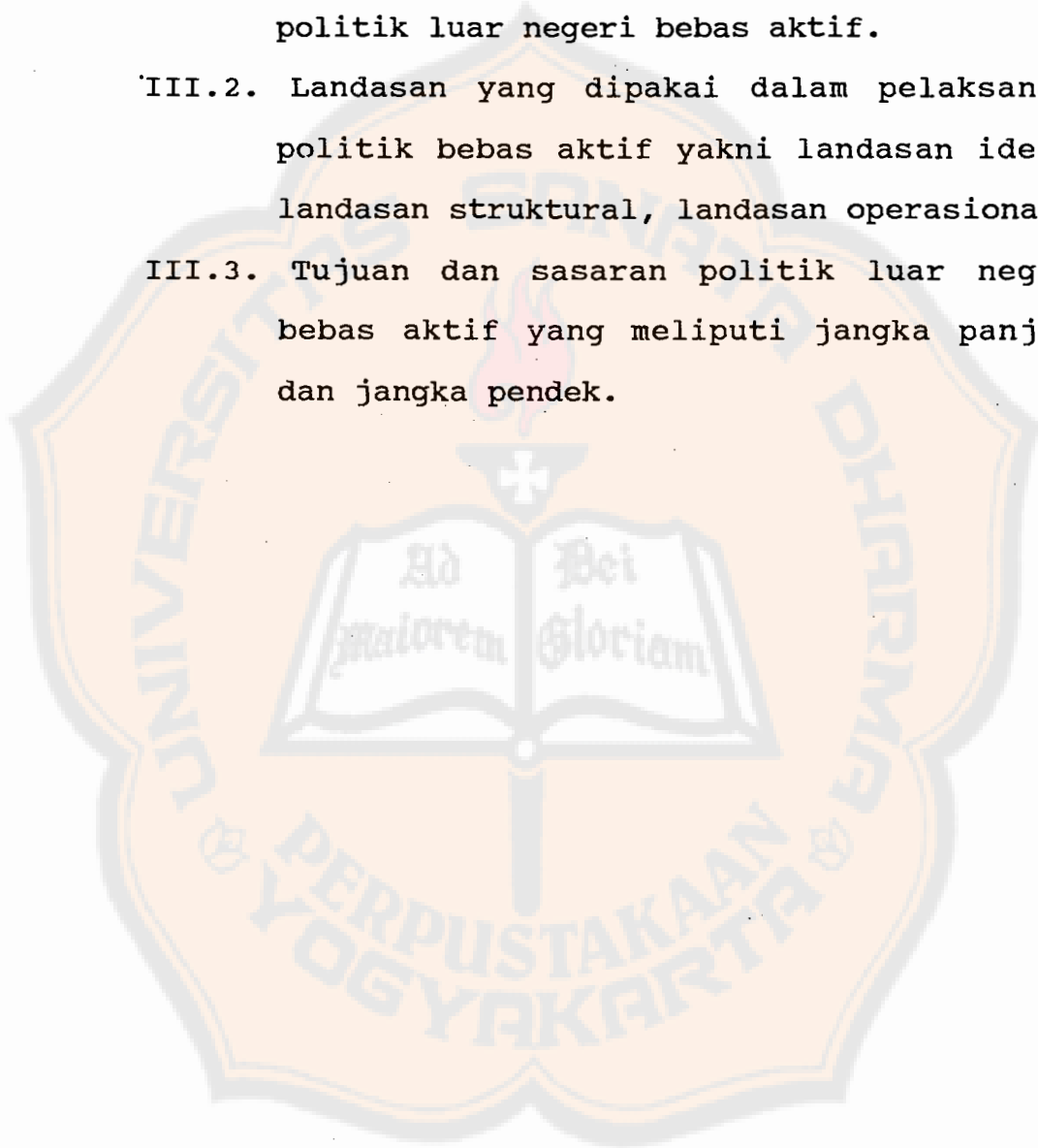
e. Pos test

3. Materi

III.1. Tokoh-tokoh yang mengemukakan pengertian politik luar negeri bebas aktif.

III.2. Landasan yang dipakai dalam pelaksanaan politik bebas aktif yakni landasan ideal, landasan struktural, landasan operasional.

III.3. Tujuan dan sasaran politik luar negeri bebas aktif yang meliputi jangka panjang dan jangka pendek.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PROGRAMA SATUAN PELAJARAN II

I. IDENTITAS

BIDANG STUDI : SEJARAH

SUB BIDANG STUDI : SEJARAH

POKOK BAHASAN : POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

SUB POKOK BAHASAN : SITUASI DALAM NEGERI PASCA DEKRIT
PRESIDEN 5 JULI 1959

II. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Siswa memahami politik luar negeri bebas aktif masa demokrasi terpimpin.

III. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

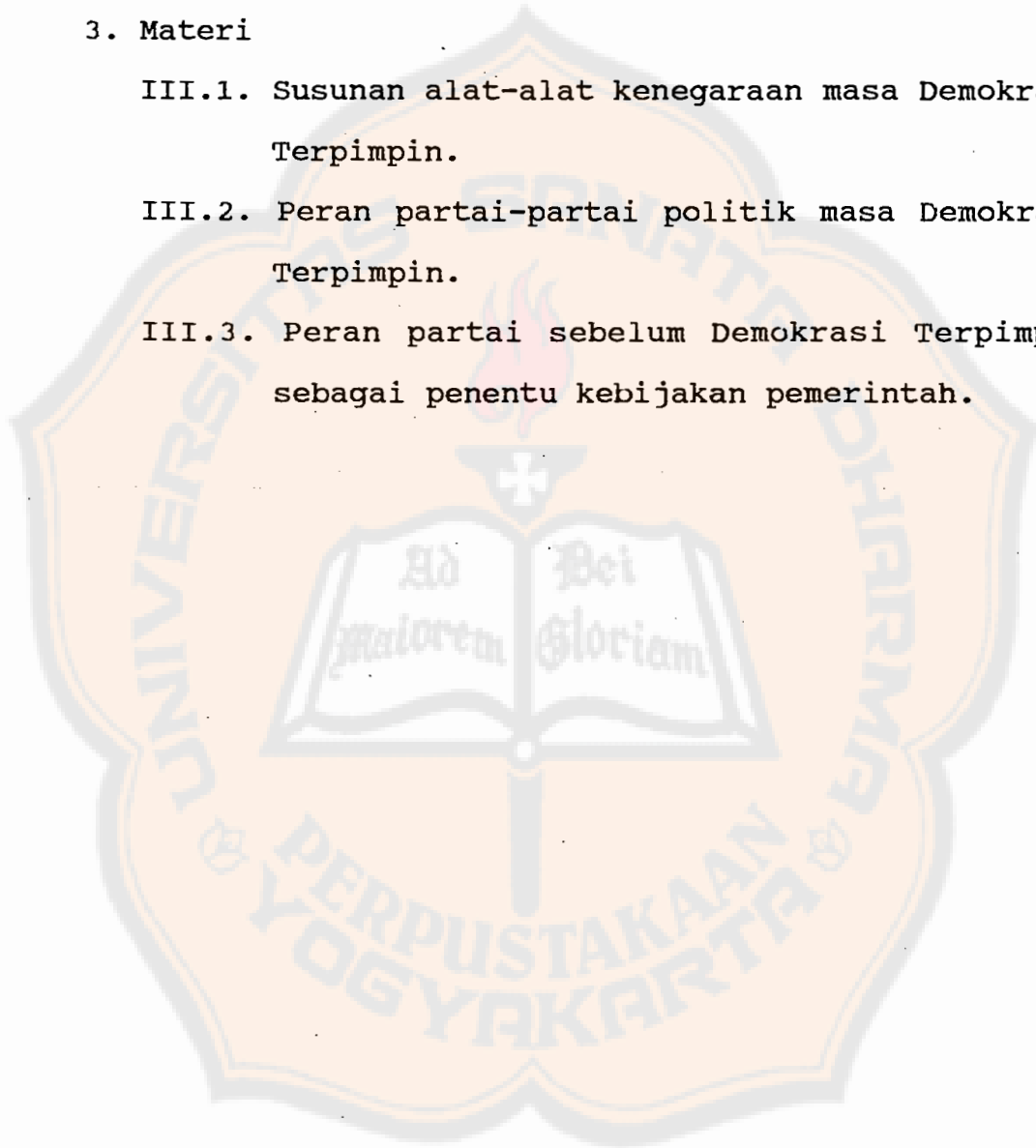
1. Siswa mengetahui susunan alat-alat kenegaraan masa Demokrasi Terpimpin.
2. Siswa mengetahui peran partai-partai politik masa Demokrasi Terpimpin.
3. Siswa dapat membandingkan peran partai masa Demokrasi Parlemen dan masa Demokrasi terpimpin

IV. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

1. Pendekatan dengan metode: ceramah, tanya jawab, pemberian tugas.
2. Langkah-langkah :
 - a. Apersepsi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b. Menerangkan bahan
 - c. Memberikan waktu bagi siswa untuk bertanya
 - d. Rangkuman materi
 - e. Pos test
3. Materi
- III.1. Susunan alat-alat kenegaraan masa Demokrasi Terpimpin.
 - III.2. Peran partai-partai politik masa Demokrasi Terpimpin.
 - III.3. Peran partai sebelum Demokrasi Terpimpin sebagai penentu kebijakan pemerintah.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PROGRAM SATUAN PELAJARAN III

I. IDENTITAS

BIDANG STUDI : SEJARAH

SUB BIDANG STUDI : SEJARAH

POKOK BAHASAN : POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

SUB POKOK BAHASAN : PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI
INDONESIA

II. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Siswa memahami politik luar negeri bebas aktif masa demokrasi terpimpin.

III. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

1. Siswa mengetahui situasi umum dunia.
2. Siswa dapat menjelaskan kiprah Indonesia di luar negeri.
 - a. Hubungan Indonesia-RRC
 - b. Aksi konfrontasi terhadap Malaysia
 - c. Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok
 - d. Cita-cita Indonesia menjadi pemimpin negara-negara dunia ketiga.

IV. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

1. Pendekatan dengan metode: ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, diskusi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Langkah-langkah :

- a. Apersepsi
- b. Menerangkan bahan
- c. Memberikan waktu bagi siswa untuk bertanya
- d. Rangkuman materi
- e. Pos test

3. Materi

III.1. Situasi umum dunia Pasca Perang Dunia II

III.2.a. Hubungan Indonesia-RRC, latar belakang, tujuan.

2.b. Aksi konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia; sebab-sebab, bentuk konfrontasi akhir konfrontasi.

2.c. Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok.

2.d. Cita-cita Indonesia menjadi pemimpin negara-negara dunia ketiga.

